



LKjIP 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan K.H. Samanhudi Nomor 4, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah 94711
Pos-el itkabbanggai@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Luwuk, 27 Maret 2025

Pl. T. INSPEKTUR,



MUHAMMAD JUNAEDI, S.Ag., SH.
NIP. 19760222 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan kinerja ini adalah merupakan tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2024 yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024. Laporan kinerja ini sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu: "Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal", sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis selanjutnya, serta bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang.

Luwuk, 27 Maret 2025

BUPATI BANGGAI



Ir. H. AMIRUDIN, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2024 memiliki 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan total 17 (tujuh belas) indikator kinerja, dan 17 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi menunjukkan bahwa dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target ; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 12 target

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis 1					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,63	72,86	100,32	Sangat Baik
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,1	76,07*	165,01	Sangat Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,26%	3,11	62,39	Kurang
4	Angka Kemiskinan	5,85%	6,56	78,35	Baik
5	Gini Rasio	0,287	0,316	89,9	Baik
Sasaran 2					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru					
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	4,7%	5,19%	110,43	Sangat Baik
Sasaran 3					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan					
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	68,73%	51,89	75,50	Cukup

Sasaran 4					
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas					
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	75,00%	69,12	92,16	Sangat Baik
Sasaran 5					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Rendah (0,37)	92,5	Sangat Baik
Sasaran 6					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	34,61%	40,19	116,12	Sangat Baik
2	Indeks Ketahanan Pangan	88,67	85,14	96,02	Sangat Baik
Sasaran 7					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,018	81,16	98,95	Sangat Baik
Sasaran 8					
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah					
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,74%	0,34%	12,41	Sangat Kurang
Sasaran 9					
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,21	27,17	52,04	Kurang
Sasaran 10					
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100,00	Sangat Baik
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif/Terinovatif	Inovatif	85,44	Baik
3	Nilai SAKIP	AA	BB	83,69	Baik

Keterangan : *: Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.073.955.057.822,47 atau 91,39% dari pagu Rp. 3.363.546.137.928,00.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2024, dan diharapkan untuk capaian kinerja di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat dalam upaya mendukung pencapaian Visi Kabupaten Banggai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah	I-1
1.3 Organisasi	I-11
1.4 Isu-Isu Strategis	I-15
1.5 Landasan Hukum	I-16
1.6 Sistematika Laporan	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	II-10
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	II-27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-31
2.5 Perjanjian Kinerja	II-32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III-4
3.4 Realisasi Anggaran	III-196
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai	I-3
1.2	Kondisi topografi kemiringan lereng di Kabupaten Banggai	I-5
1.3	Jumlah penduduk (ribu) Kab.Banggai Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-7
1.4	Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	I-8
1.5	Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2024	I-9
1.6	Kondisi ASN berdasarkan golongan ruang Tahun 2024	I-13
1.7	Kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024	I-14
1.8	Kondisi ASN berdasarkan Jabatan Tahun 2024	I-15
2.1	Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-5
2.2	Katerkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026	II-7
2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah 2021-2026	II-8
2.4	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah 2021-2026	II-11
2.5	Arah kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-25
2.6	Indikator kinerja utama Pemerintah kabupaten banggai	II-31
2.7	Perjanjian Kinerja tahun 2024	II-32
3.1	Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran	III-1
3.2	Pencapaian indikator kinerja tahun 2024	III-3
3.3	Rekap pencapaian indikator sasaran	III-4
3.4	Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-5
3.5	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2024	III-10
3.6	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024	III-11
3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2024	III-15
3.8	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-15
3.9	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-16
3.10	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	III-18
3.11	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2024	III-20
3.12	Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Tahun 2022, Tahun	III-25

	2023 dan Tahun 2024 Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai	
3.13	Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Banggai Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024	III-26
3.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Agustus 2022 - Agustus 2024	III-27
3.15	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai, 2017-2024	III-31
3.16	Kemiskinan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-32
3.17	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, 2021-2024	III-38
3.18	Program, Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-41
3.19	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-42
3.20	Daftar eksportir SKA kabupaten Banggai tahun 2024	III-43
3.21	Data Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga Tahun 2024	III-44
3.22	Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2024	III-45
3.23	Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri Tahun 2024	III-45
3.24	Data Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-47
3.25	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, Tahun 2024	III-48
3.26	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024 Yang Mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-54
3.27	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	III-55
3.28	Status Desa berdasarkan IDM di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-56
3.29	Status Perkembangan Status IDM Kabupaten Banggai, 2021-2024	III-58
3.30	Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-59
3.31	Perbandingan IDM Kabupaten Banggai dengan Kabupaten/Kota, Provinsi di Sulawesi Tengah dan IDM Nasional tahun 2024	III-60
3.32	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	III-62

3.33	Sasaran Strategis 4 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-63
3.34	Capaian Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik tahun 2024	III-63
3.35	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-68
3.36	Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-69
3.37	Nilai IKD dan IRB Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	III-70
3.38	Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Banggai, per Kecamatan Menurut BNPB 2024	III-73
3.39	Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-78
3.40	Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	III-78
3.41	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2020–2024	III-80
3.42	Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banggai	III-81
3.43	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan Tahun 2024	III-81
3.44	Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-83
3.45	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-88
3.46	Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-90
3.47	Produksi daging Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (KG) di Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024	III-91
3.48	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-92
3.49	Produksi daging Unggas Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (KG) di Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024	III-94
3.50	Jumlah Produksi sektor perikanan, rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak	III-97
3.51	Data Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Tangkap, Tahun 2024	III-97
3.52	Data Produksi berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2024	III-98

3.53	Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya dan Perusahaan Perikanan	III-101
3.54	Jumlah RTP Menurut Kategori Teknologi yang digunakan	III-101
3.55	Produksi Perikanan Budidaya	III-102
3.56	Pembenihan Perikanan Tahun 2024	III-103
3.57	UPI Sertifikasi SJMKHP/HACCP	III-105
3.58	UMKM dan POKLAHSAR	III-105
3.59	Data Ekspor UPI Tahun 2024	III-106
3.60	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai (miliar rupiah), 2020–2024**	III-111
3.61	Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-113
3.62	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai, 2024	III-115
3.63	Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai, 2024	III-116
3.64	Cadangan Pangan Kabupaten Banggai, 2024	III-116
3.65	Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan Target Nasional, 2024	III-117
3.66	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih, Tahun 2024	III-124
3.67	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	III-125
3.68	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-127
3.69	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	III-130
3.70	Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat	III-132
3.71	Indeks kualitas air	III-133
3.72	Indeks kualitas udara	III-133
3.73	Indeks kualitas lahan/vegetasi hutan	III-134
3.74	Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten banggai, 2024	III-134
3.75	Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat	III-137
3.76	Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-138
3.77	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan di Kabupaten Banggai, Tahun 2024	III-141
3.78	Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024	III-142

3.79	Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat tidur yang tersedia pada Hotel Bintang di Kabupaten Banggai, 2020-2024	III-143
3.80	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Non Bintang di Kabupaten Banggai 2020-2024	III-144
3.81	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-146
3.82	Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-147
3.83	Sanggar/Komunitas Seni Pertunjukkan Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-148
3.84	Cagar Budaya Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-150
3.85	Jumlah Penduduk/Pengunjung perpustakaan tahun 2023	III-152
3.86	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024	III-152
3.87	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-154
3.88	Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-155
3.89	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-156
3.90	Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Tahun 2023 hingga tahun 2024	III-157
3.91	Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai - LKE KEMENPANRB	III-159
3.92	Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024	III-175
3.93	Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-175
3.94	Penilaian Inovasi Oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu <i>Innovative Government Award</i> (IGA)	III-177
3.95	Daftar Inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi daerah Tahun 2024	III-182
3.96	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan 2024	III-187
3.97	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-191
3.98	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-194
3.99	Realisasi Pendapatan Daerah	III-196

3.100	Pendapatan Pajak Daerah	III-197
3.101	Pendapatan Retribusi daerah	III-199
3.102	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	III-200
3.103	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-201
3.104	Pendapatan Transfer	III-202
3.105	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	III-202
3.106	Pendapatan Transfer Antar Daerah	III-202
3.107	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	III-203
3.108	Belanja Pegawai	III-204
3.109	Belanja barang dan jasa	III-205
3.110	Belanja Subsidi	III-206
3.111	Belanja Hibah	III-206
3.112	Belanja Bantuan Sosial	III-207
3.113	Belanja Modal	III-208
3.114	Belanja Tidak Terduga	III-208
3.115	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	III-209

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Banggai	I-2
2.1	Tema pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-27
2.2	Prioritas Pembnagunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	II-27
3.1	IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2024	III-7
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM Indonesia 2024	III-8
3.3	Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024	III-72

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Luas (km ²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai	I-3
3.1	IPM kabupaten Banggai 2021-2024	III-6
3.2	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-7
3.3	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024	III-9
3.4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Banggai Tahun 2006-2024	III-9
3.5	Angka Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup) Kabupaten Banggai Tahun 2006-2024	III-11
3.6	Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai, 2021-2024	III-12
3.7	Perkembangan Pengeluaran Riil Per kapita Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024 (Ribu rupiah/orang/tahun)	III-14
3.8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai 2019-2023	III-21
3.9	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2024	III-22
3.10	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional	III-22
3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022–Agustus 2024	III-26
3.12	Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2023-2024	III-28
3.13	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014-Maret 2024	III-32
3.14	Kedalaman Kemsikinan (P1) dan Kearifan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2024	III-33
3.15	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, 2020-2024	III-37
3.16	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2022-2024	III-39
3.17	Perbandingan Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-50
3.18	Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2024	III-61
3.19	Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024	III-79
3.20	Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Banggai (kuintal), Tahun 2024	III-85
3.21	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 -	III-99

	2024	
3.22	Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan	III-99
3.23	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 - 2024	III-103
3.24	Pertumbuhan produksi Pengolahan Hasil Perikanan	III-108
3.25	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dengan Nasional, Tahun 2024	III-117
3.26	Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten banggai, 2017-2024	III-118
3.27	Perkembangan garis kemiskinan kabupaten banggai, Tahun 2017-2024 (Rp/Kapita)	III-119
3.28	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai, 2020-2024	III-121
3.29	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banggai, 2021—2024	III-128
3.30	Perbandingan IKLH, IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2024	III-135
3.31	Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai dan Nasional Tahun 2024	III-136
3.32	Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	III-139
3.33	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2023-2024	III-157
3.34	Perrbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai dengan Provinsi/Kab/Kota se Sulawesi Tengah tahun 2023-2024	III-173
3.35	Nilai dan Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2020-2024	III-185
3.36	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	III-191

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

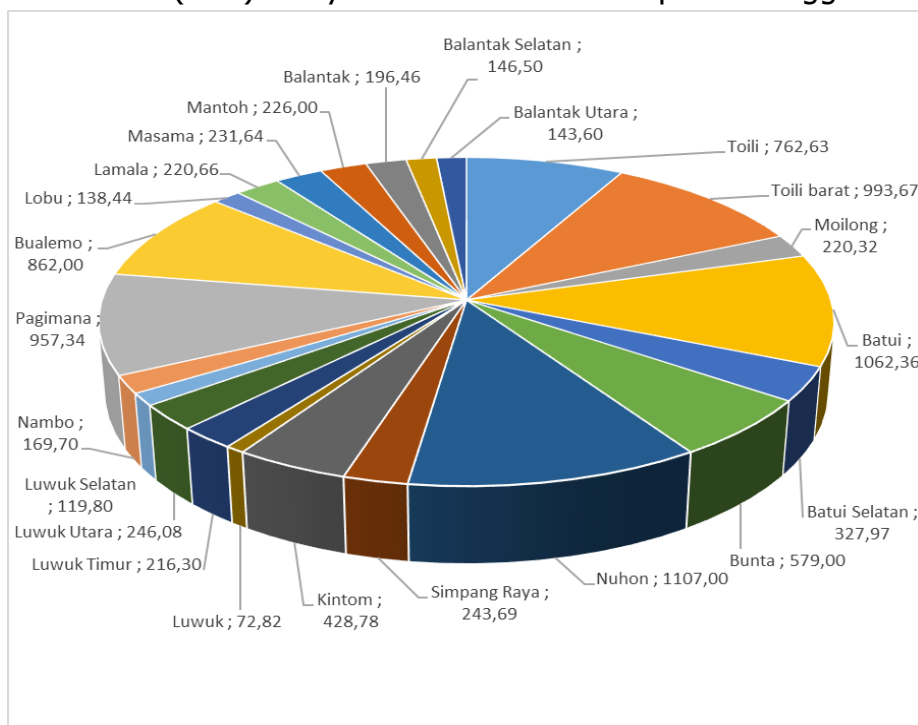
Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, serta berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan tahun keTI atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian wilayah Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan,

Grafik 1.1
Luas (km²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BPS , Banggai Dalam Angka 2025

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai

23 Kecamatan	291 Desa	46 Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan
Toili	24	1	25
Toili Barat	17	-	17
Moilong	16	-	16
Batui	6	7	13
Batui Selatan	10	-	10
Bunta	18	4	22
Nuhon	20	-	20
Simpang Raya	12	-	12
Kintom	11	3	14
Luwuk	2	8	10
Luwuk Timur	13	-	13
Luwuk Utara	9	2	11
Luwuk Selatan	1	9	10
Nambo	5	6	11
Pagimana	31	3	34
Bualemo	19	-	19
Lobu	10	-	10
Lamala	12	-	12

Masama	14	-	14
Mantoh	10	-	10
Balantak	10	3	13
Balantak Selatan	11	-	11
Balantak Utara	10	-	10

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu :

- Luwuk ke Palu = 610 Kilo Meter
- Luwuk ke Parigi = 535 Kilo Meter
- Luwuk ke Poso = 388 Kilo Meter
- Luwuk ke Ampana = 248 Kilo Meter
- Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

1.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0°30' dan 2°20' Lintang Selatan dan antara 122°23' dan 124°20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 Km² dan 9.672,7 Km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 Km² atau 67,74% merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.1.3. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam (>40%) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan datar dengan kemiringan antara 0–15% di Kabupaten Banggai sangat terbatas, yaitu

hanya sekitar 21,06% atau 195.067 Ha, sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas. Keadaan topografi Kabupaten Banggai berdasarkan kemiringan lereng, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kemiringan Lereng di Kabupaten Banggai

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0–2%)	142.253	15,36%
2.	Datar–Landai (2-15%)	52.814	5,70%
3.	Landai–Agak Curam–Curam (15–40%)	288.111	31,12%
4.	Curam–Sangat Curam (>40%)	442.664	47,81%

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

1.2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Kabupaten Banggai Terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Banjir

Sebaran daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terdapat pada Kecamatan Toili, Batui dan Bonta, Pesisir utara dan pantai Bunta, Jalur Luwuk-Lamala, dan Pesisir Poh-Pagimana.

Strategi Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Banjir :

1. Melakukan Normalisasi sungai
2. Membatasi permukiman yang menempati dataran sempit pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan pegunungan yang berlereng terjal

b. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Hampir semua wilayah Banggai mempunyai potensi tsunami rendah. Adapun wilayah yang berpotensi tsunami sedang, tersebar di Kecamatan Bunta, Toili, Batui, Bualemo, dan Lamala. Wilayah yang rawan terhadap tsunami adalah Toili-

Batui, Pesisir utara, dan pantai Bunta, Jalur Luwuk Lamala, Pesisir Poh-Pagimana, dan Pantai Bualemo.

c. Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Abrasi terjadi akibat gelombang dan arus laut yang menabrak garis pantai. Abrasi dapat diakibatkan oleh kondisi alamiah, misalnya terjadinya kenaikan muka air laut yang bersifat global. Abrasi juga dapat terjadi akibat perubahan arus laut sepanjang pantai karena aktifitas manusia mengubah morfologi pantai seperti reklamasi, pembuatan pelabuhan besar, pengerukan dan penggalian bahan galian golongan C di tepi pantai.

d. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032, daerah rawan longsor di Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Daerah rawan longsor kelas rendah menyebar merata di seluruh Kabupaten Banggai yaitu di Kecamatan Toili, Kintom, Batui, Bunta, Luwuk, Bualemo, Lamala, Balantak, terutama pada wilayah yang berada pada pinggir perairan.
2. Kelas kerawanan sedang berada pada semua wilayah Banggai dengan dominasi di Kecamatan Toili, Batui, Bunta, Kintom, dan Pagimana.
3. Kelas kerawanan tinggi sangat dominan di Kecamatan Bunta dan Pagimana, dan sedikit di Kecamatan Toili, Batui, Kintom, Bualemo, Lamala, Luwuk, dan Balantak.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi gempa Bumi di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

▪ Kerawanan tinggi

Daerah kerawanan tinggi bencana gempabumi di Kabupaten Banggai adalah kawasan pesisir Kecamatan Batui dan Toili, sebagian pesisir Kecamatan Bunta, hampir seluruh pesisir Kecamatan Bualemo, sebagian pesisir Kecamatan Balantak, sebagian pesisir Kecamatan Lamala dan sebagian pesisir Kecamatan Luwuk bagian timur

▪ Kerawanan rendah

Hampir keseluruhan wilayah Banggai mempunyai kerawanan rendah, jauh lebih besar angka/luasannya dibandingkan wilayah yang mempunyai kerawanan tinggi.

- f. Kawasan Rawan Bencana Erosi Permukiman dan Erosi Sungai
- Strategi Penataan Ruang pada kawasan erosi permukaan dan erosi sungai :
- Menghindari aktivitas permukiman pada kawasan sekitar tebing sungai.
 - Menghindari aktivitas permukiman pada hutan lindung DAS; dan
 - Membuat tanggul-tanggul sungai yang rawan erosi, terutama untuk wilayah perkotaan.

1.2.1.5. Demografi

Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan. Kepadatan penduduk terpusat di daerah ibukota kabupaten yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau menetap disana. Dalam hal ini, Kecamatan Luwuk sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banggai memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 482 jiwa per km², jauh di atas angka kepadatan penduduk Kabupaten Banggai. Sementara kecamatan lain hanya memiliki kepadatan penduduk di bawah seratus. Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Nuhon, yaitu sebanyak 18 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	BATUI	9,671	9,336	19,007
2	BUNTA	10,131	9,795	19,926
3	KINTOM	5,965	5,950	11,915
4	LUWUK	16,416	16,612	33,028
5	LAMALA	3,786	3,554	7,340
6	BALANTAK	3,080	3,006	6,086
7	PAGIMANA	12,411	12,084	24,495
8	BUALEMO	9,994	9,674	19,668
9	TOILI	18,860	18,128	36,988
10	MASAMA	6,251	6,129	12,380
11	LUWUK TIMUR	6,839	6,495	13,334
12	TOILI BARAT	12,624	11,763	24,387
13	NUHON	10,215	9,614	19,829

14	MOILONG	10,137	9,837	19,974
15	BATUI SELATAN	7,883	7,464	15,347
16	LOBU	2,097	2,053	4,150
17	SIMPANG RAYA	7,855	7,317	15,172
18	BALANTAK SELATAN	2,875	2,624	5,499
19	BALANTAK UTARA	2,562	2,546	5,108
20	LUWUK SELATAN	12,308	12,405	24,713
21	LUWUK UTARA	10,260	10,208	20,468
22	MANTOH	3,706	3,399	7,105
23	NAMBO	4,451	4,526	8,977
Jumlah		190,377	184,519	374,896

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sebesar 374.896 jiwa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai memiliki penduduk yang besar seperti Kecamatan Toili dengan jumlah penduduk sebesar 36.988 jiwa dan Kecamatan Luwuk sebesar 33.028 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Banggai sebanyak 190.377 jiwa dari penduduk Kabupaten Banggai, sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banggai sebanyak 184.519 jiwa.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum sekolah	66.586	17,76
2	Belum tamat SD/Sederajat	37.985	10,13
3	tamat SD/Sederajat	105.607	28,17
4	tamat SLTP/Sederajat	56.338	15,03
5	tamat SLTA/Sederajat	83.166	22,18
6	Diploma I/II	1.777	0,47
7	Diploma III/S.Muda	3.378	0,90
8	Diploma IV/Strata I	19.061	5,08
9	Strata II	963	0,26
10	Strata Iii	35	0,01
Jumlah		374.896	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai Tahun 2024

Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,47% sedangkan D3 0,9%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 5,08%, S2 0,26%, dan S3 0,001%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 22,18%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 15,03% dan 28,17%. Sementara itu, ada 10,13% penduduk Kabupaten Banggai yang belum tamat SD. Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 17,76%. Sedangkan untuk Mata pencaharian penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa, pertanian, dan manufaktur. Berikut adalah persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Banggai berdasarkan sektornya:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Berdasarkan Mata Pencaharian
Tahun 2024

No	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	96,060	25.62
2	Mengurus Rumah Tangga	61,699	16.46
3	Pelajar/Mahasiswa	67,832	18.09
4	Pensiunan	1,683	0.45
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8,265	2.20
6	TNI	537	0.14
7	POLRI	775	0.21
8	Perdagangan	130	0.03
9	Petani/Pekebun	80,954	21.59
10	Peternak	29	0.01
11	Nelayan/Perikanan	6,018	1.61
12	Industri	4	0.00
13	Konstruksi	8	0.00
14	Transportasi	26	0.01
15	Karyawan Swasta	4,892	1.30
16	Karyawan BUMN	522	0.14
17	Karyawan BUMD	102	0.03
18	Karyawan Honorer	5,332	1.42
19	Buruh Harian Lepas	2,734	0.73
20	Buruh Tani/Perkebunan	640	0.17
21	Buruh Nelayan/Perikanan	57	0.02
22	Buruh Peternakan	4	0.00
23	Pembantu Rumah Tangga	55	0.01
24	Tukang Cukur	2	0.00
25	Tukang Listrik	7	0.00
26	Tukang Batu	320	0.09
27	Tukang Kayu	454	0.12
28	Tukang Sol Sepatu	6	0.00
29	Tukang Las/Pandai Besi	30	0.01

30	Tukang Jahit	76	0.02
31	Tukang Gigi	2	0.00
32	Penata Rias	9	0.00
33	Penata Busana	1	0.00
34	Penata Rambut	2	0.00
35	Mekanik	62	0.02
36	Seniman	6	0.00
37	Tabib	1	0.00
38	Paraji	0	0.00
39	Perancang Busana	1	0.00
40	Penterjemah	0	0.00
41	Imam Masjid	20	0.01
42	Pendeta	260	0.07
43	Pastor	1	0.00
44	Wartawan	21	0.01
45	Ustadz/Mubaligh	11	0.00
46	Juru Masak	2	0.00
47	Promotor Acara	0	0.00
48	Anggota DPR RI	0	0.00
49	Anggota DPD RI	0	0.00
50	Anggota BPK	2	0.00
51	Presiden	0	0.00
52	Wakil Presiden	0	0.00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0.00
54	Anggota Kabinet kementerian	0	0.00
55	Duta Besar	0	0.00
56	Gubernur	0	0.00
57	Wakil Gubenur	1	0.00
58	Bupati	1	0.00
59	Wakil Bupati	1	0.00
60	Walikota	0	0.00
61	Wakil Walikota	0	0.00
62	Anggota DPRD PROP	2	0.00
63	DPRD Kab/Kota	11	0.00
64	Dosen	232	0.06
65	Guru	1,068	0.28
66	Pilot	0	0.00
67	Pengacara	21	0.01
68	Notaris	9	0.00
69	Arsitek	2	0.00
70	Akuntan	1	0.00
71	Konsultan	8	0.00
72	Dokter	138	0.04
73	Bidan	209	0.06
74	Perawat	322	0.09
75	Apoteker	27	0.01
76	Psikiater/Psikolog	2	0.00
77	Penyiar Televisi	0	0.00
78	Penyiar Radio	1	0.00
79	Pelaut	89	0.02
80	Peneliti	1	0.00

81	Sopir	1408	0.38
82	Pialang	0	0.00
83	Paranormal	0	0.00
84	Pedagang	386	0.10
85	Perangkat Desa	125	0.03
86	Kepala Desa	49	0.01
87	Biarawan/Biarawati	1	0.00
88	Wiraswasta	30,994	8.27
89	Anggota Lemb Tinggi Lainnya	17	0.00
90	Artis	0	0.00
91	Atlit	0	0.00
92	Cheff	0	0.00
93	Manajer	0	0.00
94	Tenaga Tata Usaha	2	0.00
95	Operator	0	0.00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0.00
97	Teknisi	2	0.00
98	Asisten Ahli	0	0.00
99	Pekerjaan Lainnya	112	0.03
	Jumlah	374.896	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai Tahun 2024

1.3. ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 7. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A;
 10. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A;
 14. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
 18. Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Tipe B;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
 20. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B;
 21. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
 22. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Tipe A;
 23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Tipe A;
 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 2. Badan riset dan Inovasi daerah merupakan Badan Tipe A;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
 4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe A;

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe A;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
 11. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 12. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
 13. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A ;
 14. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
 15. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
 16. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
 17. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
 18. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
 19. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
 20. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A;
 21. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
 22. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
 23. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;
 24. Kecamatan Toili jaya merupakan Kecamatan Tipe A.

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai didukung oleh Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai sebanyak 6.165 PNS dan 2.603 PPPK yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kondisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024

GOLONGAN	WANITA	PRIA	JUMLAH
PNS			
I/a		2	2
I/b	1	2	3
I/c		9	9
I/d	1	6	7
Total	2	19	21
II/a	4	24	28
II/b	26	55	81
II/c	104	137	241
II/d	148	191	339
Total	282	407	689
III/a	413	238	651
III/b	606	361	967
III/c	609	366	975
III/d	841	557	1398
Total	2469	1522	3991
IV/a	402	289	691
IV/b	347	323	670
IV/c	47	52	99
IV/d	2	2	4
Total	798	666	1464
PNS TOTAL	3551	2614	6165
PPPK			
IX	1395	474	1869
V		10	10
VII	530	99	629
X	79	26	105
PPPK TOTAL	2004	599	2603
PNS DAN PPPK TOTAL	5.555	3.223	8.778

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2024

Tabel 1.7
Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

JENIS ASN	PENDIDIKAN	WANITA	PRIA	JUMLAH TOTAL
PNS	S-3/Doktor	1	2	3
	S-2	137	142	279
	D IV/S-1	2425	1690	4115
	DIPLOMA	539	189	728
	SLTA	383	493	876
	SLTA KEGURUAN		1	1

	SLTA KEJURUAN	64	71	135
	SLTP	2	20	22
	SEKOLAH DASAR		6	6
PNS TOTAL		3551	2614	6165
PPPK	S-2	79	26	105
	D IV/ S-1	1395	474	1869
	DIPLOMA	530	99	629
	SLTA		10	10
PPPK Total		2004	609	2613
Jumlah Total PNS dan PPPK		5555	3223	8778

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2024

Tabel 1.8
Kondisi ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

JENIS ASN	JABATAN	WANITA	PRIA	JUMLAH
PNS	Jabatan Fungsional	2517	1313	3830
	Jabatan Pelaksana	734	831	1565
	Jabatan Struktural	300	470	770
PNS TOTAL		3551	2614	6165
PPPK	Jabatan Fungsional	1834	548	2382
	Jabatan Pelaksana	170	61	231
PPPK TOTAL		2004	609	2613
JUMLAH TOTAL		5555	3223	8778

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2024

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) kedepannya. Adapun isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Kemiskinan dan Pengangguran
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah
4. Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau
5. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah
6. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital
7. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

1.5. LANDASAN HUKUM

Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Banggai tahun 2024 di susun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Nomor 143).

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang, gambaran umum daerah, organisasi, isu-isu strategis, landasan hukum, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja di masa mendatang.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta akuntabel (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

***"TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL"***

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kabupaten Banggai, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Banggai Maju, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi, budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di ukur dari kualitas sumber daya manusianya, di katakan makin maju apabila sumber daya manusianya Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah di ukur berdasarkan tingkat pendapatan rata – rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industri dan sektor jasa.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan profesional, ekonomi

daerah yang berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan memberi dampak bagi berdayanya fungsi – fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

Makna Visi Banggai Maju ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB/Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, pendapatan perkapita serta inflasi stabil dan terkendali.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan bertambahnya Desa yang berstatus maju dan mandiri.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB meningkat.
6. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Banggai Mandiri, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau dengan kata lain berkurangnya tingkat ketergantungan fiscal terhadap dana transfer kedaerah oleh pemerintah pusat, melalui kemandirian keuangan daerah.

Makna Visi Banggai Mandiri ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan melalui optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah meningkat signifikan, dengan mengoptimalkan Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa.

Banggai Sejahtera, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Daerah yang sejahtera juga di tunjukan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah / wilayah, baik perkotaan dan pedesaan serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan – kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Makna Visi Banggai sejahtera ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender meningkat.
2. Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok.
3. Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Berbasis Kearifan Lokal, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem

kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut :

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.
4. Terpeliharanya Cagar Budaya Daerah.
5. Harmonisasi dan moderasi kehidupan umat beragama di daerah.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah di uraikan di atas, maka target makro daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026

Indikator	Base Line Data (2020*)	Target Akhir RPJMD
Banggai Maju		
1. Pertumbuhan Ekonomi	2,54%	5,99%
2. Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	75,76	83,09
3. Tingkat Inflasi	0,83%	2,00%
4. Prosentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	NA	80,00%
5. Presentase Desa Maju berdasarkan IDM	26,12%	75,00%
Banggai Mandiri		
6. Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi	Tinggi
7. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	13,56%
Banggai Sejahtera		
8. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,39%	5,00%
9. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	2,42%	2,18%
10. Gini Rasio	0,308	0,277
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,22	73,57
12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	46,9
Kearifan Lokal		
13. Indeks Kerukunan Beragama	NA	80
14. Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	56,31

Keseluruhan target Visi sebagaimana di atas, hanya dapat di capai dan di laksanakan dengan di dukung oleh pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntable melalui pelaksanaan reformasi Birokrasi, sehingganya ukuran keberhasilan perwujudan Reformasi Birokrasi akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi RPJMD.

Guna membangkitkan semangat dan pemahaman Bersama dari seluruh stakeholders pembangunan daerah Kabupaten Banggai, Visi kemudian di terjemahkan kedalam motto, slogan ataupun *Tag Line* pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-2026 yaitu **BANGGAI LEBIH BAIK** atau dalam Bahasa Saluan, Balantak dan Banggai sebagai perwujudan dari kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di terjemahkan menjadi **BANGGAI MAIMA, BANGGAI PORE, ATAU BANGGAI MONONDOK.**

Banggai Lebih Baik dapat di terjemahkan sebagai kondisi Kabupaten Banggai yang lebih baik dari sebelumnya yang menunjukkan kondisi lebih Maju, lebih Mandiri dan lebih sejahtera, yang dapat di gambarkan antara lain dalam perwujudan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia lebih baik
2. Ekonomi Kerakyatan lebih baik
3. Infrastruktur lebih baik
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lebih Baik
5. Pariwisata dan Budaya Lebih baik
6. Birokrasi Lebih baik

Sebagai landasan kerja dan landasan Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam mencapai Banggai Lebih Baik, Moto yang di gunakan adalah CERDAS yaitu mampu membaca dan memahami apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat, SANTUN yaitu siap dan ikhlas menerima, menyerap dan menindaklanjuti seluruh kritik, masukan dan aspirasi masyarakat serta RELIGIUS yaitu menggunakan pendekatan Aqidah, Syariah dan Ahlak dalam melakukan setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



Adapun penjabaran unsur Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 kedalam Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Katerkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026

Pokok Visi	Misi Terkait	
Banggai Maju	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Pokok – pokok Visi dan Pelaksanaan misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 lainnya akan terlaksana dengan baik jika di tunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (3) Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta	

	Penanggulangan Bencana	melalui pelaksanaan Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Banggai Mandiri	Dilaksanakan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel.	
Banggai Sejahtera	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Produktif Dan Sejahtera.	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Dilaksanakan dalam Misi ke (3) Mengembangkan sektor Kemaritiman berbasis potensi wilayah	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Berbasis Kearifan Lokal	Dilaksanakan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah 2021 – 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera
Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru 2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak, dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas 2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pariwisata Daerah 2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis

		Budaya dan Sejarah 2. Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Banggai, maka di rumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembagunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2021 - 2026.

2.2.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026, maka di tetapkan strategi umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka responsif dan adaptif, agar mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Di harapkan proses reformasi birokrasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata.

2. Membangun dan mengembangkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, serta pemangku kepentingan lainnya, agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini di dasari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya finansial di satu sisi, sedangkan disisi lain terdapat potensi sumberdaya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan.
3. Pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan, melalui implementasi keikutsertaan Kabupaten Banggai dalam inisiatif global keterbukaan pemerintah daerah dalam Open Government Partnership (OGP) Local , agar nantinya masyarakat bisa mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.
4. Mengembangkan kemandirian desa agar terjadi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan, utamanya pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan.
5. Menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.
7. Mengedepankan pendekatan Tematik – Holistik, Integratif dan Spasial dalam perumusan program pembangunan daerah serta Money Follow Program sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil melalui Performance Based Budgeting

2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabrl di bawah ini :

Tabel 2.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah 2021-2026

VISI
Terwujudnya Kabupaten Banggai Yang Maju, Mandiri,
dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA			
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar menuju Banggai Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun dan peningkatan wajib belajar 12 tahun. 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 4. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting. 5. Penerapan Pendidikan budaya dan budi pekerti/karakter di sekolah. 6. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 7. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan Mutu layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan

			<p>Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan layanan Rujukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan capaian SPM Kesehatan melalui Digitalisasi Pelayanan. 3. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil. 4. Peningkatan sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat. 7. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
		<p>Banggai produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik. 5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company). 6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.

		<p>Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaktif. 2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "Tumis Ikan Teri" (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi). 3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. 4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS. 6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
		<p>Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan

			<p>perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).</p>
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	<p>1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif.</p> <p>2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS).</p> <p>3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga.</p> <p>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.</p>
Misi II : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi A			
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan	Meningkatnya Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM Serta Pertumbuhan	Fasilitas Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster

Teknologi Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	Wirausaha Baru		<p>sesuai sentra komoditas dan wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan. 3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM. 4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif. 5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.
		Mempekuat Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 3. Peningkatan nilai eksport daerah 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Pembangunan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui

		Masyarakat dalam Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Perdesaan melalui BUMDes	<p>Kerjasama antar desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes. 4. Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan. 5. Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (program satu juta satu pekarangan)
Misi III : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana			
Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten. 2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM.
		Meningkatkan kualitas layanan	1. Penyediaan Infrastruktur

		<p>sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.</p>	<p>persampahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle.
		<p>Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana. 4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman. 5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. 6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo.

		Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
		Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan IMB dan regulasi bangunan gedung. 2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.
		Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital. 3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (Digital society).
	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam

			<p>penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan system peringatan dini bencana. 4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana. 5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana/Desa Tangguh lawan covid 19. 6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan			
<p>Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.</p>	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). 3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Penyediaan akses terhadap informasi

			<p>pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.</p>
		<p>Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai swasembada daging</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak. 2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. 4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. 5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
		<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). 3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		<p>Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan

<p>konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.</p>	<p>ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak. 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan.
<p>Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak & gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak & gas. 4. Re-negosiasi antara pemerintah dan

			<p>perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai.</p> <p>5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas.</p>
		<p>Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta. 4. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.

	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle.
		Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032 dan rencana rincinya. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
Misi V : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan			
Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata Pariwisata untuk Mendukung	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi ,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas. 2. Pengembangan

	Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	industry, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah.	<p>pemasaran pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata.
Peningkatan Kebudayaan Daerah serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.
		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. 3. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
Misi VI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel			
Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH				
2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur

masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	konektivitas pada lokasi prioritas
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan
<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan investasi sektor pertambangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan investasi sektor pertambangan daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Reformasi Birokrasi Kelas Dunia

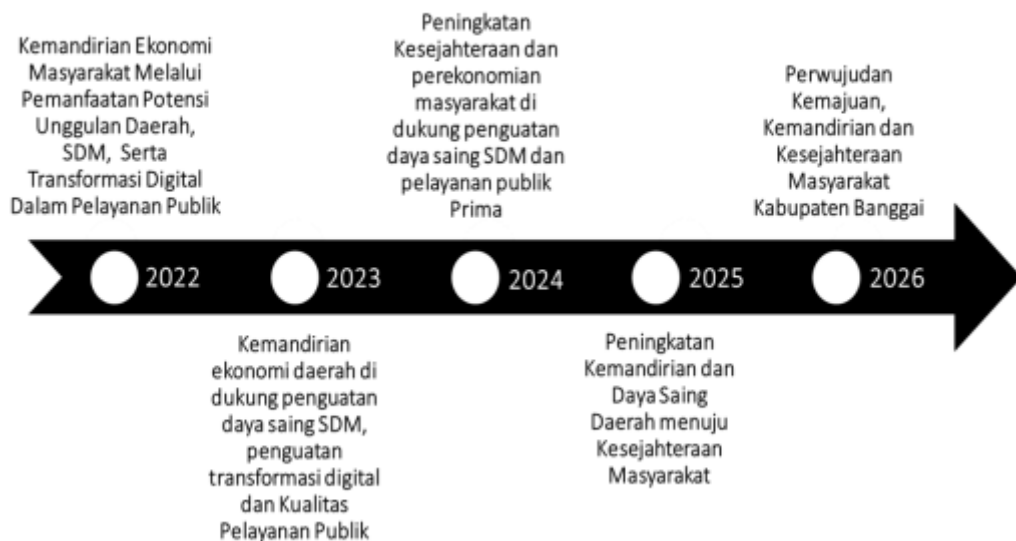
Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan

tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah. Keselarasan Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.

Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banggai secara indikatif dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah. BANGGAI LEBIH BAIK akan di wujudkan melalui (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

Gambar 2.2

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



1. Pembangunan Manusias Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Cerdas



BANGGAI CERDAS

Banggai Cerdas di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kabupaten Banggai, agar tercipta peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan siap mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ruang lingkup Banggai Cerdas selain PAUD, pendidikan dasar, juga mencakup fasilitasi terhadap pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

c. Banggai Sejahtera



Banggai Sejahtera di maksudkan sebagai upaya pemerintah kabupaten banggai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

b. Banggai Sehat



Banggai Sehat di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Fokus Banggai Sehat di arahkan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, penanggulangan stunting terintegrasi, PHBS, jaminan kesehatan dan kualitas layanan rumah sakit rujukan

d. Banggai Produktif



Banggai Produktif Di Maksudkan Sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten Untuk Meningkatkan

upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi multi sektor. Penanggulangan kemiskinan di lakukan melalui inovasi "Tumis Ikan Teri" = tuntaskan kemiskinan melalui kegiatan terintegrasi

Produktivitas Tenaga Kerja, Penyiapan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Kebutuhan Industri. Serta Penyiapan Wirausaha Mandiri, Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Kegiatan Yang Di Lakukan Dalam Bentuk Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan Dan Pembimbingan

e. Banggai Youthpreneur



Banggai Youthpreneur Merupakan Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Menggali Dan Mengembangkan Potensi Dan Kemandirian Pemuda Untuk Berwirausaha. Kegiatan Ini Di Lakukan Dalam Bentuk Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan Maupun Bantuan Modal Usaha.

2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Berdaya



Banggai Berdaya di maksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten

Banggai untuk memperkuat ekonomi produktif/ kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi Dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan/ Penguatan di maksud di lakukan melalui pelatihan, pembinaan, pembimbingan, pendampingan serta pemberian bantuan modal

b. Banggai Desapreneur



Banggai Desapreneur merupakan upaya pemerintah Kabupaten

Banggai untuk mendorong kemandirian ekonomi perdesaan, melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dan revitalisasi peran BUMDesa serta Inovasi Desa. Banggai Desapreneur akan di dukung oleh program satu juta satu pekarangan dan satu BUMDes Rp.500 juta

c. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Akses



Banggai Akses merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur

perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan (Banggai Terang). Banggai Akses juga di harapkan dapat mengatasi kesenjangan/ketimpangan wilayah.

d. Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Swasembada Pangan



Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Masyarakat

e. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan

Banggai Investment



Banggai Invesment merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah melalui iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha, serta investasi pengelolaan keunggulan daerah melalui revitalisasi BUMD dan kerjasama usaha dengan perusahaan multinasional/ internasional

f. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.

Prioritas daerah ini di arahkan untuk mewujudkan ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Selain itu di maksudkan sebagai kemampuan daerah untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, melalui pemanfaatan ruang sesuai arahan tata ruang

g. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Cultural Heritage



Banggai Cultural Heritage merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menjadikan Banggai sebagai pusat kebudayaan dan sentra promosi budaya, sekaligus sebagai atraksi budaya dalam destinasi pariwisata. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

h. Penguatan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Amanah



Banggai Amanah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Banggai Amanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan (jangka menengah lima tahun) dan sasaran strategis (jangka pendek tahunan) organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		4. Angka Kemiskinan
		5. Gini Rasio
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB

3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB
		2. Indeks Ketahanan Pangan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Inovasi Daerah
		3. Nilai SAKIP

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banggai ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. Transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome*.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Adapun wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023 berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis pada RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,63
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,1
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,26%
		4. Angka Kemiskinan	5,85%
		5. Gini Rasio	0,287
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	4,7%
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	68,73%
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik	75,00%
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah

	Penigkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	3. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB	34,61%
		4. Indeks Ketahanan Pangan	88,67
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,018
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kraetif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,74%
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,21
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	4. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		5. Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif/Terinovatif
		6. Nilai SAKIP	AA

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai melaksanakan program-program dengan pagu anggarannya sesuai dengan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 3.363.546.137.928,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja di lakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya di capai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja di lakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang di harapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Banggai Tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran di gunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91% - 100%	Sangat Baik (SB)
2	76% - 90%	Baik (B)
3	66% - 75%	Cukup (C)
4	51% - 65%	Kurang (K)
5	0 - 50%	Sangat Kurang (SK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kerja Kabupaten Banggai dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas per sasaran di gunakan rumus sebagai berikut :

1. Efisiensi = % Rata-rata capaian kinerja - % Realisasi anggaran
2. Efektivitas = (% Rata-rata capaian kinerja / % Realisasi anggaran) x 100%

Efisiensi dan efektivitas baru dihitung apabila capaian kinerja $\geq 100\%$ Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisiensi dan efektivitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih rata-rata capaian kinerja dengan % realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisiensi anggaran.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 7 (Tujuh) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran, dengan 17 (tujuh belas) Indikator sasaran. **Misi I** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, **Misi II** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi III** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi IV** terdapat 1 tujuan, 2

sasaran dan 3 indikator kinerja, **Misi V** terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dan **Misi VI** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,63	72,86	100,32	Sangat Baik
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,1	76,07*	165,01	Sangat Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,26%	3,11	62,39	Kurang
4	Angka Kemiskinan	5,85%	6,56	78,35	Baik
5	Gini Rasio	0,287	0,316	89,9	Baik
Sasaran 2					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru					
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	4,7%	5,19%	110,43	Sangat Baik
Sasaran 3					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan					
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	68,73%	51,89	75,50	Cukup
Sasaran 4					
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas					
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	75,00%	69,12	92,16	Sangat Baik
Sasaran 5					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Rendah (0,37)	92,5	Sangat Baik
Sasaran 6					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	34,61%	40,19	116,12	Sangat Baik
2	Indeks Ketahanan Pangan	88,67	85,14	96,02	Sangat Baik
Sasaran 7					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,018	81,16	98,95	Sangat Baik
Sasaran 8					
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah					
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,74%	0,34%	12,41	Sangat Kurang

Sasaran 9					
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,21	27,17	52,04	Kurang
Sasaran 10					
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100,00	Sangat Baik
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif/Terinovatif	Inovatif	85,44	Baik
3	Nilai SAKIP	AA	BB	83,69	Baik

Keterangan :

*: Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023

Tabel 3.3
Rekap Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Misi 1	1	1	5	SB=2, B=2, C=0, K=1, SK=0
2	Misi 2	1	2	2	SB=1, B=0, C=1, K=0, SK=0
3	Misi 3	1	2	2	SB=2, B=0, C=0, K=0, SK=0
4	Misi 4	1	2	3	SB=3, B=0, C=0, K=0, SK=0
5	Misi 5	2	2	2	SB=0, B=0, C=0, K=1, SK=1
6	Misi 6	1	1	3	SB=1, B=2, C=0, K=0, SK=0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 12 target:

Sehingga hasil pengukuran kinerja tersebut dari 17 indikator kinerja utama (IKU) memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 88,90% dengan kriteria Baik.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,16	72,19	100,70	72,63	72,86	100,32	73,57	99,03
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	45,7	76,07	166,46	46,1	76,07*	165,01	46,9	162,2
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30	3,12	64,35	2,26	3,11	62,39	2,18	57,34
4 Angka Kemiskinan	%	6,28	6,94	89,49	5,85	6,56	78,35	5,00	52,44
5 Gini Rasio	Point	0,292	0,283	103,08	0,287	0,316	89,9	0,277	85,92
Rata-rata capaian kinerja				104,82			99,19		91,39

*Sumber : * Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023, BPS Kab.Banggai Tahun 2024*

Dari 5 indikator pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” diperoleh capaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 100,32%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercapai 165,01%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercapai 62,39%, Angka Kemiskinan tercapai 78,35%, dan Gini Rasio tercapai 89,9%, sehingga rata-rata capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” tercapai 99,19% kategori Sangat Baik, dan target akhir RPJMD rata-rata tercapai 91,39%.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

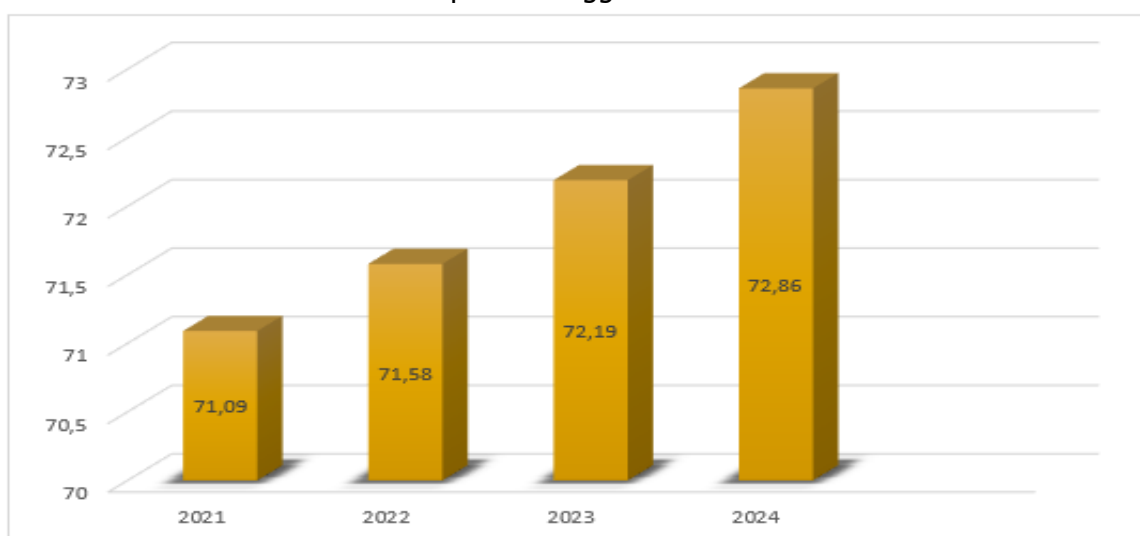
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu :

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH)

2. Dimensi pengetahuan (knowledge), diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standard hidup layak (decent standard of living), digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 72,63 dan terealisasi sebesar 72,86 atau tumbuh sebesar 0,67 point dibandingkan dengan IPM tahun 2023 sebesar 72,19 dengan capaian kinerja sebesar 100,70%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai 99,03%.

Grafik 3.1
IPM Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024

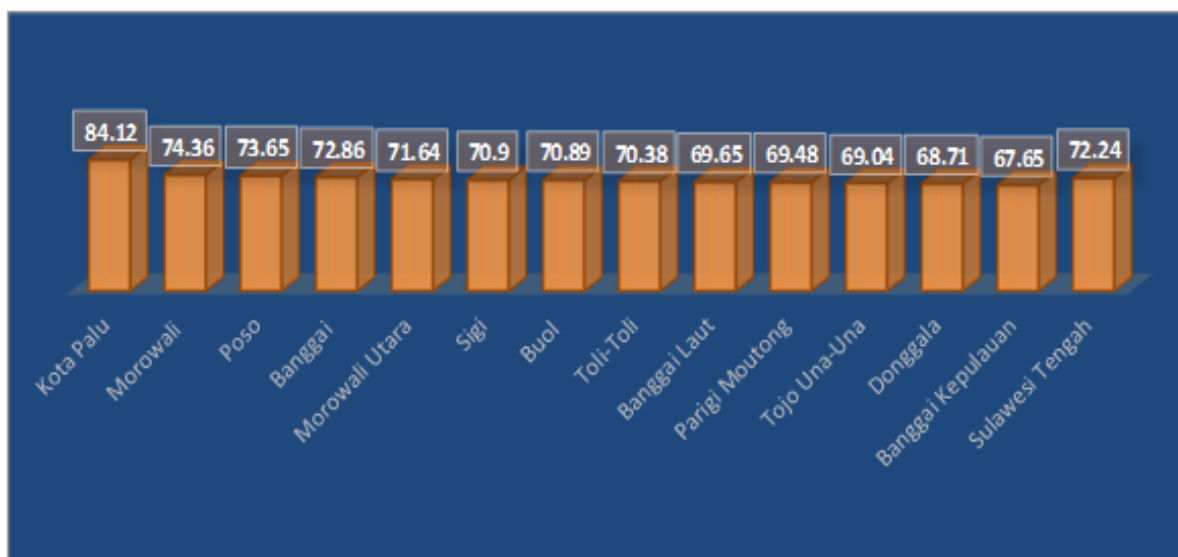


Sumber : BPS Kab. Banggai, 2024

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan IPM yang stabil dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2022 terjadi kenaikan 0,49 point dari tahun 2021, tahun 2023 terjadi kenaikan 0,61 point dari tahun 2022, dan di tahun 2024 terjadi kenaikan 0,67 point dari tahun 2023. Meskipun angka kenaikan tahunan tidak terlalu besar, peningkatan yang terus menerus dan stabil menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Banggai dilakukan dengan pendekatan jangka panjang yang memfokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia berkelanjutan.

Grafik 3.2

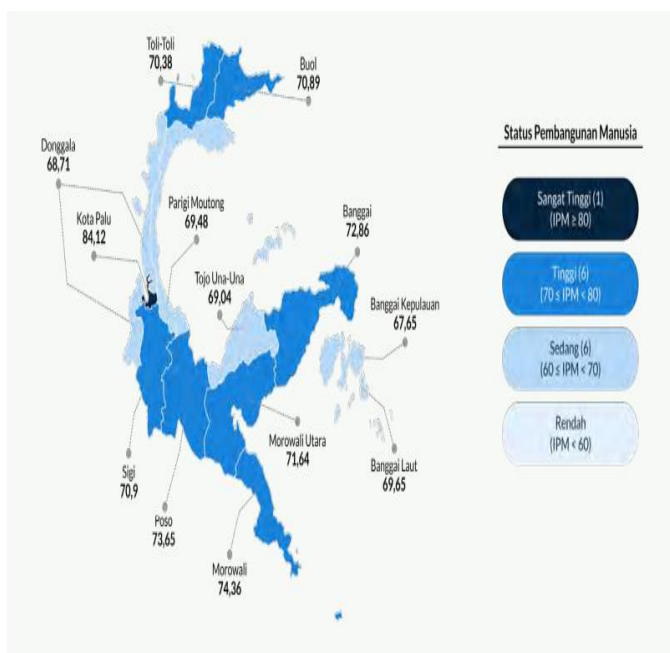
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Tengah (2024)

Grafik diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Dengan IPM 72.86, Banggai berada di posisi yang cukup baik yaitu ke empat dan masuk dalam kategori

Gambar 3.1
IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



IPM tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan Kota Palu dengan status IPM sangat tinggi dan beberapa kabupaten lain dengan industri besar seperti Morowali, Poso dan Morowali Utara (status IPM tinggi). Namun, masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan IPM di kabupaten ini, terutama dengan memperkuat sektor-sektor yang dapat mendorong pendapatan dan akses ke layanan dasar. Jika di bandingkan dengan IPM Sulawesi

Tengah sebesar 72,24, IPM Kabupaten Banggai masih lebih tinggi sebesar 0,62 point, perbedaannya tidak terlalu signifikan, yang berarti tantangan pembangunan

manusia di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki tantangan yang sama, namun Kabupaten Banggai dapat dianggap sedikit lebih maju dalam beberapa indikator.

Meskipun mengalami perkembangan yang baik dari tahun ketahun, angka IPM Kabupaten Banggai masih tertinggal 2,16 point dibanding dengan capaian IPM Nasional tahun 2024 yang mencapai 75,02.



Sedangkan Untuk meningkatkan IPM Kabupaten Banggai agar lebih mendekati atau bahkan melampaui IPM Nasional, perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih merata.

IPM Kabupaten Banggai terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil Per kapita.

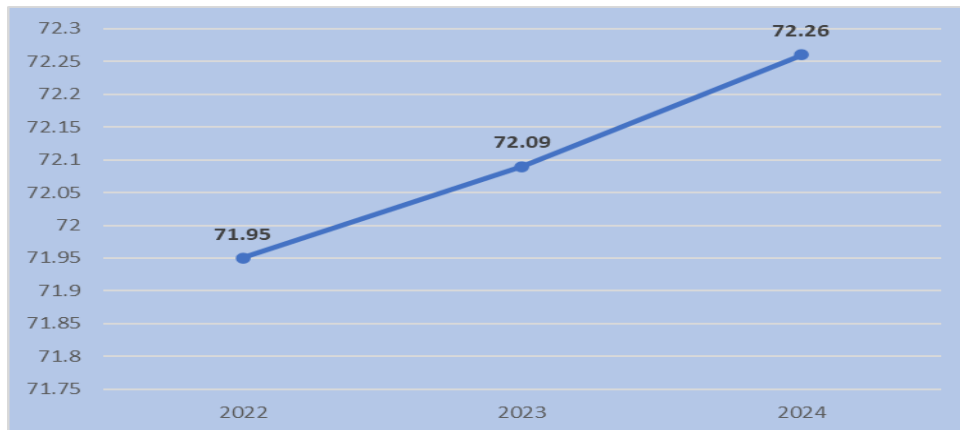
Berikut analisis capaian dari 4 (empat) komponen indikator pembentuk IPM Kabupaten Banggai tahun 2024.

Umur Harapan Hidup (UHH)

Dimensi umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH). UHH Kabupaten Banggai tercatat meningkat dari 71,95 tahun pada tahun 2022 menjadi 72,66 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 72,26 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya.

Capaian UHH Kabupaten Banggai pada tahun 2024 adalah 72,26 tahun menunjukkan peningkatan sebesar 0,17 tahun dibanding tahun 2023 yang mencapai 72,09 tahun.

Grafik 3.3
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai
Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah angka kematian ibu. Yang mana angka kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nafis. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai tahun 2024 turun menjadi 135/100.000 KH dari target 146/100.000 KH. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai berfluktuasi dalam kurun 2006-2024 tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Banggai Tahun 2006-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai, 2024

Jika dibandingkan dengan penetapan standar Nasional untuk Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 adalah 183/100.000 KH juga masih jauh dibawah target nasional atau capaian masih dikategorikan sangat baik.

Jumlah kematian ibu pada tahun 2024 adalah 9 (sembilan) orang dari jumlah kelahiran hidup 6.654. Penyebab kematian ibu terbanyak disebabkan karena Hipertensi berjumlah 4 (empat) orang, infeksi berjumlah 1 (satu) orang, dan penyebab kematian lainnya berjumlah 4 (empat) orang.

Tabel 3.5
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2024

Penyebab Kematian	Jumlah	%
Perdarahan	0	0
Hipertensi dalam Kehamilan	4	44
Infeksi	1	12
Lainnya	4	44
Jumlah	9	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banggai, 2024

Intervensi program dan kegiatan dalam rangka menurunkan AKI di Kabupaten Banggai melalui upaya Inovasi program posyandu prakonsepsi, yang menitikberatkan pada program layanan dasar atau standar pelayanan minimal yang salah satunya adalah pelayanan Kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Program penurunan AKI juga didukung dengan adanya Inovasi "Ambulance Dering" Dimana upaya penanganan rujukan untuk aksesibilitas layanan guna penanganan paripurna juga sudah mulai dilaksanakan.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banggai. AKB di Kabupaten Banggai mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana kondisi lima tahun berturut-turut mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2020 yaitu dari 9.4/10.000 KH menjadi 1.7/10.000 KH pada tahun 2024.

Sebagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi juga berfluktuasi dalam kurun waktu 2006-2024 seperti tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.5
 Angka Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)
 Kabupaten Banggai Tahun 2006-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai, 2024

Jika dibandingkan dengan penetapan standar nasional untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 adalah 16/10.000 KH juga masih sangat jauh dibawah target nasional atau capaian masih dikategorikan sangat baik.

Jumlah kematian bayi pada tahun 2024 adalah 12 (dua belas) orang. Penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan karena Asfiksia berjumlah 4 (empat) orang, BBLR berjumlah 2 (dua) orang, Kelainan Kongenital berjumlah 1 (satu) orang, Infeksi berjumlah 1 (satu) orang, dan penyebab kematian lainnya berjumlah 4 (empat) orang.

Tabel 3.6
 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2024

Penyebab Kematian	Jumlah	%
Asfiksia	4	18,6
BBLR	2	25
Kelainan Kongenital	1	18,6
Infeksi	2	6,3
Lain-lainnya	4	31,5
Jumlah	12	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banggai, 2024

Program penurunan AKB merupakan salah satu prioritas penting dalam upaya peningkatan status derajat Kesehatan Masyarakat melalui program 1000 hari pertama kehidupan dengan melibatkan gugus tugas yang terdiri dari lintas sektor turut serta berkontribusi langsung dalam upaya mengkoordinasikan penanggulangan kasus kematian ibu dan anak.

Dukungan program kegiatan penanggulangan AKB berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta program pelayanan Kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan pelayanan gizi Masyarakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu:

1. Mengoptimalkan pemerataan tenaga Kesehatan di Puskesmas
2. Pelatihan teknis kepada tenaga yang berkompetensi menolong persalinan
3. Melakukan Kerjasama dengan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pelayanan neonates dan bayi.
4. Memaksimalkan pelayanan PONEC dengan pertolongan di fasilitas Kesehatan.
5. Penguatan sistem rujukan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Dari sisi dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Grafik 3.6
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kab.Banggai tahun 2024

Angka HLS penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2024 sebesar 13,35 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13,35 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa Pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Adapun perkembangan HLS Kabupaten Banggai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terlihat bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, HLS Kabupaten Banggai naik dari 13,24 tahun menjadi 13,35 tahun yang berarti mengalami peningkatan HLS 0,11 tahun.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) penduduk mencapai 8,81 tahun yang berarti rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Banggai berusia 25 tahun keatas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang kelas 8 SMP atau putus sekolah pada kelas 9 SMP.

Adapun perkembangan angka RLS Kabupaten Banggai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 RLS Kabupaten Banggai hanya 0,18 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian pendidikan, namun gap antara harapan dan realisasi masih cukup besar. Peningkatan yang lebih tajam pada 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya program atau intervensi yang mulai memberikan dampak positif terhadap rata-rata lama pendidikan yang tercapai oleh penduduk. Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah cenderung stabil dengan sedikit peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin berharap agar pendidikan di negara atau wilayah ini semakin maju.

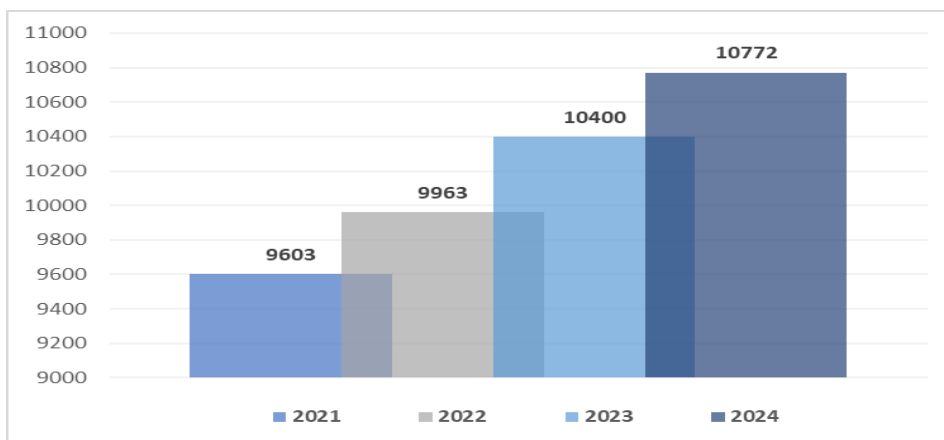
Namun jika dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun fasilitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui. Upaya ini dapat meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25

tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah. Peningkatan kualitas pendidikan (baik melalui peningkatan HLS maupun RLS) akan memperbaiki dua aspek penting dalam perhitungan IPM: pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, meskipun IPM Kabupaten Banggai sudah cukup baik, sektor pendidikan menjadi kunci untuk mendorongnya ke level yang lebih tinggi.

Pengeluaran Riil Per kapita disesuaikan

Dari sisi dimensi Standar Hidup Layak berdasarkan yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang naik dari Rp. 10.400 (Ribu/Orang/Tahun) di tahun 2023 menjadi Rp. 10.772 (Ribu /Orang/Tahun) di tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp. 372. Pengeluaran per kapita Rp 10.772, ini dapat memberi gambaran mengenai daya beli rata-rata masyarakat di Kabupaten Banggai, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Tengah Rp. 10.536 (Ribu/Orang/Tahun). Meskipun IPM Kabupaten Banggai sudah menunjukkan pencapaian positif, masalah pendapatan dan distribusi kekayaan perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih merata, dengan fokus pada peningkatan sektor ekonomi lokal dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Grafik 3.7
Perkembangan Pengeluaran Riil Per kapita Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2024 (Ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kab.Banggai Tahun 2024

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Dimensi Penyusunnya tahun 2024

Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	67,54	13,11	8,70	8.375	67,65
Banggai	72,26	13,35	8,81	10.772	72,86
Morowali	71,09	13,39	9,38	12.281	74,36
Poso	73,02	13,75	9,54	9.948	73,65
Donggala	70,74	12,62	8,00	9.117	68,71
Toli-Toli	71,31	13,17	8,91	8.918	70,38
Buol	71,30	13,18	9,20	9.051	70,89
Parigi Moutong	68,72	12,52	8,05	10.846	69,48
Tojo Una-Una	71,05	12,43	8,56	8.863	69,04
Sigi	71,33	13,13	9,04	9.254	70,90
Banggai Laut	71,04	13,04	8,65	8.776	69,65
Morowali Utara	72,35	12,44	9,13	10.032	71,64
Kota Palu	73,91	16,52	11,75	15.941	84,12
Sulawesi Tengah	70,84	13,34	9,04	10.536	72,24

Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2024

Faktor Keberhasilan atau meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Banggai diantaranya:

1. Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.

Tabel 3.8
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Sekolah (unit)	Guru (orang)	Murid (orang)
TK/RA	215	528	7.148
SD/MI	363	3.121	34.433
SMP/MTs	112	1.412	13.721
SMA/MA	34	828	10.856
SMK	25	432	4.912

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2024)

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah di Kabupaten Banggai untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 363 unit sekolah. Dengan jumlah desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai sebanyak 337 desa/ kelurahan, dapat diasumsikan bahwa rata-rata pada satu desa/ kelurahan memiliki minimal satu bangunan Sekolah Dasar. Dengan tersedianya Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal. Sementara itu, jumlah sekolah untuk jenjang SMP/ Sederajat sebanyak 112 unit, untuk jenjang SMA/ sederajat sebanyak 34 unit sekolah, dan untuk SMK sebanyak 25 unit sekolah. Secara umum, jumlah sekolah di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya jumlah sekolah ini diharapkan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah.

Secara umum, rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banggai cukup baik. Pada tahun ajaran 2023/2024, kapasitas mengajar setiap guru hanya sekitar 9-13 murid. Hal ini menunjukkan bahwa beban mengajar setiap guru tidak terlalu tinggi sehingga diharapkan terciptanya pemanfaatan guru yang lebih efisien.

2. Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

Tabel 3.9
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Jenis Faskes	Jumlah
Rumah Sakit	2 Unit Milik Pemda Banggai , 1 Unit Swasta
Rumah Sakit Bersalin	1 Unit
Poliklinik	10
Puskesmas Pembantu	98
Apotek	39
Puskesmas Rawat Inap	12
Puskesmas Non Rawat Inap	15

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (Banggai Dalam Angka 2025)

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Banggai sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2 unit yang berada di Kecamatan Luwuk dan di Kecamatan Pagimana serta 1 unit milik swasta (RS Claire Medica). Selain itu, ketersediaan puskesmas dan posyandu juga menjadi pendukung untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa/kelurahan. Di Kabupaten Banggai, jumlah puskesmas sebanyak 27 unit dengan di dalamnya terdapat 12 unit yang melayani rawat inap, dan 15 unit non rawat inap. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 98 unit yang tersebar diseluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Banggai. Dengan kecamatan sebanyak 24, hal ini menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas atau polindes. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 389 unit dan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 337, berarti setidaknya rata-rata terdapat minimal satu posyandu di masing-masing desa/kelurahan.

3. Kesejahteraan Masyarakat (Dari Sisi Konsumsi)

Dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan melalui makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Banggai sebanyak 2.131,79 kkal dan 66,70 gram protein per kapita per hari. Konsumsi ini telah memenuhi standar kecukupan yang ditetapkan pemerintah. Semakin baik kondisi perekonomian suatu rumah tangga, daya beli akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan baik dari sisi jumlah, mutu, maupun keragamannya akan semakin baik

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banggai:

1. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak perempuan dan daerah miskin.
3. Beberapa kasus kematian ibu tidak dapat dicegah (Un Avoidable) artinya ibu tidak seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi, dalam kondisi tahun 2024 adalah hipertensi pada kehamilan.

4. Kejadian infeksi pada kematian bayi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat.
5. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, masih kurang memadai.
6. Masih rendahnya perekonomian orang tua Peserta Didik yang tersebar di 24 Kecamatan

- Tabel 3.10
- Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga
- Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Jumlah Penduduk Pertenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk (Rasio Terhadap 100.000 Penduduk)
Dokter	105	2
Perawat	963	30,8
Bidan	884	28,3
Kesmas	243	8
Kesling	118	4
Tenaga Gizi	86	3
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	69	2
Keteknisian Medik	44	1
Kefarmasian	105	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024

Adapun Solusi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, Desa, Kelurahan, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan intervensi yang diperlukan.
2. Program Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
3. Intervensi ini mencakup penyediaan bantuan keuangan kepada lembaga non-formal, pendampingan psikososial, serta penyediaan akses ke pendidikan non-formal bagi anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal. Program Monitoring Penanganan Anak Putus Sekolah bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menangani kasus anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
4. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah peluncuran program "SI ADE" (Sistem Informasi Anak dan Dewasa Kembali Sekolah) yang bertujuan

menangani permasalahan anak putus sekolah. Dengan inovasi agar anak yang putus sekolah bisa kembali sekolah, dan dewasa yang tidak pernah sekolah bisa bersekolah, diharapkan rata-rata lama sekolah semakin meningkat.

5. Pemerintah Kabupaten Banggai, meluncurkan program Integrasi Layanan Primer (ILP) Puskesmas se-kabupaten Banggai untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah ini. Peluncuran program ILP oleh Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai merupakan upaya sistematis untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai layanan kesehatan primer di wilayah Kabupaten Banggai. Dimana fokus utama program tersebut untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup, mulai dari kesehatan janin, bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia (lansia), dengan adanya program ini, dapat semakin mempermudah akses layanan kesehatan, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pelosok.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indikator dari Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yaitu menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemberdayaan perempuan di suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi angka IDG, semakin baik pemberdayaan gender di daerah tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai pada tahun 2024 menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023, dikarenakan BPS masih belum merilis data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 sehingga berdasarkan IDG tahun 2023 di peroleh realisasi sebesar 76,07. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 46,1 dengan capaian kinerja sebesar 165,01 persen dengan kategori sangat baik, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi IDG tahun 2022 sebesar 74,21, realisasi tahun 2024 lebih

tinggi 1,86 point, dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 46,9 dan tercapai 162,2 persen.

Tabel 3.11
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Ket
1	Perempuan di bidang pemerintahan	5.555 Orang	Total ASN 8.778 Orang
2	Perempuan di bidang politik	12 Orang	Total Anggota DPR 35 Orang

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banggai, Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai 2024

Kehadiran perempuan di rana politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitive pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Sehingga berdasarkan tabel diatas Keterwakilan kaum Perempuan dalam kancah perpolitikan di Kabupaten Banggai masih terbilang kecil. Hal ini dapat dilihat dari partisipasinya dalam kursi DPRD Kabupaten Banggai. Dari 35 kursi yang tersedia, tercatat 12 kursi diisi oleh perempuan atau hanya sebesar 34,29 persen. Sedangkan untuk keterlibatan perempuan di bidang pemerintahan di tahun 2024 berjumlah 5.555 orang dari jumlah ASN Kabupaten Banggai 8.778 orang atau 63,28% melebihi dari setengah jumlah ASN di Kabupaten Banggai.

Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

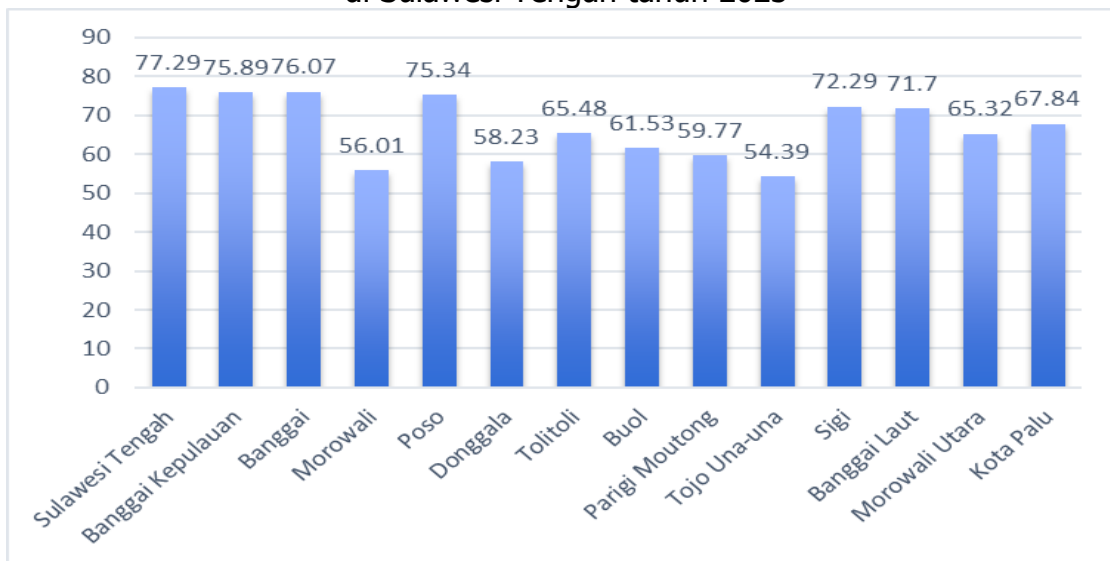
Grafik 3.8
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Secara keseluruhan, bahwa IDG Kabupaten Banggai menunjukkan tren peningkatan IDG dari tahun 2019 ke 2023 yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pemberdayaan gender di Kabupaten Banggai kecuali pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 yang mencerminkan adanya kebijakan atau program yang lebih efektif dalam memberdayakan perempuan atau mengatasi isu ketidaksetaraan gender. Ini bisa menjadi hasil dari upaya-upaya intensif dari pemerintah daerah atau organisasi terkait yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Meskipun ada tantangan yang dapat memengaruhi indikator ini, hasil positif di tahun 2023 menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut sudah mulai memberikan dampak yang nyata.

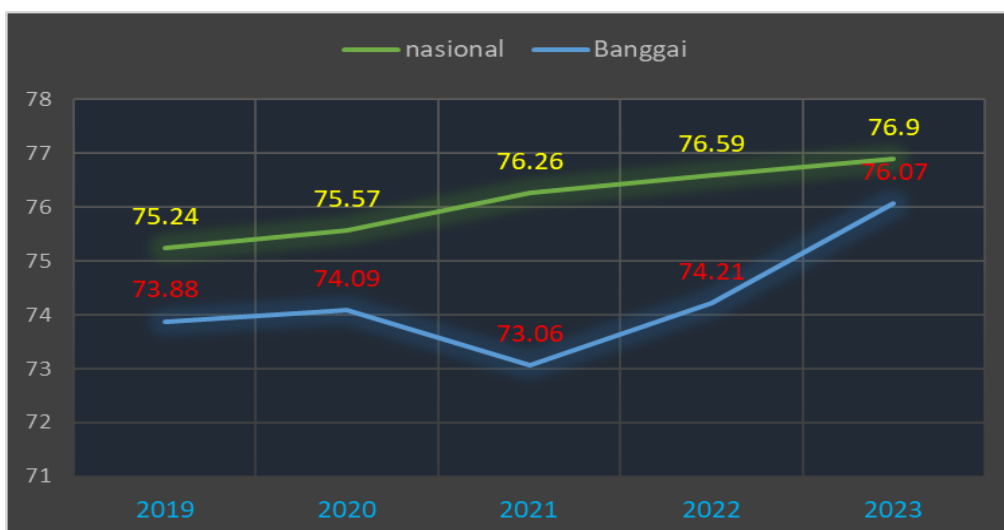
Grafik 3.9
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2023



Sumber : BPS Kab.Banggai (tahun 2024)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bila dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki IDG 76.07 berada di posisi kedua tertinggi setelah provinsi Sulawesi Tengah yaitu 77.29. Ini menandakan bahwa pemberdayaan gender di Banggai cukup baik, dengan tingkat pemberdayaan yang hampir setara dengan provinsi, menunjukkan bahwa daerah ini telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Grafik 3.10
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik (tahun 2024)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara umum, baik IDG Nasional maupun IDG Banggai menunjukkan tren positif, dengan IDG Nasional yang lebih konsisten meningkat, sedangkan IDG Banggai menunjukkan peningkatan yang lebih fluktuatif. IDG Nasional cenderung stabil dan mengalami peningkatan yang lebih konsisten setiap tahunnya. Tidak ada penurunan yang signifikan, dan setiap tahun mengalami peningkatan meskipun kecil. IDG Nasional menunjukkan kenaikan konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, IDG Nasional adalah 75.24 dan meningkat secara perlahan hingga mencapai 76.90 pada tahun 2023. Ini menunjukkan perbaikan yang stabil meskipun relatif lambat, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0.33 poin per tahun. Sedangkan IDG Kabupaten Banggai menunjukkan fluktuasi yang lebih nyata. Setelah mengalami peningkatan pada 2020, terjadi penurunan tajam pada tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 dan 2023. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan atau tantangan lokal yang lebih signifikan dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2019, IDG Banggai berada di 73.88, kemudian mengalami kenaikan kecil pada tahun 2020 menjadi 74.09. Namun, pada tahun 2021, IDG Banggai menurun menjadi 73.06, sebelum akhirnya naik tajam pada tahun 2022 menjadi 74.21 dan mencapai 76.07 pada tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023, dengan kenaikan 1.86 poin dalam satu tahun hampir setara dengan IDG Nasional.

Fluktuasi di Kabupaten Banggai menandakan adanya tantangan atau perubahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, namun juga menunjukkan bahwa telah mampu melakukan perbaikan yang cepat, terutama pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program yang lebih efektif telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dan telah menunjukkan hasil yang positif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Banggai diantaranya:

1. Keterlibatan lintas sektor berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait khususnya dalam meningkatkan capaian IDG
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG
3. Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

4. Melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan.
5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.
6. Melaksanakan kegiatan penyediaan layanan pengaduan bagi Perempuan korban kekerasan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,11% dari target 2,26% dengan capaian kinerja sebesar 62,39%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 turun sebesar 0,01 point. Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai tahun 2024 juga belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 2,18%, dimana capaian realisasinya baru sebesar 57,34%.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk usia angkatan kerja Tahun 2022-2024 di Kabupaten Banggai, yaitu :

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Kabupaten Banggai
Tahun 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penduduk Usia Kerja (PUK)	295.872	281.531	285.369
Angkatan Kerja	217.399	201.863	204.604
Bekerja	210.675	195.564	198.293
Pengangguran	6.724	6.299	6.365
Bukan Angkatan Kerja	78.473	79.668	80.765
	Persen	Persen	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,48	71,70	71,70
Laki-Laki	88,32	85,72	86,46
Perempuan	58,39	57,17	56,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2024

Pengertian penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 285,4 ribu orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 204,6 ribu orang (71,70 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 198,3 ribu orang penduduk yang bekerja dan 6,4 ribu orang pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 71,70 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 86,46 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,41 persen.

TPAK Agustus 2024, tidak mengalami perubahan dibandingkan Agustus 2023, dan penurunan 1,78 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki mengalami kenaikan dan TPAK perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023. Selama tiga tahun terakhir, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan.

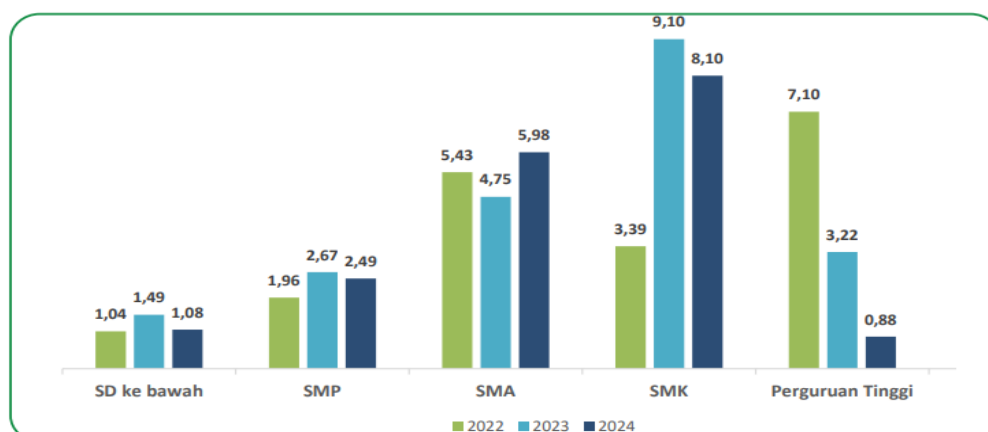
Tabel 3.13
Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024

Karakteristik Pengangguran	2022	2023	2024	Perubahan tahun 2022-2023	Perubahan tahun 2023-2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,09	3,12	3,11	0,03	-0,01
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,18	3,09	3,64	-0,09	0,55
- Perempuan	2,96	3,16	2,27	0,2	-0,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,11 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,01 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Jika dibandingkan tahun 2022, TPT tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,64 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,27 persen. TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen poin dibandingkan Agustus 2023, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2022, TPT laki-laki mengalami kenaikan dan TPT perempuan mengalami penurunan.

Grafik 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022–Agustus 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2024

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola cukup bervariasi baik dengan tahun 2022 maupun dengan tahun 2023. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,10 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,08 persen. Pada tahun 2024, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan TPT penduduk dengan pendidikan SMA mengalami kenaikan. Sementara kategori pendidikan lainnya mengalami penurunan. Kenaikan TPT pada kategori pendidikan SMA sebesar 1,23 persen poin dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, penurunan TPT paling tinggi berada pada kategori Perguruan Tinggi, yaitu dari 3,22 persen pada tahun 2023 menjadi 0,88 persen pada tahun 2024. Mengalami penurunan sebesar 2,34 persen poin.

Tabel 3.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Agustus 2022 - Agustus 2024

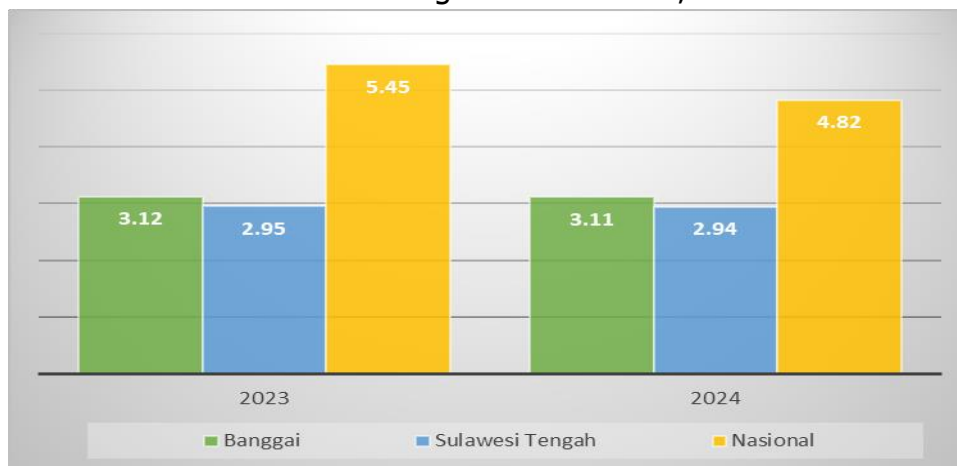
Kabupaten/ Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
Banggai Kepulauan	1,48	1,56	1,55
Banggai	3,09	3,12	3,11
Morowali	3,20	2,84	2,84
Poso	1,68	1,67	1,77
Donggala	2,84	2,79	2,79
Tolitoli	3,31	3,12	3,11
Buol	3,07	3,14	3,13
Parigi Moutong	1,71	2,11	2,10
Tojo Una-Una	3,05	2,83	2,47
Sigi	3,01	2,60	2,55
Banggai Laut	3,60	3,64	3,60
Morowali Utara	2,25	2,23	2,38
Palu	6,15	5,65	5,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai pada Agustus 2024 sebesar 3,11 persen sama seperti TPT di Kabupaten Toli-Toli, angka ini merupakan yang tertinggi keempat setelah Kota Palu, Banggai Laut, dan Buol. Pada periode Agustus 2024, angka TPT di hampir seluruh kabupaten mengalami

penurunan kecuali Kabupaten Poso dan Morowali Utara yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,10 dan 0,15 persen poin.

Grafik 3.12
Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2023-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Bila dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sesuai menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 3,11 lebih tinggi 0,17 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,94 dan lebih rendah 2,33 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 4,82.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka

memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.

Capaian kinerja yang dilaksanakan berupa kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 135 orang dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.337 orang sehingga diperoleh 10,09 % tenaga kerja yang ditempatkan. Capaian ini didukung dengan adanya kegiatan *Job Fair* yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk yang kedua kalinya sejak tahun 2023. Kegiatan *Job Fair* ini diikuti oleh perusahaan lokal maupun perusahaan luar daerah, seperti dari Morowali dan Maluku Utara, dengan membuka sebanyak 386 lowongan kerja.



Kendala-kendala yang menghambat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain:

1. Keterbatasan lapangan kerja, dimana jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

2. Kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan masyarakat.
3. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian.
4. Kurangnya akses modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.
5. Minimnya program pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Solusi untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banggai:

1. Mendorong pengembangan sektor-sektor baru, seperti industri kreatif, pariwisata, dan teknologi informasi, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
2. Menyelenggarakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasarkerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
3. Menerapkan teknologi dan metode pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas.
4. Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan koperasi untuk menyediakan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau bagi UKM.
5. Program Penempatan Tenaga Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja

4. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total seluruh penduduk di suatu wilayah tertentu. Penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah didapatkan dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 6,56%, belum mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar 5,85%, dengan capaian kinerja sebesar 78,35%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi indikator kinerja angka kemiskinan di kabupaten Banggai untuk tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,38% dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,00, diperoleh capaian sebesar 52,44%.

Tabel 3.15
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Banggai, 2017-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2017	352.840	33.500	9,20
Maret 2018	373.695	33.730	9,12
Maret 2019	395.700	29.297	7,80
Maret 2020	417.863	28.160	7,39
Maret 2021	431.639	30.100	7,83
Maret 2022	457.335	28.550	7,33
Maret 2023	488.788	27.380	6,94
Maret 2024	515.334	26.210	6,56

Sumber : *BPS Kabupaten Banggai (2024)*

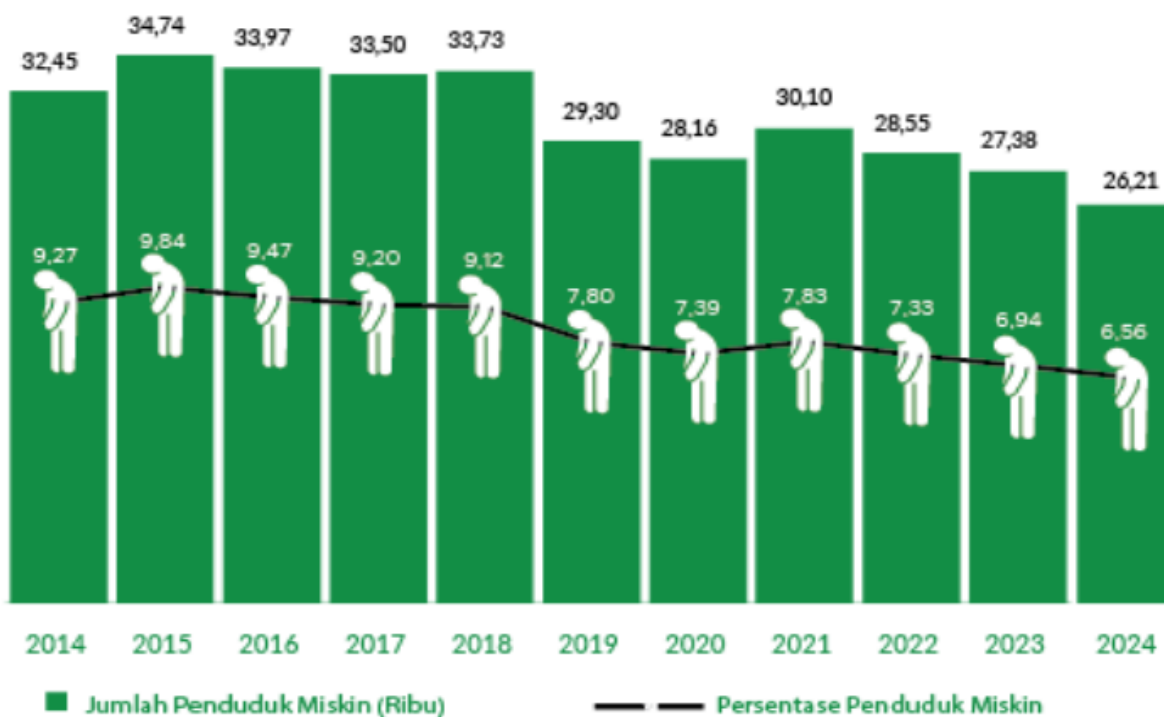
Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2024. Selama periode Maret 2023- Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,43 persen, yaitu dari Rp 488.788,- per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp 515.334,- per kapita per bulan pada Maret 2024. Sementara itu, pada periode Maret 2022– Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 12,68 persen, yaitu dari Rp 457.335,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 515.334,- .

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai pada Maret 2024 mencapai 26,21 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,17 ribu orang dibandingkan Maret 2023, yang sebesar 27,38 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan keadaan Maret 2022 jumlah penduduk miskin tersebut menurun pula sebanyak 2,34 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 6,56 persen, menurun sebesar 0,38 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun sebesar 0,77 persen poin terhadap Maret 2021.

Secara umum, pada periode Maret 2014 sampai dengan Maret 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Akan tetapi, pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami

kenaikan. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai kembali mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan Maret 2024 ditunjukkan oleh grafik berikut:

Grafik 3.13
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014–Maret 2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2024)

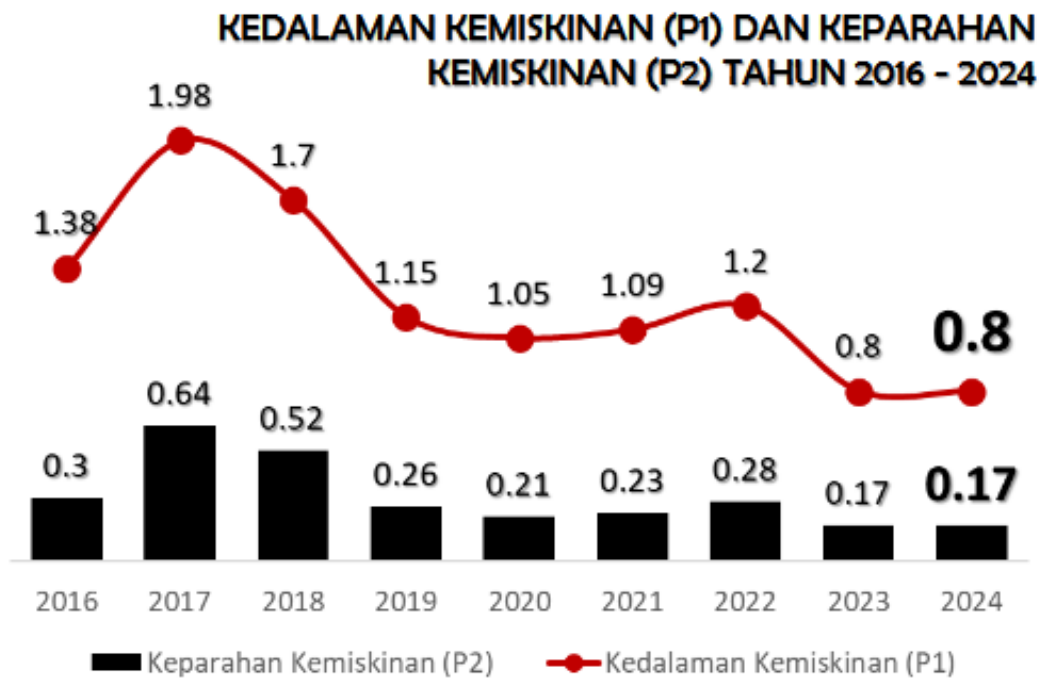
Tabel 3.16
Kemiskinan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah Tahun 2024

Prov/Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Banggai Kepulauan	14,86	12,32	1,26	0,22	453.552
Banggai	26,21	6,56	0,86	0,17	515.334
Morowali	14,99	11,55	1,79	0,43	590.027
Poso	39,63	14,23	1,97	0,45	620.267
Donggala	47,68	15,30	3,00	0,75	438.396

Toli-Toli	30,39	12,45	1,73	0,42	441.975
Buol	23,05	13,08	2,20	0,47	477.640
Parigi Moutong	74,57	14,20	3,36	1,08	553.012
Tojo Una-Una	26,12	16,36	2,04	0,40	622.000
Sigi	29,80	12,06	2,52	0,70	463.011
Banggai Laut	11,68	13,78	1,76	0,35	443.877
Morowali utara	16,74	11,95	1,89	0,39	594.137
Kota palu	24,57	5,94	0,65	0,09	658.112
Sulawesi Tengah	379,76	11,77	2,10	0,53	600.872

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2024)

Grafik 3.14



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2024)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai sebanyak 26,21 ribu orang. Angka ini merupakan yang tertinggi keenam di bawah Parigi Moutong, Donggala, Poso, ToliToli dan Sigi. Pada Tabel diatas, terlihat pula bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Banggai sebesar 6,56 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah, angka ini merupakan yang terendah kedua setelah Kota Palu. Hanya Kabupaten Banggai dan Kota Palu yang memiliki persentase penduduk miskin dibawah 10 persen.

Pemerintah Kabupaten Banggai terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, melalui berbagai program dan inovasi yang tepat sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya

keterpaduan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

Upaya/strategi penanggulangan kemiskinan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui program penanggulangan kemiskinan dengan inovasi **“Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi (Tumis Ikan Teri)”** yakni:

1. Pengelolaan jaminan Kesehatan
2. Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 26.895 KK dengan jenis bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000/Bulan per Kepala Keluarga.
4. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 11.429 KK dengan jenis bantuan berupa uang dengan besaran berbeda-beda untuk masing-masing Kepala Keluarga sesuai dengan komponen yang ada dalam kartu keluarga seperti anak sekolah SD, SMP dan SMA, Lansia, Balita, Disabilitas dan ibu hamil dimana seluruh bantuan-bantuan yang diberikan khusus kepada keluarga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5. Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni
6. Penyediaan air minum dan sanitasi
7. Bantuan pelatihan usaha mikro
8. BUMDES 500 jt/desa
9. Bantuan kepada korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial berupa bantuan sandang, pangan dan papan. Tercatat ada 1.810 kepala keluarga yang mengalami bencana baik bencana alam maupun bencana sosial selama tahun 2024.
10. Bantuan bagi siswa kurang mampu

Beberapa faktor yang terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai selama periode Maret 2023 - Maret 2024 antara lain adalah:

1. Inflasi year on year Kabupaten Banggai periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi year on year periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 6,69 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai pada tahun 2023 tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,4 persen meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya akibat turunnya harga komoditas internasional.

3. PDRB atas dasar harga berlaku untuk komponen pengeluaran rumah tangga pada tahun 2023 sebesar 13.372,5 miliar rupiah, mengalami peningkatan 7,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12.371,47 miliar rupiah.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengentaskan dan mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Banggai:

1. Masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan terutama nelayan dan petani. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banggai bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering kali terganggu oleh faktor-faktor musiman, bencana alam, atau perubahan iklim. Ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan ini dapat membuat pendapatan keluarga tidak stabil dan menyebabkan kemiskinan tetap tinggi.
2. Akses masyarakat miskin dan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terhadap bantuan jaminan dan pelayanan sosial masih terbatas
3. Keterbatasan Akses ke Modal dan Kredit Usaha: Banyak keluarga miskin di Banggai yang ingin memulai atau mengembangkan usaha tetapi terkendala oleh kurangnya akses ke modal usaha, perbankan, atau lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman. Tanpa dukungan finansial, mereka sulit meningkatkan penghasilan.
4. Tingkat Pendidikan yang Rendah: Banyak penduduk di Kabupaten Banggai, terutama di daerah terpencil, yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah. Keterbatasan pendidikan ini menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau beralih ke sektor ekonomi yang lebih menguntungkan.
5. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

Solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk Mengurangi Kemiskinan pada Tahun 2024:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pasar serta akses air bersih, untuk mendukung akses masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal.

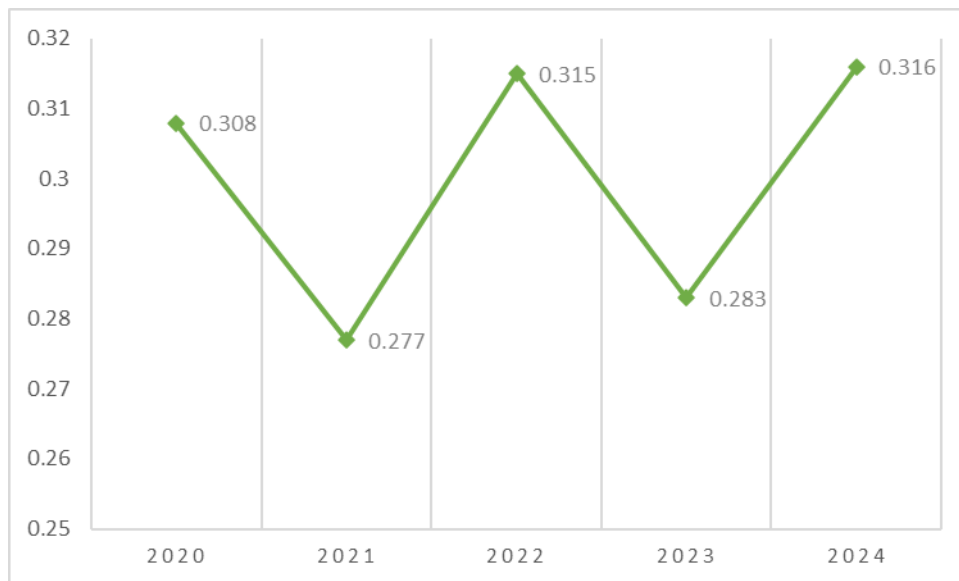
2. Menerapkan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan penyediaan modal untuk usaha kecil dan menengah (UKM).
3. Menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang terupdate.
4. Mengembangkan program untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, termasuk penyuluhan, pengadaan bibit unggul, dan akses terhadap teknologi pertanian modern.
5. Menerapkan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan penyediaan modal untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

5. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Gini ratio Kabupaten Banggai tahun 2024 terealisasi sebesar 0.316, tidak mencapai target sebesar 0,287 dengan capaian diperoleh sebesar 89,9%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 gini ratio Kabupaten Banggai terealisasi sebesar 0,283 sedangkan tahun 2024 sebesar 0,316, terjadi kenaikan angka gini ratio sebesar 0,033 point, dari tahun 2023. Gini Ratio pada tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten masih tinggi.

Grafik 3.15
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2024

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2020, Gini Ratio Kabupaten Banggai 0.308, tahun 2021 Gini Ratio turun signifikan ke 0.277, yang merupakan titik terendah selama periode ini, menandakan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, tahun 2022 Nilai Gini Ratio kembali meningkat tajam ke 0.315, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, pada tahun 2023 Gini Ratio kembali mengalami penurunan menjadi 0.283, dan pada tahun 2024 gini ratio Kabupaten Banggai naik menjadi 0,316, hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam; perbedaan kondisi geografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Tabel 3.17
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, 2021-2024

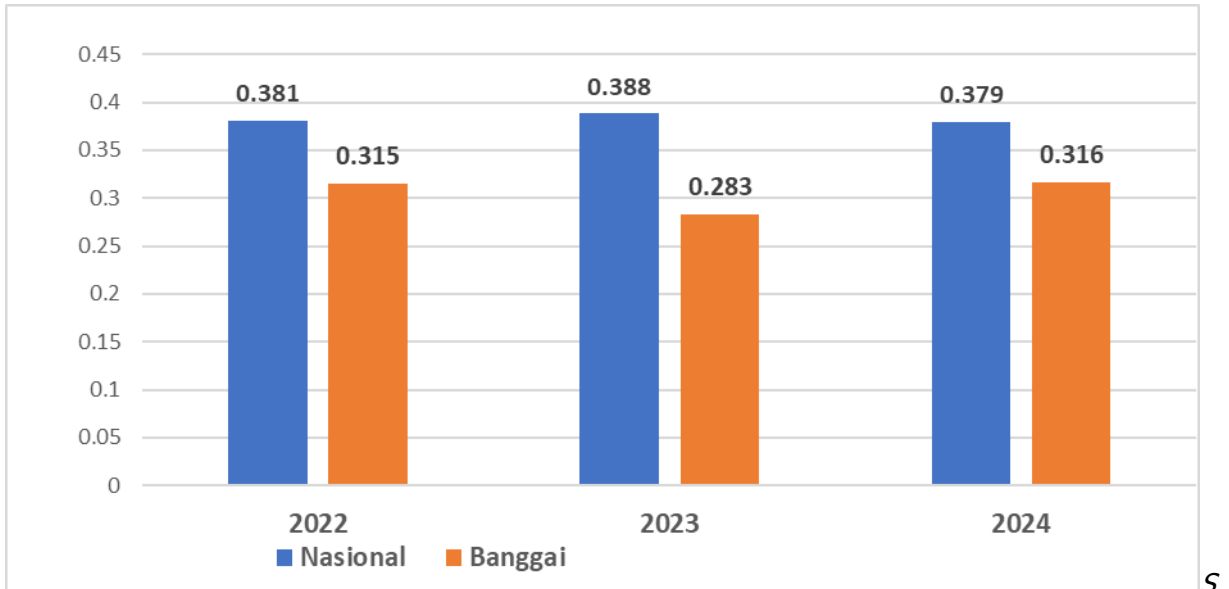
Kabupaten Kota	Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota			
	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Tengah	0,316	0,308	0,304	0.301
Banggai Kepulauan	0,279	0,280	0,272	0.276
Banggai	0,277	0,315	0,283	0.316
Morowali	0,297	0,285	0,281	0.275
Poso	0,270	0,256	0,265	0.247
Donggala	0,261	0,280	0,237	0.251
Tolitoli	0,349	0,295	0,345	0.277
Buol	0,321	0,266	0,258	0.266
Parigi Moutong	0,287	0,279	0,298	0.250
Tojo Una-una	0,247	0,250	0,262	0.244
Sigi	0,291	0,265	0,281	0.246
Banggai laut	0,251	0,247	0,244	0.221
Morowali Utara	0,301	0,269	0,284	0.245
Kota Palu	0,308	0,355	0,324	0.337

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Secara umum, bahwa Kabupaten Banggai mengalami kenaikan ketimpangan pada tahun 2024 sebesar 0,316 setelah mengalami penurunan pada 2023 (0,283). Ketimpangan di Banggai lebih tinggi dari rata-rata provinsi 0,301. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Banggai memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, hanya kalah dari Kota Palu sebesar 0,337. Kabupaten dengan pemerataan pendapatan terbaik adalah Banggai Laut sebesar 0,221 dan Morowali Utara sebesar 0,245. Kabupaten Banggai perlu memperhatikan pemerataan pertumbuhan ekonomi agar ketimpangan tidak semakin melebar di tahun-tahun mendatang

Gini rasio Kabupaten Banggai jika dibandingkan dengan Gini rasio Nasional sebagai berikut :

Grafik 3.16
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2022-2024



umber : Badan Pusat Statistik

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381. secara keseluruhan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, jika dibandingkan antara gini ratio Kabupaten Banggai dengan Nasional, maka Gini Rasio di Kabupaten Banggai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Kabupaten Banggai lebih kecil. Pada tahun 2023, Banggai menunjukkan perbaikan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan, sementara nasional justru mengalami peningkatan ketimpangan. Namun, pada tahun 2024, ketimpangan di Banggai meningkat kembali, meskipun masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan gini ratio di Kabupaten Banggai tidak mencapai target sebesar 0,287, terkait kendala-kendala berikut:

1. Sektor ekonomi Kabupaten Banggai yang banyak bergantung pada perikanan, pertanian, dan sumber daya alam (termasuk tambang) cenderung dimonopoli oleh segelintir individu atau perusahaan besar. Sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memiliki keterbatasan akses ke sektor-sektor ini, baik dari segi modal, teknologi, maupun pelatihan. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak, memperburuk distribusi pendapatan. seperti pada sektor perikanan dimana perusahaan besar dengan armada kapal dan teknologi modern mungkin menghasilkan keuntungan yang besar, sementara nelayan kecil yang tidak memiliki alat dan akses pasar hanya memperoleh penghasilan yang sangat terbatas.
2. Kualitas pendidikan di daerah perkotaan atau yang lebih berkembang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan, yang menyebabkan ketimpangan antara kelompok yang berpendidikan tinggi dan yang rendah.
3. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang terpusat di kota atau kawasan yang lebih dekat dengan sumber daya alam sering kali memperburuk ketimpangan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah yang kurang berkembang tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang ekonomi yang ada.

Adapun langkah-langkah untuk pencapaian ditahun mendatang antara lain :

1. Penguatan Sumber Daya dan Teknologi seperti pemberian Akses Pembiayaan untuk Nelayan dan Petani Kecil, dengan menyediakan kredit mikro dengan bunga rendah untuk memperoleh alat tangkap yang lebih efisien dan modern, serta teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan khusus untuk nelayan dan petani dengan syarat yang mudah diakses, serta subsidi untuk pembelian alat modern yang dapat meningkatkan hasil dan produktivitas mereka.
2. Program pelatihan dan pendampingan bagi nelayan kecil dan petani untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas.
3. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, yaitu pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik yang menghubungkan daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Ini akan mempermudah distribusi produk pertanian dan perikanan serta memperluas akses ke pasar yang lebih besar

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera", yaitu :

Tabel 3.18
Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Pendidikan	176.522.611.769,00	113.692.867.089,00	64,41
Pengembangan Kurikulum	763.763.400,00	487.346.250,00	63,81
Pengendalian Perizinan Pendidikan	277.734.000,00	94.704.500,00	34,10
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.847.056.500,00	215.072.250,00	11,64
Pembangunan Bahasa dan Sastra	337.576.000,00	239.917.000,00	71,07
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	176.341.151.980,00	164.367.901.237,00	93,21
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	457.208.000,00	410.008.000,00	89,68
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	866.024.250,00	634.712.384,00	73,29
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	255.877.000,00	176.779.800,00	69,09
Pemberdayaan Sosial	9.529.024.750,00	8.773.716.043,00	92,07
Rehabilitasi Sosial	2.382.061.150,00	1.927.414.970,00	80,91
Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.278.061.850,00	9.984.632.977,00	97,15
Penanganan Bencana	1.044.320.000,00	567.124.006,00	54,31
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	610.791.000,00	575.275.500,00	94,19
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	443.132.400,00	346.431.180,00	78,18
Penempatan Tenaga Kerja	82.561.500,00	77.062.680,00	93,34
Hubungan Industrial	3.077.719.146,00	2.696.637.040,00	87,62
Perencanaan Kawasan Transmigrasi	500.000.000,00	446.753.336,00	89,35
Pembangunan Kawasan	25.410.100,00	20.276.100,00	79,80

Transmigrasi			
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	715.121.450,00	674.406.570,00	94,31
Perlindungan Perempuan	675.309.500,00	645.629.300,00	95,60
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	12.000.000,00	11.480.000,00	95,67
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	169.462.500,00	168.242.330,00	99,28
Pengendalian Penduduk	818.609.900,00	375.875.500,00	45,92
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.712.711.850,00	4.993.333.995,00	87,41
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.567.630.000,00	3.496.131.125,00	98,00
Jumlah	397.312.929.995,00	316.099.731.162,00	79,56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,19% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 316.099.731.162,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 397.312.929.995,00 atau sebesar 79,56%.

Tabel. 3.19
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	4,2	5,20	123,81	4,7	5,19	110,43	5,7	91,05
Rata-rata capaian kinerja				123,81			110,43		91,05

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 dengan target sebesar 4,7% dan terealisasi sebesar 5,19%, sehingga dapat dikatakan Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB melebihi target tahun 2024 dengan capaian kinerja

sebesar 110,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi penurunan yang tidak begitu signifikan yaitu sebesar 0,01 point, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,7% capaian pada tahun 2024 baru diperoleh sebesar 91,05%, dimana realisasi tahun 2024 belum memenuhi target akhir 2026 yaitu 5,7%.

Realisasi Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM tahun 2024 merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dimana yang termasuk dalam perdagangan besar yaitu kegiatan ekspor dan yang termasuk dalam perdagangan eceran yaitu pada koperasi, UMKM dan IKM.

Perdagangan besar di Kabupaten Banggai dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor, Komoditas andalan ekspor Kabupaten Banggai yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik, yang di dominasi oleh amonia dan natural gas. Adapun negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, dan Eropa. Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya, diantaranya tepung dan minyak kelapa, serta gurita beku. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden).

Adapun Laporan Ekspor tahun 2024 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai, sebanyak US\$ 713.690.187,50 dengan rincian berikut:

Tabel 3.20
Daftar Eksportir SKA
Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Komoditi	Jumlah			Negara Tujuan
				(Berat)	(USD)	SKA	
1	Pt. Panca Amara Utama	Desa Uso Kec. Batui	Amonia	7.210.138,220 TNE	163358252,2	57	Korea, China, India, Maroko
2	Pt. Donggi Senoro Lng	Desa Uso Kec. Batui	Natural Gas	623.046,41TNE	434093276,3	11	Korea
3	Pt. Sasl And Sons Indonesia	Desa kayutanyo Kec. Luwuk Timur	Tepung dan Minyak Kelapa	2,469.141,020 KGM	5,058,483.77	101	Amerika, Kanada, Azerbaijan, Belgia, Rusia, Australias, Arab, Spanyol, Maroko
4		Gd. The Energy LT. 28-39, JL. Jend. Sudirman SCBD Lot 11A, KAV 52-53, Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Condensate	1,235,586.570 BBL	93,228,017.57	5	Korea
5	CV.	Jl. Raya Biak Km. 8	Gurita Beku	436,471.240 KGM	2,398,008.58	28	Jepang, Amerika,

	INDOTR PIC FISHERY	Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah					Australia
6	PT PERTAMINA EP	RDTX Square Lantai 12, JL. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta	Condensate	3,917,188.000 BBL	2,637,442.68	1	Korea
7	PT PERTAMINA HULU ENERGI TOMORI SULAWESI	GDG PHE TOWER, JL. LETJEN TB SIMATUPANG KAV 99 Jakarta	Condensate	191,841.770 BB	12,916,706.37	1	Korea
Jumlah					713,690,187.50	204	

Sumber : Disdagrin Kab.Banggai (2024)

Tabel 3.21

Data Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga Tahun 2024

No	Usaha/Niaga	Tahun 2024	
		Jumlah Tertib Usaha/Niaga	Jumlah Usaha/Niaga yang Terdata/Potensi
1.	Pelaku Usaha Eksportir	7	5
2.	Pedagang Pasar yang Memiliki SPTU	885	929
3.	Pengusaha Minuman Beralkohol	19	19
4.	Pengguna Tol Laut Gerai Maritim	4	11
5.	Pemilik Gudang	5	30
6.	Distributor Bapokting	12	12
7.	Distributor Pupuk Bersubsidi	5	5
8.	Penyalur Pupuk Bersubsidi	41	98
9.	Agen Gas LPG Bersubsidi	6	6
10.	Pangkalan Agen Gas LPG Bersubsidi	1079	1063
11.	Pengusaha Tertib UTTP	420	1051
Total		2.483	3.229

Sumber : Disdagrin Kab.Banggai (2024)

Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berikut Jumlah Usaha Kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai tahun 2024 sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai.

Tabel 3.22
Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan Subdistrict	Industri Makanan/Minuman	Industri Pengolahan	Industri Kayu	Industri Pakaian Jadi	Industri Furniture	Industri Jasa Reparasi
Toili	-	1	1	2	-	-
Toili Barat	3	-	2	2	-	3
Moilong	4	-	-	-	-	-
Toili Jaya	-	-	-	-	-	-
Batui	2	-	-	-	-	-
Batui Selatan	-	8	-	-	-	-
Bunta	4	-	1	-	1	5
Nuhon	-	3	-	1	-	-
Simpang Raya	3	2	1	1	1	3
Kintom	-	1	-	-	-	-
Luwuk	-	-	-	-	-	-
Luwuk Timur	-	-	-	-	-	-
Luwuk Utara	3	-	-	-	-	1
Luwuk Selatan	-	-	-	-	-	-
Nambo	-	1	-	-	-	-
Pagimana	-	1	4	-	-	-
Bualemo	-	-	-	-	-	-
Lobu	-	-	-	-	-	-
Lamala	-	-	-	-	-	-
Masama	-	1	-	-	-	-
Mantoh	-	-	-	-	-	-
Balantak	8	2	1	-	-	-
Balantak Selatan	-	-	-	-	-	-
Balantak Utara	-	-	-	-	-	-
Jumlah	27	21	10	6	2	12

Sumber: BPS Kab. Banggai Tahun 2024

Tabel 3.23
Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri Tahun 2024

No	Jenis Industri	Jumlah Industri
1	Industri Jasa Reparasi	12
2	Industri Furniture	2
3	Industri Pakaian Jadi	6
4	Industri Kayu	10

5	Industri Pengolahan	21
6	Industri Makanan/Minuman	27

Sumber: BPS Kab. Banggai Tahun 2024

Industri Makanan/Minuman adalah kategori industri yang paling berkembang, dengan 27 industri di seluruh kecamatan. Kecamatan Balantak mendominasi dengan 8 industri, Industri Pengolahan memiliki total 21 industri dan terlihat sangat berkembang di Batui Selatan, yang mencatatkan 8 industri pengolahan, Industri Kayu terbanyak berada di Pagimana yaitu 4 industri, industri pakaian jadi didominasi dan berada di Toili dan Toili Barat masing-masing 2 industri, industri furniture merupakan jenis usaha yang paling sedikit yaitu hanya dua yang berada di Kecamatan Bunta dan Simpang Raya. sedangkan industri jasa dan reparasi terbanyak di Bunta dengan 5 Industri.

Jumlah Usaha kecil di Kabupaten Banggai terbanyak di Kecamatan Bunta, Simpang Raya dan Balantak, dan masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki usaha kecil atau mungkin belum terdaftar, diantaranya kecamatan Toili barat, Bunta, Balemo dan Balantak Selatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, industri terbanyak di kabupaten Banggai di dominasi oleh industri pengolahan yaitu sebanyak 27 Industri. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Industri pengolahan tercatat mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banggai.

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk data pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai sesuai dengan data dari Dinas koperasi dan UKM pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Data Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Kecamatan	Sektor Usaha			Jumlah
		Perdagangan	Home Industri	Jasa	
1.	Luwuk	978	98	194	1270
2.	Luwuk Selatan	658	39	86	783
3.	Luwuk Utara	503	86	66	655
4.	Luwuk Timur	176	63	20	259
5.	Nambo	138	97	33	268
6.	Kintom	411	97	38	546
7.	Batui	361	68	86	515
8.	Batui Selatan	319	113	53	485
9.	Moilong	478	161	107	746
10.	Toili	825	275	241	1341
11.	Toili Barat	534	79	111	724
12.	Pagimana	440	380	58	878
13.	Lobu	35	18	7	60
14.	Bunta	161	101	42	316
15.	Nuhon	78	41	29	148
16.	Simpang Raya	218	46	52	316
17.	Masama	103	26	23	152
18.	Lamala	142	71	36	249
19.	Mantoh	129	13	18	160
20.	Balantak Selatan	83	28	15	126
21.	Balantak	222	96	47	365
22.	Balantak Utara	66	14	18	98
23.	Bualemo	281	48	40	369
	Jumlah	7.339	2.058	1.432	10.829

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2024

Dari tabel diatas total pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai adalah 10.829 orang. Dari jumlah tersebut, perdagangan memiliki jumlah yang terbesar, yaitu 7.339 pelaku usaha (67,8%) dari total pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai, Home Industri menyumbang 2.058 pelaku usaha (19,0%), dan Jasa 1.432 pelaku usaha (13,2%).

Perdagangan adalah sektor yang paling dominan, yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai yang terlibat dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Seperti di kecamatan Luwuk, Toili, dan Pagimana, yang memiliki jumlah pelaku usaha dan perdagangan yang tinggi. Home Industri sebanya 2.058 pelaku usaha menjadi sektor yang cukup signifikan di beberapa kecamatan, seperti Pagimana dengan 380 pelaku usaha, Toili dengan 275 pelaku pelaku usaha,

dan Batui Selatan dengan 113 pelaku usaha. Sektor ini menunjukkan adanya kreativitas dan usaha rumahan yang berpotensi berkembang. Sedangkan Jasa sebanyak 1.432 pelaku usaha adalah sektor yang lebih kecil dibandingkan perdagangan dan home industri, namun tetap memiliki kontribusi penting, terutama di kecamatan dengan populasi yang lebih besar seperti Luwuk dan Toili.

Selain dari sektor UKM dan IKM, sektor koperasi juga memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan serta dimiliki oleh orang/seorang untuk kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan sebuah kegiatan dengan berdasarkan prinsip gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berikut jumlah koperasi aktif menurut kecamatan berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kabupaten Banggai tahun 2024.

Tabel 3.25
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai,
Tahun 2024

No	Kecamatan	Koperasi		Jumlah
		Aktif	Tidak Aktif	
1.	Luwuk	30	16	46
2.	Luwuk Selatan	18	9	27
3.	Luwuk Utara	3	3	6
4.	Luwuk Timur	3	-	3
5.	Masama	5	-	5
6.	Lamala	4	2	6
7.	Mantoh	2	-	2
8.	Balantak	-	2	2
9.	Balantak Selatan	1	-	1
10.	Balantak Utara	2	-	2
11.	Bualemo	3	5	8
12.	Pagimana	7	2	9
13.	Bunta	5	2	7
14.	Simpang Raya	5	5	10
15.	Nuhon	1	1	2
16.	Nambo	1	2	3
17.	Batui	9	1	10
18.	Batui Selatan	10	2	12
19.	Kintom	2	3	5
20.	Moilong	2	-	2
21.	Toili	20	3	23
22.	Toili Barat	11	3	23
23.	Lobu	-	-	-
Jumlah		114	46	206

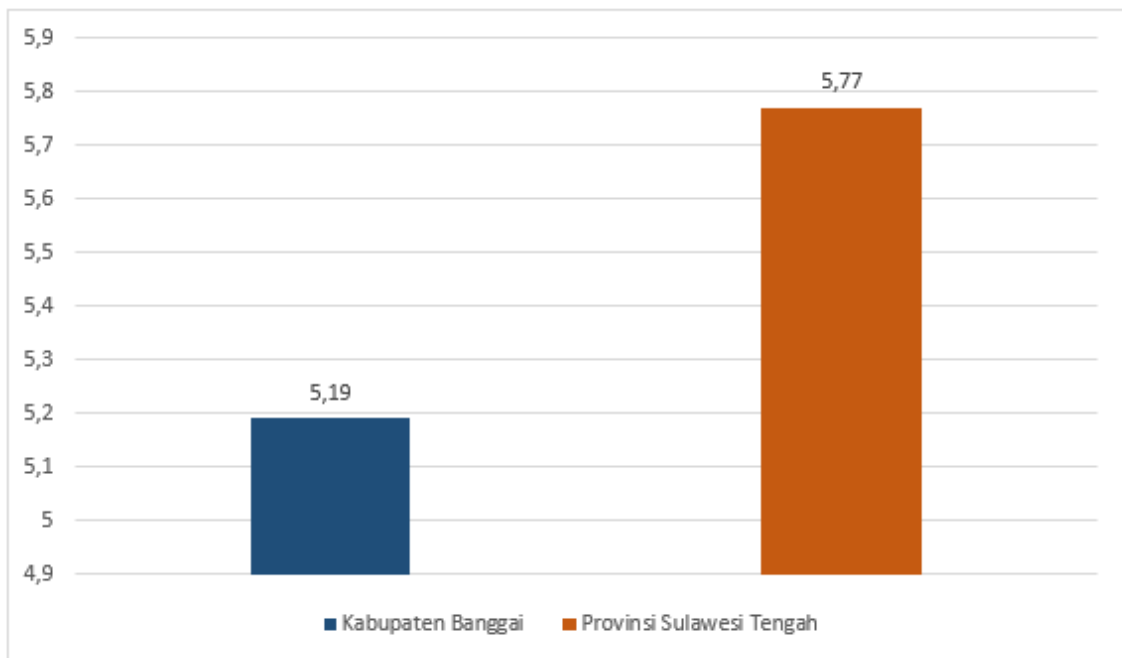
Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Banggai (2024)

Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Banggai pada tahun 2024, yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan. Jumlah koperasi mencakup dua kategori yaitu koperasi aktif yaitu koperasi yang masih beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha dan Koperasi tidak aktif yaitu koperasi yang tidak lagi beroperasi atau tidak menjalankan aktivitas. Jumlah total koperasi yang tercatat di Kabupaten Banggai adalah 206 koperasi, dengan rincian: koperasi aktif sebanyak 114 atau 55,3% dari total koperasi di Kabupaten Banggai dan 46 koperasi tidak aktif atau 22,3% dari total koperasi di Kabupaten Banggai.

Beberapa kecamatan dengan jumlah koperasi aktif yang paling banyak adalah Luwuk memiliki 30 koperasi aktif paling banyak di kabupaten Banggai, Toili memiliki 20 koperasi aktif, Toili Barat Memiliki 11 koperasi aktif, dan Batui Selatan Memiliki 10 koperasi aktif. Sebaliknya, ada beberapa kecamatan yang memiliki jumlah koperasi aktif yang sangat sedikit, bahkan beberapa kecamatan tidak memiliki koperasi aktif sama sekali seperti Balantak dan Lobu tidak tercatat memiliki koperasi aktif, Kecamatan-kecamatan ini membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengembangan koperasi, baik melalui pelatihan pengelolaan koperasi atau penciptaan peluang ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan koperasi. Meskipun ada koperasi aktif, terdapat sejumlah koperasi yang tidak berfungsi atau tidak lagi beroperasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengelolaan yang kurang baik atau kurangnya kegiatan ekonomi yang mendukung kelangsungan koperasi.

Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 5,19% masih lebih rendah, di bandingkan dengan kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar 5,77%, selisihnya adalah 0,58 poin. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan ini bisa mencakup skala ekonomi, kebijakan daerah, akses pasar, infrastruktur, serta jumlah dan jenis usaha yang beroperasi di sektor ini.

Grafik 3.17
Perbandingan Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kontribusi usaha perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan jumlah usaha di sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan IKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Kabupaten Banggai. Akses transportasi, konektivitas antar wilayah, serta jaringan distribusi barang dan jasa bisa menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara luas. Jika infrastruktur belum optimal, biaya logistik menjadi lebih tinggi sehingga daya saing usaha menurun. Selain itu Kabupaten Banggai dikenal memiliki sektor ekonomi yang lebih dominan di bidang industri ekstraktif seperti pertambangan dan perikanan. Jika sektor perdagangan dan UMKM tidak menjadi fokus utama, maka kontribusinya terhadap PDRB relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain.

Capaian yang dilaksanakan pada sektor perdagangan dan industri meliputi :

Mengikuti pameran dagang nasional untuk memperkenalkan potensi Ekspor Kabupaten Banggai di tingkat nasional



Melaksanakan pameran dagang lokal di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai untuk memperkenalkan produk lokal pada masyarakat



Melakukan fasilitasi penerbitan izin pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan



Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pasar pada para penarik retribusi pasar



Melakukan pengawasan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat



Melaksanakan pengawasan dokumen ijin penyalur pupuk bersubsidi



Adapun hambatan dalam pengembangan pada sektor perdagangan dan Industri di Kabupaten Banggai antara lain yaitu:

1. Sektor perdagangan yang menjadi masalah adalah :
 - a. Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan retribusi pasar;
 - b. Sebaran pedagang yang menempati sarana dan prasarana belum tertata.
 - c. Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor.
 - d. Kenaikan Inflasi di Indonesia.
2. Sektor Industri :
 - a. Keterbatasan penguasaan teknologi industri;
 - b. Minimnya akses permodalan;
 - c. Penerapan Standarisasi Produk, HAKI dan Sistem mutu masih kurang;
 - d. Inovasi Produk unggulan sebagai ciri khas produk daerah masih rendah;
 - e. Belum tersedianya bahan baku yang memadai.
 - f. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan.
 - g. Penurunan jumlah produksi komoditas Eksport Non Migas

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam upaya memperbaiki sektor perdagangan di Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
2. Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
3. Pembangunan Kawasan Industri.
4. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat high cost economic.
5. Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan pasar.

7. Melakukan inventarisasi pedagang untuk penyebaran yang merata pada sarana dan prasarana yang terbangun.
8. Melaksanakan pembinaan, pelatihan untuk peningkatan SDM dalam penguasaan teknologi.
9. Membangun jaringan kerjasama dengan para stakeholder agar dapat menjadi investor untuk memberikan akses permodalan bagi IKM.
10. Meningkatkan mutu produk unggulan daerah dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung.
11. Meningkatkan inovasi produk unggulan daerah melalui pengembangan keterampilan IKM.
12. Membangun komitmen bersama dengan instansi lintas sektor terkait untuk mengembangkan bahan baku yang menjadi bahan utama dalam peningkatan hasil produk unggulan daerah.

Adapun hambatan dalam pengembangan Koperasi di Kabupaten Banggai antara lain yaitu:

1. Adanya persaingan usaha dengan lembaga-lembaga keuangan seperti finance, bank, pinjaman on-line, serta disektor usaha waserda terjadi persaingan dengan mini market yang semakin banyak.
2. Kurangnya modal usaha koperasi sehingga pendapatan atau volume usaha tidak meningkat.
3. Kurangnya pemahaman yang merata tentang pentingnya digitalisasi di kalangan pelaku usaha, terutama yang didominasi oleh orang tua, menyulitkan mereka dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran.
4. Keterbatasan sumber daya manusia pendamping UKM yang sangat tidak memadai untuk mendukung pelaku UKM yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai. Hal ini menghambat efektivitas pendampingan dan pengembangan sektor UKM yang ada.

Solusi untuk Mengatasi Masalah dan Kendala yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai antara lain:

1. Mendorong kerjasama antara koperasi dan lembaga keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan menguntungkan bagi pelaku usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang digitalisasi dan pemanfaatan platform digital bagi pelaku usaha, terutama yang didominasi oleh orang tua, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
3. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia pendamping UKM dengan merekrut dan melatih lebih banyak pendamping, agar dapat menjangkau seluruh kecamatan dan meningkatkan efektivitas pendampingan.
4. Meningkatkan promosi dan kesadaran tentang keberadaan koperasi dan UKM di masyarakat melalui kampanye pemasaran yang efektif, sehingga dapat bersaing dengan mini market dan lembaga keuangan lainnya.

Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, koperasi di Kabupaten Banggai berpotensi untuk berkembang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru", yaitu:

Tabel. 3.26
 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024
 Yang Mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah
 Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	97.568.500,00	97.267.260,00	99.69%
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	88.660.400,00	87.552.400,00	98.75%
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	74.060.000,00	73.939.000,00	99.83%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	296.988.550,00	285.102.490,00	95,99%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperas	252.294.300,00	247.958.960,00	98,28%
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	2.323.321.089,00	2.140.835.319,00	92.14%

Usaha Mikro (UMKM)			
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	58.804.250,00	58.435.510,00	99,37
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.055.866.568,00	2.010.210.850,00	97,78
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.533.328.700,00	1.398.605.700,00	91,21
Pengembangan Ekspor	272.040.000,00	252.973.220,00	92,99
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	294.055.500,00	291.296.500,00	99,06
Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.018.406.150,00	971.825.256,00	95,43
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.550.350,00	10.434.550,00	98,90
Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	18.157.700,00	16.681.700,00	91,87
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.784.100,00	57.689.900,00	93,37
Jumlah	8.455.886.157,00	8.000.808.615,00	94,62

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Banggai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Banggai, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM serta pertumbuhan wirausaha baru diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 110,43% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 8.000.808.615,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.455.886.157,00 atau sebesar 94,62%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 116,71 %, dan tingkat efisiensi sebesar 15,81%.

Tabel. 3.27
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	46,39%	54,98%	118,52 %	68,73	51,89	75,50	75,00	69,19
Rata-rata capaian kinerja				118,52			75,50		69,19

Sumber : Dinas PMD Kab.Banggai, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

Indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Indikator persentase desa maju berdasarkan IDM di tahun 2024 terealisasi sebesar 51,89%, belum mencapai target yang telah ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 68,73% dengan capaian kinerja sebesar 75,50 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 54,98% dengan capaian kinerja sebesar 118,52%, terjadi penurunan sebesar 3,09 point. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75,00%, Capaian realisasi sebesar 69,19% belum mencapai target akhir yang sudah di tetapkan di tahun akhir RPJMD. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan status Desa Maju yang tadinya berjumlah 160 Desa di tahun 2023 berkurang menjadi 151 Desa di tahun 2024, namun status Desa Mandiri Naik menjadi 56 Desa di tahun 2024, dari 9 Desa Mandiri di Tahun 2023. Sehingga dengan naiknya status Desa dari Maju menjadi Mandiri, mengakibatkan berkurangnya jumlah dan persentase Desa Maju berdasarkan IDM di tahun 2024. Jadi walaupun target untuk indikator persentase desa maju berdasarkan IDM tidak mencapai target, namun jumlah desa dengan status desa mandiri mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Tabel. 3.28
Status Desa berdasarkan IDM di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Status Desa	Jumlah Desa	Persentase
Mandiri	56 Desa	19,24
Maju	151 Desa	51,89
Berkembang	84 Desa	28,87
Tertinggal	0	0
Sangat Tertinggal	0	0
Jumlah Desa di Kabupaten Banggai	291 Desa	100

Tabel diatas memberikan gambaran tentang status pembangunan desa-desa di Kabupaten Banggai, dengan rincian jumlah desa berdasarkan kategori statusnya. Berikut adalah deskripsi dari tiap kategori:

1. Desa Mandiri:

Terdapat 56 desa dengan status mandiri, yang merupakan 19,24% dari total 291 desa di Kabupaten Banggai. Desa mandiri biasanya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang sangat baik, serta mampu mengelola potensi ekonomi secara mandiri.

2. Desa Maju:

Terdapat 151 desa yang termasuk dalam kategori desa maju, mencakup 51,89% dari total desa. Desa maju adalah desa yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

3. Desa Berkembang:

AdaTerdapat 84 desa yang termasuk dalam kategori berkembang, yang setara dengan 28,87% dari jumlah total desa. Desa berkembang berada pada tahap pertumbuhan, di mana ada kemajuan namun masih memerlukan berbagai upaya peningkatan untuk mencapai status yang lebih tinggi.

4. Desa Tertinggal:

Tidak ada desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal di Kabupaten Banggai, yang berarti 0% dari desa memiliki status ini. Desa tertinggal umumnya memiliki keterbatasan signifikan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar.

5. Desa Sangat Tertinggal:

Sama halnya dengan kategori desa tertinggal, tidak ada desa yang tergolong sangat tertinggal, yang juga 0% dari total desa. Desa sangat tertinggal biasanya mengalami kondisi yang jauh lebih buruk dalam segala aspek dibandingkan dengan desa tertinggal.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebagian besar desa di Kabupaten Banggai telah mencapai status Maju dan Mandiri, dengan hanya sedikit desa yang masih dalam kategori Berkembang, dan tidak

ada desa yang tertinggal. Hal ini mencerminkan perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Banggai dalam hal pembangunan desa.

Tabel. 3.29
Status Perkembangan Status IDM Kabupaten Banggai, 2021-2024

Status Desa / Village Status	Jumlah Kelurahan / Desa / Number of Village							
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Desa Mandiri	5	1,71%	7	2,40%	9	3,09%	56	19,24
Desa Maju	89	30,58%	118	40,54%	160	54,98%	151	51,89
Desa Berkembang	191	65,63%	163	56,01%	121	41,58%	84	28,87
Desa Tertinggal	6	2,06%	3	1,03%	1	0,34%	0	0
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	291							

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan Peningkatan Status IDM desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Banggai, untuk kategori Desa Mandiri, terlihat adanya lonjakan yang signifikan dimana jumlah desa dengan kategori mandiri sebanyak 5 desa (1,71%) pada tahun 2021, 7 desa (2,40%) pada tahun 2022, 9 desa (3,09%) pada tahun 2023 menjadi 56 desa (19,24%) pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam program pemberdayaan desa dan pencapaian kemandirian. Sedangkan status IDM dengan kategori Desa Maju menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dari 89 desa (30,58%) pada 2021 menjadi 151 desa (51,89%) pada 2024, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk status IDM dengan kategori Desa berkembang mengalami penurunan signifikan, yang mencerminkan bahwa banyak desa berkembang telah bertransformasi menjadi desa maju atau mandiri. Status IDM dengan kategori desa tertinggal tersisa hanya 1 desa pada tahun 2023 dan tidak terdapat desa tertinggal pada tahun 2024, hal ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam pengurangan desa tertinggal terjadi perbaikan kualitas hidup di seluruh desa. Selama kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak ada desa yang tercatat dalam kategori sangat tertinggal. Perubahan status desa dari tahun ke tahun menunjukkan terdapat kemajuan signifikan dalam pembangunan desa, dengan banyak desa yang

berhasil maju ke status mandiri dan maju, serta penurunan jumlah desa yang tertinggal.

Tabel. 3.30
 Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai
 Tahun 2024

No	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM 2024 Kecamatan	Status IDM Kecamatan 2024
1	Batui	0.8484	MANDIRI
2	Batui Selatan	0.8289	MANDIRI
3	Luwuk Selatan	0.8429	MANDIRI
4	Mantoh	0.8214	MANDIRI
5	Luwuk	0.8184	MANDIRI
6	Toili Barat	0.7923	Maju
7	Nambo	0.8108	Maju
8	Moilong	0.8115	Maju
9	Masama	0.7698	Maju
10	Toili	0.7772	Maju
11	Balantak Utara	0.7417	Maju
12	Balantak Selatan	0.7293	Maju
13	Kintom	0.7922	Maju
14	Pagimana	0.7454	Maju
15	Luwuk Timur	0.7202	Maju
16	Lobu	0.7164	Maju
17	Nuhon	0.7152	Maju
18	Bualemo	0.7202	Maju
19	Lamala	0.7304	Maju
20	Simpang Raya	0.6991	BERKEMBANG
21	Luwuk Utara	0.6992	BERKEMBANG
22	Bunta	0.6936	BERKEMBANG
23	Balantak	0.6677	BERKEMBANG

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan dari data hasil survey Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2024, Kabupaten Banggai memperoleh nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun sebesar 0.7504 berada pada status IDM kategori desa maju, sedangkan di tahun 2023 Indeks Desa Membangun sebesar 0,7280 juga berada pada kategori desa maju, tahun 2022, indeks desa membangun Kabupaten Banggai 0,7012 berada pada status IDM dengan kategori berkembang, jika dibandingkan antara tahun 2024, 2023 dan 2022 terjadi peningkatan status IDM Kecamatan kriteria “berkembang” menjadi Kecamatan dengan status IDM Kriteria “maju” bahkan terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan. Kenaikan indeks tersebut dikarenakan ditahun 2023 hanya terdapat 1 kecamatan yang masuk dalam

status IDM kategori “mandiri” sedangkan ditahun 2024 naik menjadi 5 kecamatan dengan status IDM kategori “mandiri”, 14 kecamatan masuk dalam kategori “maju” dan 4 Kecamatan masuk dalam kategori “berkembang”.

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai berada pada ranking ketiga setelah Kabupaten Donggala dan Morowali Utara dengan nilai IDM sebesar 0,7504, seperti pada tabel berikut :

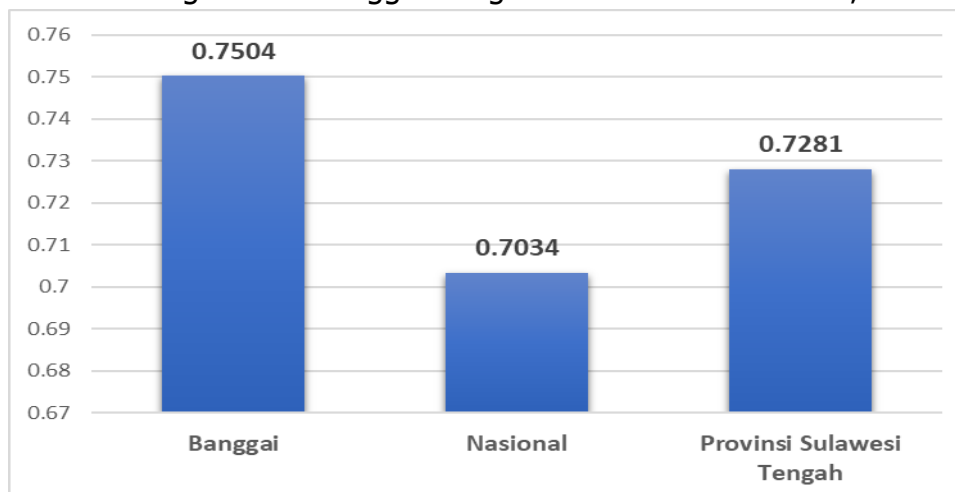
Tabel 3.31
Perbandingan IDM Banggai dengan Kabupaten/Kota,
Provinsi di Sulawesi Tengah dan IDM Nasional tahun 2024

Rank	Prov/Kab/Kota	Nilai Rata-rata IDM	Status IDM
	IDM Nasional	0.7034	BERKEMBANG
	Sulawesi Tengah	0.7281	MAJU
1	DONGGALA	0.7564	MAJU
2	MOROWALI UTARA	0.7538	MAJU
3	BANGGAI	0.7504	MAJU
4	POSO	0.7503	MAJU
5	MOROWALI	0.7285	MAJU
6	PARIGI MOUTONG	0.7284	MAJU
7	BUOL	0.7237	MAJU
8	TOLI TOLI	0.7157	MAJU
9	SIGI	0.7129	MAJU
10	BANGGAI KEPULAUAN	0.6972	BERKEMBANG
11	TOJO UNA UNA	0.6876	BERKEMBANG
12	BANGGAI LAUT	0.6775	BERKEMBANG

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai sebesar 0,7504 dengan status maju, masih lebih tinggi 0,002 point dari nilai IDM Sulawesi Tengah yaitu 0,7281 dengan status maju dan juga lebih tinggi 0,047 point dari nilai IDM Nasional sebesar 0,7034, yang dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.18
Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2024



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2024

Kemajuan dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan antara pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Kendala atau permasalahan yang terjadi dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten Banggai antara lain :

1. Ketergantungan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang rentan terhadap ancaman kerusakan ekosistem yang lebih parah akibat eksploitasi berlebihan dan bencana alam.
2. Kualitas infrastruktur yang belum memadai.
3. Kurangnya kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi .
4. Ketimpangan pembangunan antar desa sehingga menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
5. Keterbatasan akses teknologi informasi dan digitalisasi, serta kemampuan Masyarakat dalam menggunakan teknologi.
6. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Adapun solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Mengembangkan infrastruktur desa yang tahan terhadap bencana.
2. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi untuk meningkatkan akses informasi dan mempercepat pemasaran produk UMKM melalui platform digital.
3. Pembangunan infrastruktur yang terfokus pada kebutuhan dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung keberlanjutan program desa mandiri.
4. Pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan dan adat dalam manajemen organisasi, administrasi, dan tata kelola desa serta mendorong peran aktif lembaga dalam perencanaan dan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
5. Pemberdayaan ekonomi berbasis adat dan potensi lokal, dengan mengembangkan usaha berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan tangan, pertanian organik, atau ekowisata dan juga membangun koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh lembaga adat dan masyarakat setempat.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM", yaitu:

Tabel. 3.32
 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024
 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Penataan Desa	153.918.250,00	137.528.990,00	89,35
Peningkatan Kerjasama Desa	172.547.000,00	163.416.700,00	94,71
Administrasi Pemerintahan Desa	7.408.314.800,00	7.225.906.992,00	97,54
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.131.009.850,00	2.031.066.010,00	95,31
Jumlah	9.865.789.900,00	9.557.918.692,00	96,88

Sumber : DPMD Kab.Banggai, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi perdesaan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 75,50% dengan realisasi

anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 9.557.918.692,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.865.789.900,00 atau sebesar 96,88%.

Tabel. 3.33
Sasaran Strategis 4
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Persentase Infrastruktur dasar dan Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	%	72,50 Baik	60,20	83,03	75,00	69,12	92,16	80,00	86,4
Rata-rata capaian kinerja					83,03			92,16		86,4

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banggai, Tahun 2024 (data diolah)

Pencapaian atas sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas dengan indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%, terealisasi sebesar 69,12% dengan capaian sebesar 92,16%, belum memenuhi target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,92 point. Sedangkan perbandingan tahun akhir RPJMD tahun 2026 dengan target sebesar 80,00% belum mencapai target karena realisasi tahun 2024 baru sebesar 69,12%.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan pencapaian infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.34
Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2024

Infrastruktur Dasar dan wilayah	Realisasi
Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71, 28 %
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	87, 36 %
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	87,37 %
Bangunan Negara berfungsi baik	68,13 %

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	30,88 %
Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	58,79%
Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	80,00%
Rata-rata capaian	69,12%

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas mencerminkan tingkat pencapaian atau realisasi yang dicapai dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah deskripsi lebih lanjut atas pencapaian tersebut:

1. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (71,28%)

Sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Banggai memiliki saluran irigasi dengan total panjang 132,270 Kilomete, yang terbagi berupa Saluran Primer sepanjang 43,137 Kilometer, Saluran Sekunder sepanjang 89,133 Kilometer, Saluran



Pembuang Sepanjang 2,184 Kilometer. Sekitar 71,28% dari sistem irigasi yang ada di kabupaten ini berada dalam kondisi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan irigasi berfungsi dengan efektif, yang

sangat penting untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Meskipun 71,28 % irigasi dalam kondisi baik, masih ada sekitar 28,72% yang masih perlu diperbaiki. Pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi telah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah bekerja sama dengan Masyarakat, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan irigasi yang baik akan meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan.

2. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (87,36%)

Sebanyak 87,36% rumah tangga di Kabupaten Banggai telah memiliki akses terhadap air minum yang layak, yang berarti hampir sebagian besar masyarakat sudah memperoleh air bersih yang memenuhi standar kesehatan. Angka ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam penyediaan air minum yang aman bagi

masyarakat, namun masih ada sekitar 12,64% rumah tangga yang belum mendapatkan akses yang layak, yang perlu menjadi fokus kebijakan lebih lanjut.



3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman (87,37%)

Terdapat 87,37% rumah tangga di Kabupaten Banggai yang telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman, yang mencakup sistem pembuangan air limbah yang memadai dan tidak mencemari lingkungan. Ini adalah pencapaian yang signifikan dalam hal kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Namun, terdapat sekitar 12,63% rumah tangga yang belum memiliki akses ke sanitasi yang layak, yang harus segera diatasi untuk mencegah masalah kesehatan.

4. Bangunan Negara Berfungsi Baik (68,13%)

Terdapat 68,13% bangunan negara berfungsi dengan baik, yang berarti banyak bangunan pemerintah atau fasilitas publik yang memerlukan pemeliharaan dan renovasi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa masih perlunya perhatian yang cukup besar untuk meningkatkan kondisi bangunan negara, karena hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas layanan publik dan citra pemerintah.

5. Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (30,88%)

Terdapat 30,88% jalan kabupaten yang berada dalam kondisi mantap atau baik. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang buruk atau perlu perbaikan. Kondisi jalan yang buruk sangat berpengaruh pada aksesibilitas dan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan layanan. Peningkatan infrastruktur jalan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.

6. Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi (58,79%)

Terdapat 58,79% pelaku jasa konstruksi di daerah ini memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kontraktor dan pekerja konstruksi sudah memiliki kualifikasi yang memadai. Meskipun lebih dari separuh pelaku jasa konstruksi sudah memenuhi standar kompetensi, hampir 41,21% masih belum memenuhi syarat. Ini menandakan perlunya pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat dalam sektor konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pembangunan.

7. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang (80,00%)

Kabupaten Banggai dengan posisinya yang strategis, serta kondisi alamnya yang relatif nyaman tak luput dari permasalahan pembangunan perkotaan.



Salah satu penyebabnya adalah rencana pembangunan yang dibuat, tidak jarang mengalami ketidaksesuaian dengan pemanfaatan ruangnya. Oleh karena itu pembangunan suatu daerah perlu adanya kesesuaian

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebanyak 80% pemanfaatan ruang di wilayah ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang berarti sebagian besar pengembangan lahan dan pemukiman sudah terencana dengan baik. Kesesuaian dengan rencana tata ruang penting untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan untuk memastikan pengembangan wilayah yang teratur. Namun, ada 20% pemanfaatan ruang yang belum sesuai, yang perlu menjadi perhatian dalam penataan dan pengawasan pembangunan.

Rata-rata pencapaian dari seluruh indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik adalah 69,12%, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur di Kabupaten Banggai. Meskipun ada beberapa area dengan pencapaian tinggi

(seperti akses air minum dan sanitasi), namun terdapat juga area yang menunjukkan pencapaian rendah (seperti kondisi jalan kabupaten). Pencapaian rata-rata ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan infrastruktur dasar yang masih kurang optimal.

Berikut beberapa kendala yang di hadapi dalam meningkatkan persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik:

1. Karakteristik geografis yang beragam merupakan daerah pegunungan, Lembah dan pesisir sehingga kondisi ini membuat Pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit terutama di daerah terpencil.
2. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah, menjadi kendala utama sehingga membatasi skala dan kualitas Pembangunan yang dapat dilakukan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.
4. Kurangnya partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar tercipta rasa memiliki dan dukungan yang kuat.
5. Adanya perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan, dapat merusak infrastruktur yang ada dan menghambat pembangunan infrastruktur baru.

Solusi yang bisa diterapkan untuk peningkatan pencapaian persentase infrastruktur dasar dan wilayah dalam kondisi baik:

1. Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk pembangunan infrastruktur seperti dengan memprioritaskan jalan yang rusak parah dengan mengidentifikasi jalan yang paling vital dan banyak digunakan, serta memprioritaskan pemeliharaan/renovasi terhadap bangunan dengan fungsi vital (rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah).
2. Menjalinkan kerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pelaku konstruksi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam bidang konstruksi dan teknik.
4. Mendorong partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi dan sosialisasi.
5. Melakukan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim.

6. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku pembangunan mengenai pentingnya mematuhi rencana tata ruang untuk mencegah penyalahgunaan lahan.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas”, yaitu:

Tabel. 3.35
 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024
 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	45.197.495.543,00	41.825.132.385,00	92,54
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	34.079.017.979,00	29.518.176.821,00	86,62
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.314.241.016,00	4.931.821.610,00	92,80
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.214.973.319,00	5.126.229.855,00	98,30
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	34.377.295.823,00	32.459.980.461,00	94,42
Penataan Bangunan Gedung	95.208.453.729,00	80.355.312.548,00	84,40
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	27.098.430.544,00	23.510.550.484,00	86,76
Penyelenggaraan Jalan	175.420.811.915,00	172.879.820.109,00	98,55
Pengembangan Jasa Konstruksi	1.709.705.150,00	752.870.269,00	44,04
Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.563.584.925,00	3.955.738.288,00	86,68
Pengembangan Perumahan	306.236.700,00	305.030.700,00	99,61
Kawasan Permukiman	3.105.705.813,00	3.069.563.200,00	98,84
Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11.984.112.852,00	10.924.585.965,00	91,16
Penyelesaian Sengketa	60.478.500,00	57.543.400,00	95,15

Tanah Garapan			
Pengelolaan Tanah Kosong	17.503.200,00	15.811.200,00	90,33
Penatagunaan Tanah	72.018.300,00	69.997.060,00	97,19
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.443.089.783,00	14.431.712.800,00	93,61
Pengelolaan Pelayaran	277.007.000,00	266.289.760,00	96,13
Informasi dan Komunikasi Publik	1.613.053.400,00	1.465.534.763,00	90,85
Aplikasi Informatika	18.039.498.537,00	17.809.901.051,00	98,73
Jumlah	479.102.714.028,00	443.731.602.729,00	92,62

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, DKISP Kab.Banggai, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 92,16% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 443.731.602.729,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 479.102.714.028,00 atau sebesar 92,62%.

Tabel. 3.36
Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	Rendah	Rendah	82,5	Rendah	Rendah (0,37)	92,5	Sedang	46,25
Rata-rata capaian kinerja					82,50			92,50		46,25

Sumber : BPBD Kab.Banggai, 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tangguh atau kuat suatu daerah dalam menghadapi tantangan, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan faktor lainnya. Nilai indeks ketahanan daerah ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk tahun 2024 memperoleh nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,37 dengan kategori Rendah dengan capaian kinerja sebesar 92,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 naik 0,04 point dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,33. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD belum mencapai target yang diinginkan yaitu kategori sedang.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu dengan mengisi kuisisioner 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. 7 prioritas tersebut terdiri dari :

- Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
- Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Tabel 3.37
 Nilai IKD dan IRB Tahun 2024
 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah 2024	Indeks Resiko Bencana 2024
Banggai Kepulauan	0,35	159,41

Banggai	0,37	156,37
Morowali	0,34	171,17
Poso	0,45	120,90
Donggala	0,35	165,14
Toli-Toli	0,48	127,32
Buol	0,21	149,60
Parigi Moutong	0,67	93,53
Tojo Una-Una	Tidak menilai	137,60
Sigi	0,47	48,71
Banggai Laut	0,22	163,20
Morowali Utara	0,30	174,82
Kota Palu	0,73	116,55

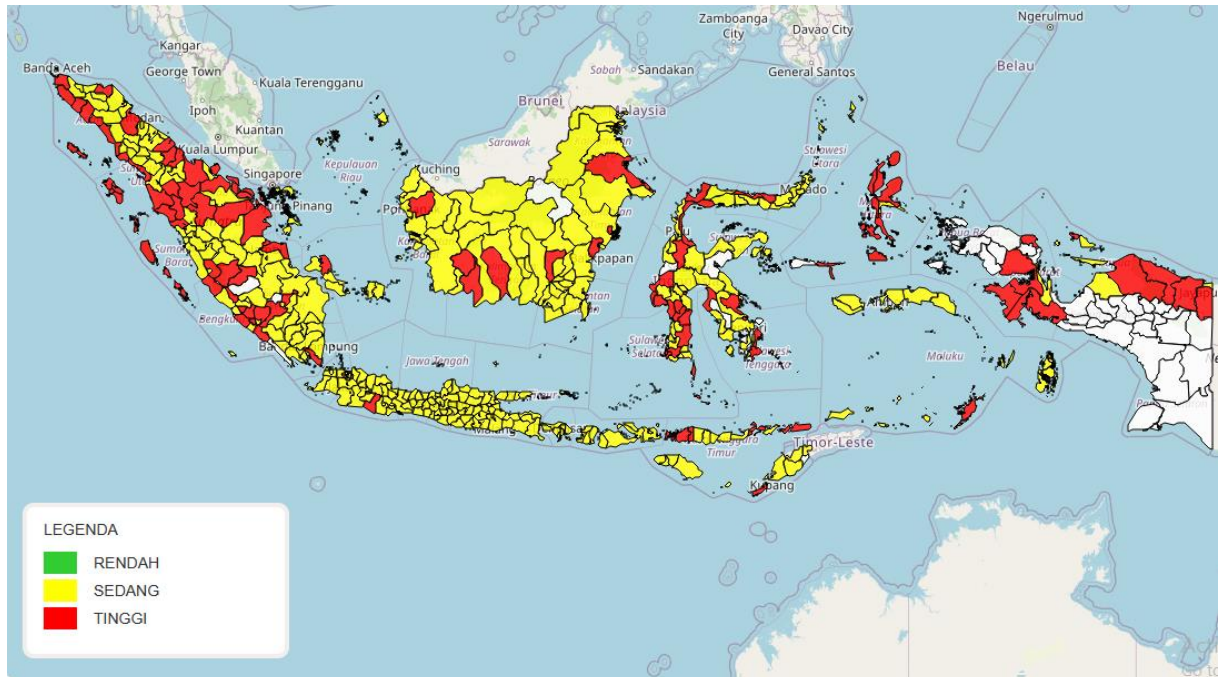
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antara ketahanan daerah dan tingkat risiko bencana di berbagai kabupaten/kota. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih baik. Nilai Tertinggi yaitu Kota Palu (0,73) memiliki nilai Indeks Ketahanan Daerah tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Indeks ketahanan daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 dengan Nilai 0,37 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki tingkat ketahanan yang relatif rendah atau sangat rentan, meskipun tidak berada di posisi terendah. Dengan nilai 0,37 menunjukan Kabupaten Banggai menghadapi tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur yang kuat dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Hal ini dapat mencakup masalah dalam ketersediaan fasilitas dasar, ketahanan ekonomi, serta akses terhadap layanan publik. Kabupaten Banggai masih perlu meningkatkan sistem dan kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan daerah, baik dalam menghadapi bencana alam, perubahan iklim, atau krisis sosial dan ekonomi.

Gambar 3.3

Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024



Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Indeks Resiko Bencana menunjukkan potensi tingkat risiko bencana yang dihadapi daerah. Nilai 156,37 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki risiko bencana yang cukup tinggi, meskipun tidak berada pada nilai tertinggi di antara kabupaten/kota. Nilai yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki tingkat kerentanannya terhadap bencana alam yang cukup besar. Bencana yang bisa terjadi antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, atau longsor, mengingat letak geografis dan kondisi alamnya. Karena itu Kabupaten Banggai perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas dalam merespon bencana, seperti pelatihan untuk masyarakat, perencanaan infrastruktur tahan bencana, serta sistem peringatan dini, sangat penting untuk mengurangi dampak dari bencana yang dapat terjadi.

Tabel 3.38
Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Banggai, Per Kecamatan
Menurut BNPB 2024

Kecamatan Subdistrict	Letusan Gunung Api ¹ Volcanic Eruption ¹	Tsunami ¹ Tsunami ¹	Tanah Longsor ¹ Landslide ¹	Banjir ¹ Floods ¹	Kekeringan ¹ Drought ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Toili	–	–	–	2	1
Toili Barat	–	–	–	1	1
Moilong	–	–	–	8	1
Toili Jaya	–	–	–	–	–
Batui	–	–	–	–	–
Batui Selatan	–	–	1	3	–
Bunta	–	–	–	5	–
Nuhon	–	–	–	6	–
Simpang Raya	–	–	–	2	–
Kintom	–	–	–	6	–
Luwuk	–	–	–	–	–
Luwuk Timur	–	–	–	1	–
Luwuk Utara	–	–	2	–	–
Luwuk Selatan	–	–	2	1	–
Nambo	–	–	–	3	–
Pagimana	–	–	–	2	–
Bualemo	–	–	–	–	–
Lobu	–	–	–	2	–
Lamala	–	–	–	–	–
Masama	–	–	–	–	–
Mantoh	–	–	–	–	–
Balantak	–	–	–	2	–
Balantak Selatan	–	–	–	–	–
Balantak Utara	–	–	–	–	–
Banggai	–	–	5	44	3

Kecamatan Subdistrict	Kebakaran Hutan dan Lahan ¹ Forest and Land Fires ¹	Angin Puting Beliung ¹ Tornado ¹	Gelombang Pasang ¹ Tidal Wave ¹	Abrasi ¹ Abrasion ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toili	–	–	–	–
Toili Barat	–	–	–	–
Moilong	–	–	–	–
Toili Jaya	–	–	–	–
Batui	–	–	–	1
Batui Selatan	–	–	–	–
Bunta	–	–	–	–
Nuhon	–	–	–	–
Simpang Raya	–	–	–	–
Kintom	1	–	–	–
Luwuk	–	–	–	1
Luwuk Timur	1	–	–	–
Luwuk Utara	1	–	–	–
Luwuk Selatan	1	–	–	–
Nambo	–	–	–	1
Pagimana	–	–	–	–
Bualemo	–	–	–	–
Lobu	–	–	–	–
Lamala	–	1	–	–
Masama	–	–	–	–
Mantoh	–	–	–	–
Balantak	–	–	–	1
Balantak Selatan	–	–	–	–
Balantak Utara	–	–	–	–
Banggai	4	1	–	4

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (Banggai dalam angka 2025)

Bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir, dengan total 44 kejadian di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan jumlah kejadian banjir tertinggi adalah Moilong (8 kejadian), Nuhon (6 kejadian), Simpang Raya (6 kejadian), dan Bunta (5 kejadian). Tanah longsor terjadi sebanyak 5 kali, tersebar di Kecamatan Batui Selatan (1), Luwuk Utara (2), dan Luwuk Selatan (2). Kekeringan terjadi sebanyak 3 kali, dengan distribusi di Toili, Toili Barat, dan Moilong. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 4 kali, dengan insiden di Kecamatan Kintom, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, dan Lamala. Angin puting beliung hanya terjadi 1 kali, di Kecamatan Lamala. Gelombang pasang terjadi 4 kali, di Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Nambo, dan Balantak Selatan. Abrasi terjadi 4 kali, di Kecamatan Moilong, Luwuk, Luwuk Timur, dan Lobu. Tidak ada kejadian letusan gunung api maupun tsunami yang tercatat.

Kecamatan dengan jumlah kejadian bencana terbanyak adalah Moilong, dengan total 10 kejadian (8 banjir dan 1 kekeringan serta 1 abrasi). Kecamatan lainnya yang cukup terdampak adalah Nuhon, Simpang Raya, dan Bunta, dengan masing-masing mengalami 5 hingga 6 kejadian bencana, didominasi oleh banjir. Beberapa kecamatan relatif lebih aman, seperti Batui, Pagimana, Bualemo, Masama, Mantoh, yang mengalami sedikit atau tidak ada kejadian bencana sama sekali. Kecamatan dengan tingkat kejadian bencana tinggi, seperti Moilong, Nuhon, Simpang Raya, dan Bunta, dengan seringnya terjadi bencana dapat mengindikasikan tingkat kerentanan yang tinggi dan kapasitas mitigasi yang perlu ditingkatkan. Sedangkan kecamatan dengan sedikit atau tanpa kejadian bencana menunjukkan kondisi geografis yang lebih stabil atau sistem mitigasi bencana yang lebih efektif. Jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir dan tanah longsor, menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur drainase, reboisasi, serta mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi dampaknya.

Dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Banggai, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kendala-Kendala yang dihadapi:

1. Tingginya Risiko Bencana Alam

Kabupaten Banggai sering mengalami banjir (44 kejadian), tanah longsor (5 kejadian), dan kekeringan (3 kejadian), yang berdampak pada ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Keterbatasan Infrastruktur Mitigasi Bencana

Sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan genangan air dan memperparah banjir di wilayah rawan.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Kekurangan tenaga ahli dalam manajemen kebencanaan dan pemetaan risiko.

4. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap mitigasi bencana

5. Perubahan Iklim yang memperburuk kondisi

Perubahan pola hujan dan peningkatan suhu global memperparah kejadian banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana
 - Pembangunan dan rehabilitasi drainase di daerah rawan banjir.
 - Pembangunan tanggul dan penguatan garis pantai untuk mencegah abrasi di daerah pesisir.
 - Reboisasi dan penghijauan kembali kawasan rawan longsor.
2. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Edukasi Mitigasi Bencana
 - Sosialisasi dan simulasi bencana secara rutin, bekerja sama dengan BNPB dan BPBD.
 - Pelatihan relawan bencana di tingkat desa agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.
 - Penyediaan jalur evakuasi yang jelas dan pemasangan rambu-rambu keselamatan.
3. Optimalisasi Sumber Daya
Peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang kebencanaan melalui pelatihan dan rekrutmen.
4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
 - Program konservasi air untuk mengatasi kekeringan.
 - Pengurangan emisi karbon melalui program energi terbarukan dan efisiensi penggunaan lahan.
5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
 - Peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang dapat meningkatkan risiko bencana.
 - Penerapan sanksi bagi pelaku penebangan pohon ilegal untuk mencegah tanah longsor dan banjir.
 - Penerapan kebijakan tata ruang yang berbasis risiko bencana untuk memastikan pembangunan yang lebih aman.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana kepada masyarakat.



2. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi relawan



Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

3. Penguatan Kelembagaan Bencana diwujudkan dengan pembentukan desa tangguh bencana di Desa Toima Kecamatan Bunta



Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana”, sebagai berikut :

Tabel 3.39

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.252.471.700,00	2.156.700.805,00	95,75
Penanggulangan Bencana	3.600.560.675,00	2.805.199.436,00	77,91
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.913.285.731,00	2.855.068.363,00	72,95
Jumlah	9.766.318.106,00	7.816.968.604,00	80,04

Sumber : SatPolPP Kab.Banggai, BPBD Kab. Banggai, Dinas Damkar Kab.Banggai, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 92,50% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 7.816.968.604,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.766.318.106,00 atau sebesar 80,04%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 115,57%, dan tingkat efisiensi sebesar 12,46%.

Tabel. 3.40

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	%	33,92%	40,6	119,69	34,61	40,19	116,12	35,99	111,67
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,17%	85,72	98,34	88,67	85,14	96,02	90,00	94,6
Rata-rata capaian kinerja				109,02			106,07		103,14	

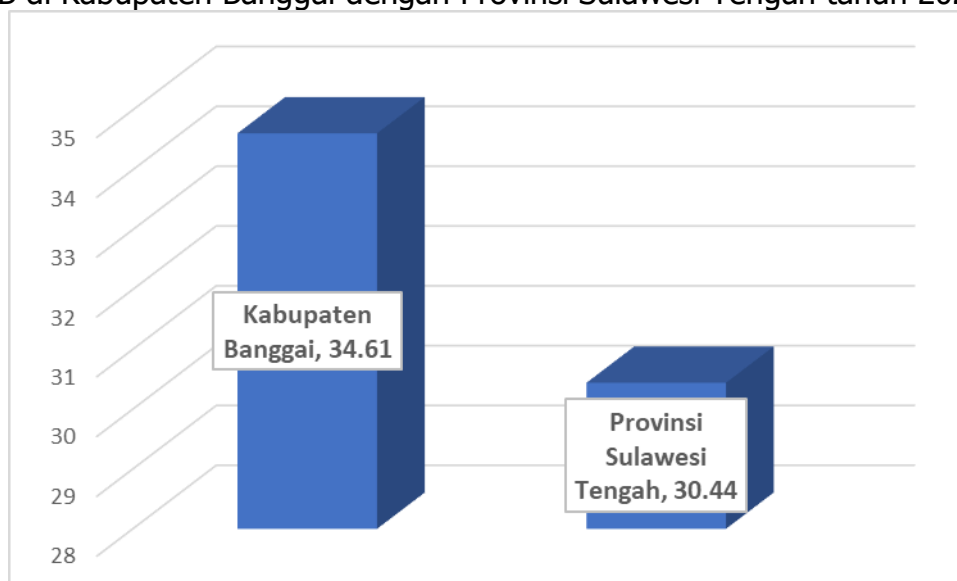
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, BKP Kementan, 2024

Pencapaian atas sasaran meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kelautan serta pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah terhadap kedua indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 106,07% dengan kategori "Sangat baik". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,14% dengan kategori "sangat baik".

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 sebesar 34,61% dan terealisasi sebesar 40,19%, dengan capaian kinerja sebesar 116,12%, dapat dikatakan melebihi target yang ditetapkan tahun 2024. Jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 40,6 maka terjadi penurunan sebesar 0,41 point di tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 35,99 diperoleh capaian sebesar 111,67%. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 lebih tinggi sebesar 4,17 point dari realisasi 30,44.

Grafik 3.19
Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2024

Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB diperoleh dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,72% dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,47%.

Tabel 3.41
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Kabupaten Banggai memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Struktur ekonomi yang berbeda menyebabkan kontribusi sektor ini lebih besar di Banggai dibandingkan rata-rata provinsi.

Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, dari keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98% merupakan daerah dengan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Secara keseluruhan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi salah satu motor utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai. Perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi besar melalui ekspor dan industri olahan, sementara tanaman pangan dan hortikultura berperan penting dalam ketahanan pangan. Peternakan mengalami pertumbuhan pesat dengan peningkatan produksi daging dan telur. Dengan adanya kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pengembangan sektor ini, diharapkan kontribusi terhadap PDRB semakin meningkat serta menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Tabel 3.42
Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan
di Kabupaten Banggai

Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
Jagung	Bawang Merah	Kelapa Sawit	a. Ternak Besar	a. Perikanan
Ubi Kayu	Cabai Besar	Kelapa	meliputi :	Tangkap meliputi :
Ubi Jalar	Kentang	Cengkeh	▪ Sapi	▪ Ikan Cakalang
Kacang	Bawang Putih	Kopi	▪ Kerbau	▪ Tongkol
Tanah	Petsai	Kakao	▪ Kuda	▪ Tuna
Kacang Hijau	Tomat	Jambu Mente	b. Ternak Kecil	▪ Udang
		Kapuk	meliputi :	b. Perikanan
		Tembakau	▪ Kambing	Budidaya meliputi :
		Kemiri	▪ Domba	▪ Jaring apung laut
		Sagu	▪ Babi	▪ Jaring apung tawar
		Pala		▪ Jarring tangkap tawar
		Lada		▪ Keramba
				▪ Kolam air deras
				▪ Kolam air tenang
				▪ Minapadi sawah
				▪ Rumput Laut
				▪ Tambak intensif
				▪ Tambak sederhana
				▪ Tambak semi intensi

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2024)

Tabel 3.43
Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan
Tahun 2024

Produksi dan Produktivitas	Jumlah
Produksi Tanaman Pangan per hektar per tahun	260,750.00 ton
Produktivitas Tanaman Pangan per hektar per tahun	4.71 ton/ha
Produksi Tanaman Hortikultura per hektar per tahun	1.146.41 ton
Produktivitas Tanaman Hortikultura per hektar per tahun	7.10 ton/ha
Produksi Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	71,820.91 ton
Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	0.99 ton/ha

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2024

Pencapaian hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan disebabkan oleh dukungan yang intens oleh dinas terkait yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melakukan pembinaan terhadap petani dan pelaku usaha disektor pertanian, khususnya dibidang tanaman pangan dan tanaman perkebunan.

Pencapaian hasil Produksi dan produktivitas tanaman hortikultura mengalami kendala yang disebabkan karena cuaca ekstrime dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar tanaman hortikultura, khususnya jenis tanaman buah-buahan terjadi gugur bunga dan gagal panen yang pada akhirnya mengakibatkan produksi mengalami penurunan. Akan tetapi terjadi peningkatan yang signifikan terutama komoditi sayur-sayuran untuk kegiatan pengembangan kampung sayur dalam rangka mendukung program satu juta satu pekarangan.

Tanaman Pangan adalah sektor yang paling efisien dan berhasil mencapai produksi dan produktivitas yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Namun dari sisi produksi tanaman pangan mengalami penurunan pada tahun 2024, hal ini disebabkan karena sebagian kecil tanaman pangan khususnya tanaman kedelai yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh faktor iklim dan serangan hama penyakit tanaman.

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

1. Tanaman Pangan

Usaha Tanaman Pangan dari tahun ke tahun tetap mengalami perkembangan, hal ini di tunjang oleh program pemerintah yaitu melalui program intensifikasi yang bertujuan mendorong para petani agar melakukan usaha pertanian dengan berpedoman pada Panca Usaha Tani, yaitu menggunakan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama dan pengairan serta cara bercocok tanam baik. disamping usaha intensifikasi juga dilakukan program ekstensifikasi melalui perluasan areal-areal pertanian.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Banggai menggenjot produksi tanaman pangan seperti beras, jagung dan kedelai. Khusus untuk produksi beras, Kabupaten Banggai mengalami surplus, sehingga beras yang ada mampu disuplai ke beberapa daerah sekitar Kabupaten Banggai seperti Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali dan Morowali Utara, bahkan sampai ke Provinsi Gorontalo, Manado juga Pulau Taliabu. Hal ini di tunjang dengan memiliki sekitar 27.367 hektar areal persawahan yang tersebar di 24 Kecamatan di Kabupaten Banggai, dan yaang terbesar di Kecamatan Toili Barat yakni 6007 hektar. Untuk tetap mempertahankan produksi pangan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tengah mengupayakan bantuan alat produksi dan pasca panen.

Adapun jenis tanaman pangan di Kabupaten Banggai yaitu: Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau.

Tabel 3.44
Jumlah Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banggai tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)
1	Jagung	42.350,17
2	Kedelai	2.200,80
3	Kacang Tanah	101,60
4	Kacang Hijau	156,10
5	Ubi Kayu	765,00
6	Ubi Jalar	408,50

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (Banggai Dalam Angka Tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi jagung memiliki jumlah produksi terbesar pada tahun 2024 yaitu sebesar 42.350,17 Ton, dan paling sedikit yaitu produksi kacang tanah yaitu sebesar 101,60 ton.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pangan di Kabupaten Banggai:

1. Perubahan iklim dan kondisi cuaca. Kekeringan atau curah hujan yang tidak terprediksi menyebabkan penurunan hasil.

2. Serangan hama dan penyakit dapat mengurangi hasil produksi.
3. Keterbatasan Sapropdi (sarana produksi) mulai dari benih unggul, pupuk, pestisida dan alsintan.

Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pangan di Kabupaten Banggai :

1. Mengajak petani untuk memperbanyak/mengembangkan variasi tanaman pangan yang ditanam agar tidak bergantung pada satu komoditas dan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan iklim.
2. Peningkatan penyuluhan kepada petani mengenai pengendalian hama dan penyakit, serta penyediaan akses ke pestisida ramah lingkungan dan metode organik untuk mengurangi kerugian akibat serangan hama.dan metode organik untuk mengurangi kerugian akibat serangan hama..
3. Memfasilitasi pelatihan untuk petani mengenai teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan benih unggul, sistem irigasi yang efisien, dan alat pertanian canggih yang dapat meningkatkan hasil produksi.
4. Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida dan alsintan agar produksi pangan bertambah dan kualitasnya bisa menembus pasar modern.

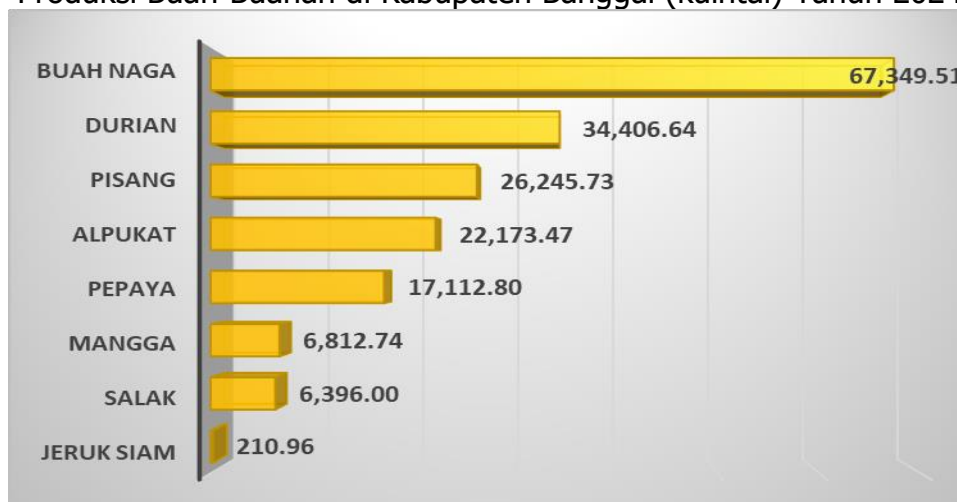
2. Hortikultura

Hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin, *hortus* yang mengandung arti kebun dan *culture* yang berarti bercocok tanam. Tanaman hortikultura adalah sebuah cara atau metode budidaya pertanian modern, atau kegiatan bercocok tanam seperti sayuran, buah ataupun tanaman hias yang menggunakan lahan dari kebun atau pekarangan rumah sebagai tempatnya. Tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Banggai terdiri dari bawang, merah, cabai besar, kentang, kubis, bawang putih, petsai, dan tomat. melihat jenisnya tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Banggai cukup bervariasi, ini menandai pengetahuan masyarakat akan sayur-sayuran cukup baik.

Berikut Data produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Banggai selama tahun 2024:

- Produksi Buah-Buahan

Grafik 3.20
Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Banggai (kuintal) Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Berdasarkan data produksi buah-buahan di Kabupaten Banggai pada tahun 2024, buah naga mencatatkan produksi tertinggi dengan 67,349.51 kuintal, diikuti oleh durian dan pisang yang masing-masing memiliki produksi signifikan, yaitu 34,406.64 kuintal dan 26,245.73 kuintal. Buah-buahan ini menunjukkan dominasi dalam sektor pertanian Kabupaten Banggai. Sementara itu, jeruk siam menempati posisi dengan produksi terendah, hanya 210,96 kuintal, yang menunjukkan bahwa jeruk siam memiliki pasar yang lebih terbatas atau tantangan dalam budidaya. Secara keseluruhan, buah-buahan tropis seperti durian, pisang, dan buah naga menjadi komoditas unggulan di daerah ini, dengan buah naga menjadi yang paling menonjol.

Adapun jumlah produksi hortikultura Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagai berikut :

- Produksi Sayur-sayuran Tahunan berupa :
 - Melinjo (7,00 kuintal)
 - Petai (1.484,40 kuintal)
- Produksi Tanaman Biofarmaka, berupa:
 - Jahe (54.505 kg)
 - Jeruk Nipis (128.115 kg)
 - Kencur (115.394 (kg)
- Produksi Tanaman Sayurandan Buah-buahan Semusim, berupa :
 - Bawang Daun (255,80 kuintal)
 - Bawang Merah (2.559,75 kuintal)
 - Bayam (117,20 kuintal)
 - Buncis (141,00 kuintal)
 - Cabai Besar (26,00 kuintal)
 - Cabai Keriting (1.317,70 kuintal)
 - Cabai Rawit (4.520,63 kuintal)
 - Kacang Panjang (855,25 kuintal)

- Kunyit (43.787 kg)
- Laos (2.837 kg)
- MahkotaD Ewa (960 kg)
- Temuireng (71 kg)
- Temukunci (15 kg)
- Temulawak (21 kg)
- Serai (46.677 kg)
- Kangkung (276,30 kuintal)
- Ketimun (367,40 kuintal)
- Kubis (33,00 kuintal)
- Labu Siam (713,00 kuintal)
- Petsai (128,10 kuintal)
- Terung (1.214,80 kuintal)
- Tomat (2.543,60 kuintal)
- Wortel (20,32 kuintal)
- Semangka (3.183 kuintal)

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura di Kabupaten Banggai:

1. Sektor hortikultura sering kali menghadapi tantangan dalam distribusi hasil panen dan sistem pemasaran yang efisien.
2. Kualitas benih dan penggunaan pupuk yang tidak sesuai atau kurang optimal dapat menyebabkan penurunan hasil tanaman hortikultura.
3. Ketergantungan pada harga pasar yang fluktuatif dapat membuat petani hortikultura tidak stabil dalam pendapatan. Selain itu, permintaan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi produksi.

Solusi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura di Kabupaten Banggai:

1. Meningkatkan aksesibilitas pasar dengan membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan pasar yang terorganisir dengan baik untuk hasil-hasil hortikultura.
2. Menyediakan pelatihan kepada petani tentang pemilihan benih yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, serta teknik budidaya yang efisien untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk.
3. Mendorong petani untuk membangun hubungan langsung dengan pasar atau toko grosir sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada perantara.

4. Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi yang penting bagi PDRB di Kabupaten Banggai, karena tidak saja merupakan sumber penghasilan disektor pertanian, tetapi dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak dalam rangkaian kegiatan produksinya termasuk perusahaan dan pemasarannya. Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Banggai di dominasi oleh kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi, kakao, jambu mente, kapuk, tembakau, kemiri, sagu, pala dan lada.

Produksi perkebunan rakyat berdasarkan jenis tanaman di Kabupaten Banggai dari tahun 2020 hingga 2024 (masih menggunakan data perkiraan untuk tahun 2024). Data terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Tanaman tahunan (Perennial crops) yaitu Tanaman yang dapat dipanen dalam jangka panjang tanpa perlu ditanam kembali setiap tahun. dan tanaman semusim (Seasonal crops) yaitu tanaman yang membutuhkan penanaman ulang setiap musim tanam.

Produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Banggai didominasi oleh kelapa, kakao, dan kopi sebagai komoditas utama. Kelapa menunjukkan produksi tertinggi dan terus meningkat, sementara kelapa sawit mengalami lonjakan besar pada 2024. Beberapa komoditas seperti cengkeh, pala, dan sagu juga mengalami pertumbuhan. Namun, beberapa tanaman seperti karet, teh, dan tebu tidak memiliki data produksi terbaru, yang bisa mengindikasikan pergeseran fokus pertanian. Secara keseluruhan, sektor perkebunan memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi daerah dan berpotensi terus meningkat produksinya.

Tabel 3.45
Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Jenis Tanaman <i>Type of Crops</i>	2020	2021	2022	2023	2024*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman tahunan <i>Perennial crops</i>					
Kelapa sawit/ <i>Oil palm</i>	482,0	—	35.540,9
Kelapa/ <i>Coconut</i>	4.562,0	50.760,0	53.421,6
Karet/ <i>Rubber</i>	1.216,0	—	—
Kopi/ <i>Coffee</i>	452,0	361,4	396,0
Kakao/ <i>Cocoa</i>	626,0	15.975,9	16.300,1
Teh/ <i>Tea</i>	507,9	—	—
Cengkeh/ <i>Clove</i>	482,0	1.270,2	1.451,9
Jambu mete/ <i>Cashew</i>	528,4	1.170,3	1.170,3
Pala/ <i>Nutmeg</i>	324,0	112,3	239,3
Sagu/ <i>Sago</i>	—	—	191,9
Tanaman semusim <i>Seasonal crops</i>					
Tebu/ <i>Sugar cane</i>	314,6	—	—
Tembakau/ <i>Tobacco</i>	595,8	12,3	12,3

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (*Banggai Dalam Angka Tahun 2025*)

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan di Kabupaten Banggai:

1. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman perkebunan.
2. Infrastruktur perkebunan seperti irigasi dan jalan usaha tani belum seluruhnya dalam kondisi baik dan fungsional.
3. Perubahan Iklim dan Kerusakan Alam: Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir atau kekeringan, dapat mengganggu hasil tanaman perkebunan, karena tanaman perkebunan membutuhkan iklim yang stabil dan kondisi lingkungan yang baik.

Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan di Kabupaten Banggai:

1. Meningkatkan penggunaan pestisida nabati dan sistem pertanian berkelanjutan.
2. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian untuk meningkatkan akses dan ketersediaan air bagi perkebunan.
3. Mengedukasi petani mengenai teknik mitigasi dampak perubahan iklim seperti penggunaan varietas tahan kekeringan dan sistem irigasi hemat air.
4. Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang teknik budidaya yang lebih baik, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efisien untuk meningkatkan hasil.
5. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan memastikan distribusi alat, benih, dan pupuk tepat sasaran, Peningkatan koordinasi dengan kelompok tani agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sarana pertanian.

Peternakan

Adapun jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Banggai diklasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu:

1. Ternak besar meliputi : sapi, kerbau, kuda
2. Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi
3. Ternak unggas: meliputi ayam kampung, ayam ras, dan itik.

Tabel 3.46
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten
Banggai Tahun 2024

Kecamatan District	Sapi* Cow*	Kambing* Goat*	Babi* Pig*
(1)	(2)	(3)	(4)
Toili	16.560	6.535	1.105
Toili Barat	81.652	9.007	56.677
Moilong	4.488	984	68
Toili Jaya	16.405	5.419	9.400
Batui	9.291	2.521	521
Batui Selatan	1.961	1.315	1.128
Bunta	6.000	620	455
Nuhon	12.367	1.305	2.502
Simpang Raya	8.620	3.324	7.520
Kintom	15.523	7.807	3.500
Luwuk	1.533	4.169	-
Luwuk Timur	13.205	8.073	3.412
Luwuk Utara	10.618	9.006	402
Luwuk Selatan	5.035	3.800	-
Nambo	5.327	2.663	-
Pagimana	22.428	4.685	3.041
Bualemo	181.295	61.717	6.328
Lobu	4.864	1.244	984
Lamala	3.820	1.393	1.797
Masama	12.079	818	3.213
Mantoh	2.310	360	4.314
Balantak	9.345	1.055	990
Balantak Selatan	7.582	1.888	3.351
Balantak Utara	8.305	1.722	12
Banggai	460.613	141.430	110.720

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (Banggai dalam angka tahun 2025)

Sektor peternakan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam menunjang pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Banggai memiliki potensi besar dalam bidang peternakan, yang dapat dilihat dari jumlah populasi ternak sapi, kambing, dan babi yang tersebar di berbagai kecamatan. Sapi merupakan ternak dengan populasi tertinggi di Kabupaten Banggai, dengan total 460.613 ekor. Kecamatan dengan populasi sapi terbesar yaitu, Bualemo (181.295 ekor), Toili Barat (81.652 ekor), Pagimana (22.428 ekor). Sementara itu, kecamatan dengan populasi sapi terendah adalah Luwuk (1.533 ekor) dan Batui Selatan (1.961 ekor). Kecamatan-kecamatan dengan

populasi sapi yang tinggi karena memiliki lahan luas yang cocok untuk padang penggembalaan dan peternakan intensif.

Ternak Kambing merupakan ternak dengan populasi terbesar kedua, mencapai 141.430 ekor. Kecamatan dengan populasi kambing tertinggi adalah Bualemo (61.717 ekor), Toili Barat (9.007 ekor), Luwuk Timur (8.073 ekor). Kecamatan dengan populasi kambing terendah adalah Mantoh (360 ekor) dan Masama (818 ekor). Peternakan kambing umumnya lebih fleksibel dibandingkan sapi, sehingga dapat berkembang di daerah dengan lahan terbatas.

Ternak Babi memiliki populasi total 110.720 ekor, dengan distribusi yang lebih terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu. Kecamatan dengan populasi babi terbesar adalah Toili Barat (56.677 ekor), Toili Jaya (9.400 ekor), Simpang Raya (7.520 ekor). Sebaliknya, beberapa kecamatan memiliki populasi babi yang sangat rendah atau bahkan nol, seperti Luwuk, Luwuk Selatan, dan Nambo. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya, kebijakan lokal, atau permintaan pasar yang lebih rendah di wilayah tersebut.

Tabel 3.47
Produksi daging Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (KG)
di Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024

Jenis	2023	2024*
Sapi	190.676	786.998
Kambing	6.135	-
Babi	32.428	-

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (Banggai dalam angka 2025)

Pada tabel diatas menunjukkan data produksi daging ternak besar di Kabupaten Banggai selama dua tahun, yaitu tahun 2023 dan perkiraan untuk tahun 2024. Produksi daging yang dicatat mencakup tiga jenis ternak utama, yaitu sapi, kambing, dan babi. Pada tahun 2023, jumlah produksi daging sapi di Kabupaten Banggai mencapai 190.676 kg. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan produksi mencapai 786.998 kg, atau naik sebesar 312,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan produksi ini menunjukkan peningkatan jumlah pemotongan sapi atau adanya program intensifikasi peternakan yang sukses. Pada tahun 2023, produksi daging kambing tercatat sebanyak 6.135 kg. Data produksi

untuk tahun 2024 belum tersedia, sehingga tidak dapat dianalisis apakah terjadi kenaikan atau penurunan produksi. Produksi Daging Babi Pada tahun 2023, mencapai 32.428 kg. Seperti halnya kambing, data produksi daging babi untuk tahun 2024 juga belum tersedia, sehingga belum dapat diketahui tren produksinya. Perubahan signifikan pada produksi daging sapi dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai, terutama jika lonjakan ini berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 3.48
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
di Kabupaten Banggai Tahun 2024

Kecamatan District	Ayam Buras* Chicken Breed*	Ayam Pedaging* Broiler*	Ayam Petelur* Laying Hens*	Itik* Duck*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toili	377.880	-	13.750	26.465
Toili Barat	396.562	-	2.505	34.167
Moilong	3.239	7.550	5.972	12.148
Toili Jaya	306.107	-	78.500	20.458
Batui	59.498	185.050	17.698	-
Batui Selatan	12.625	-	7.400	1.005
Bunta	19.100	5.000	34.000	1.150
Nuhon	-	-	-	-
Simpang Raya	74.932	-	2.580	2.200
Kintom	81.216	25.304	6.509	-
Luwuk	83.342	-	-	-
Luwuk Timur	44.412	2.000	-	-
Luwuk Utara	38.190	454.800	126.590	-
Luwuk Selatan	64.310	336.900	321.000	-
Nambo	54.450	70.000	1.120	-
Pagimana	8.668	-	15.790	-
Bualemo	330.007	15.200	64.140	-
Lobu	47.039	-	570	-
Lamala	8.537	-	34.042	-
Masama	51.085	-	-	482
Mantoh	8.153	-	-	-
Balantak	35.877	2.685	2.920	-
Balantak Selatan	47.286	-	14.910	-
Balantak Utara	4.775	-	480	30
Banggai	2.157.290	1.104.489	750.476	98.105

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (Banggai dalam angka 2025)

Unggas yang terdiri dari empat kategori utama, yaitu ayam buras (kampung), ayam pedaging (broiler), ayam petelur, dan itik (bebek). Ayam buras menjadi unggas

yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Banggai dengan total populasi mencapai 2.157.290 ekor. Kecamatan dengan populasi ayam buras tertinggi adalah Toili Barat (396.562 ekor) di ikuti dengan kecamatan Toili, Bualemo dan Kecamatan Toili Jaya. Sedangkan kecamatan dengan populasi ayam buras terendah adalah Balantak Utara (4.775 ekor).

Populasi ayam pedaging di Kabupaten Banggai mencapai 1.104.489 ekor. Kecamatan yang mendominasi populasi ayam pedaging adalah Luwuk Utara (454.800 ekor), Luwuk Selatan (336.900 ekor) dan Batui (185.050 ekor). Sementara kecamatan dengan populasi ayam pedaging terendah adalah Luwuk Timur (2.000 ekor) dan Balantak (2.685 ekor). Ayam pedaging lebih banyak dipelihara di Luwuk Utara dan Luwuk Selatan, yang kemungkinan besar memiliki peternakan skala besar untuk memenuhi permintaan daging ayam di pusat kota.

Total populasi ayam petelur di Kabupaten Banggai mencapai 750.476 ekor. Kecamatan dengan jumlah ayam petelur tertinggi adalah Luwuk Selatan (321.000 ekor) dan Luwuk Utara (126.590 ekor) Sedangkan kecamatan dengan populasi ayam petelur terendah adalah Lobu (570 ekor). Luwuk Selatan dan Luwuk Utara mendominasi produksi ayam petelur, yang menandakan adanya peternakan dengan skala industri yang mampu memasok kebutuhan telur di daerah perkotaan dan sekitarnya.

Populasi itik di Kabupaten Banggai mencapai 98.105 ekor. Kecamatan dengan jumlah populasi itik tertinggi adalah Toili Barat (34.167 ekor). Sementara itu, kecamatan dengan populasi itik terendah adalah Balantak Utara (30 ekor), Mantoh dan Lamala. Peternakan itik paling banyak ditemukan di kecamatan Toili Barat, Toili, dan Toili Jaya, yang menunjukkan bahwa wilayah ini lebih fokus pada pengembangan ternak bebek untuk konsumsi daging atau produksi telur itik.

Kecamatan dengan populasi unggas tinggi memiliki kontribusi lebih besar terhadap sektor peternakan dalam PDRB Kabupaten Banggai. Peternakan ayam pedaging dan ayam petelur berpotensi besar meningkatkan nilai ekonomi daerah melalui produksi daging dan telur.

Tabel 3.49
Produksi daging Unggas Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (KG)
di Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024

Jenis	2023	2024*
Ayam Buras	89.009	478.236
Ayam Pedaging	132.027	2.594.471
Ayam Petelur	63.884	42.898
Itik	16.538	360.795

Sumber: BPS Kabupaten Banggai (Bangaai dalam angka 2025)

Secara umum, produksi daging unggas di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tiga jenis unggas, yaitu ayam buras, ayam pedaging, dan itik, mengalami lonjakan produksi yang drastis, sementara ayam petelur mengalami penurunan produksi daging.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatkan sumber daya peternakan di Kabupaten Banggai:

1. Program penyediaan sarana pertanian
 - a. Dalam program ini terdapat kegiatan yang mendukung peningkatan populasi ternak seperti pengadaan bibit ternak unggul baik ternak ruminansia maupun non ruminansia.
 - b. Pengadaan hijauan pakan ternak berkualitas.
 - c. Pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan (IB)
 - d. Peningkatan SDM melalui Bimtek Inseminasi Buatan (IB).
 - e. Pendampingan alat mesin peternakan.
 - f. Pengawasan peredaran obat ditingkat pengecer.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan kandang ternak sapi guna meningkatkan kenyamanan dan kesehatan ternak serta mengurangi angka kematian akibat lingkungan yang tidak layak.

- b. Pembangunan kandang ayam KUB dan ayam petelur untuk meningkatkan produksi unggas dan menekan angka kematian akibat kondisi kandang yang buruk.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Strategis melalui Vaksinasi terhadap sapi untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyebaran penyakit lainnya.
 - b. Pengendalian dan pencegahan African Swine Fever (ASF) pada ternak babi dengan peningkatan sanitasi kandang dan pembatasan lalu lintas ternak dari daerah terpapar.
 - c. Implementasi kebijakan larangan pemotongan sapi betina produktif, dengan melakukan pengawasan ketat di rumah potong hewan.
 - d. Distribusi vaksin dan obat-obatan kepada peternak guna mencegah serta mengobati penyakit yang menyerang ternak.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha kepada pelaku usaha peternakan sehingga mereka bisa mendapatkan akses bantuan pemerintah.
 - b. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Peternakan guna memastikan bahwa seluruh proses peternakan berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
5. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pendampingan Kelompok Ternak melalui Program "Satu Juta Satu Pekarangan" Distribusi DOC ayam pedaging kepada masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM penyuluh melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi penyuluh.
 - c. Pembinaan kepada peternak agar hasil produksi mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional

Dengan adanya capaian yang dilakukan tersebut, sektor peternakan di Kabupaten Banggai diharapkan dapat:

1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap PDRB daerah.
2. Menekan angka kematian ternak akibat penyakit dan faktor lingkungan, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak.
3. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pendampingan usaha, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas.
4. Memastikan keberlanjutan usaha peternakan, baik untuk skala kecil maupun besar, dengan penerapan regulasi dan standar peternakan yang lebih baik.

Dengan berjalannya program-program ini, diharapkan Kabupaten Banggai dapat menjadi pusat peternakan yang maju dan mandiri, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Banggai.

Perikanan

Jenis-jenis ikan yang sebagian besar diusahakan perikanan tangkap di kabupaten Banggai adalah cakalang, tongkol, tuna dan udang. Untuk perikanan budidaya dibagi menjadi jaringan apung laut, jaring apung tawar, jaring tangkap tawar, keramba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana, dan tambak semi instensi.

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sehingga kontribusi sektor perikanan mengalami peningkatan, dengan senantiasa memberikan dukungan dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan melalui berbagai program dan inovasi dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu Wilayah kabupaten Banggai memiliki perairan yang sangat luas, serta memiliki jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan yang cukup besar, sehingga Kabupaten Banggai bisa menghasilkan produk perikanan yang melimpah serta memiliki nilai jual di pasar internasional.

Kontribusi sektor perikanan dapat diperoleh dari kontribusi jumlah rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak.

Tabel. 3.50

Jumlah Produksi sektor perikanan, rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak

No	Indikator	Satuan	2024
1	Jumlah Produksi Sektor Perikanan	Ton	34.808,44
2	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	KK	6.096
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	28.230
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.578,44
5	Jumlah Produksi perikanan tambak	Ton	2.117

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2024

a. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan indikator penting dalam mengukur produksi perikanan. Hasil tangkapan ikan di Kabupaten Banggai terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Tercatat terdapat 6.096 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tersebar di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan WPP 715. Berikut adalah rincian jumlah RTP di masing-masing wilayah:

Tabel 3.51
Data Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Tangkap
Tahun 2024

No	WPP 714		WPP 715	
	Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
1	Toili Barat	429	Mantoh	149
2	Toili	79	Balantak Selatan	153
2	Moilong	268	Balantak Utara	276
3	Batui Selatan	128	Bualemo	443
4	Kintom	103	Pagimana	1527
5	Nambo	111	Lobu	80
6	Luwuk	230	Bunta	389
7	Luwuk Utara	180	Nuhon	275
8	Luwuk Selatan	240	Balantak	150
9	Luwuk Timur	146		
10	Masama	273		
11	Lamala	233		

12	Batui	234		
Jumlah		2.654	Jumlah	3.442
Jumlah Total				6.096

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2024

Tabel 3.52
Data Produksi Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2024

NO	WPP 714		WPP 715	
	Kecamatan	Jumlah Produksi	Kecamatan	Jumlah Produksi
1	2	3	4	5
1	Toili Barat	1.893,60	Mantoh	1.251,20
2	Moilong	2.090,80	Balantak Selatan	1.204,80
3	Batui Selatan	1.179,60	Balantak Utara	1.388,40
4	Kintom	1.266,40	Bualemo	2.510,80
5	Nambo	655,60	Pagimana	1.738,40
6	Luwuk	723,10	Lobu	1.525,20
7	Luwuk Utara	1.028,50	Bunta	581,20
8	Luwuk Selatan	1.721,60	Nuhon	1.499,60
9	Luwuk Timur	1.482,80	Balantak	1.267,60
10	Masama	1.110,40		
11	Lamala	902,00		
12	Batui	1.208,40		
Jumlah		15.263	Jumlah	12.967
Jumlah Total				28.230,00

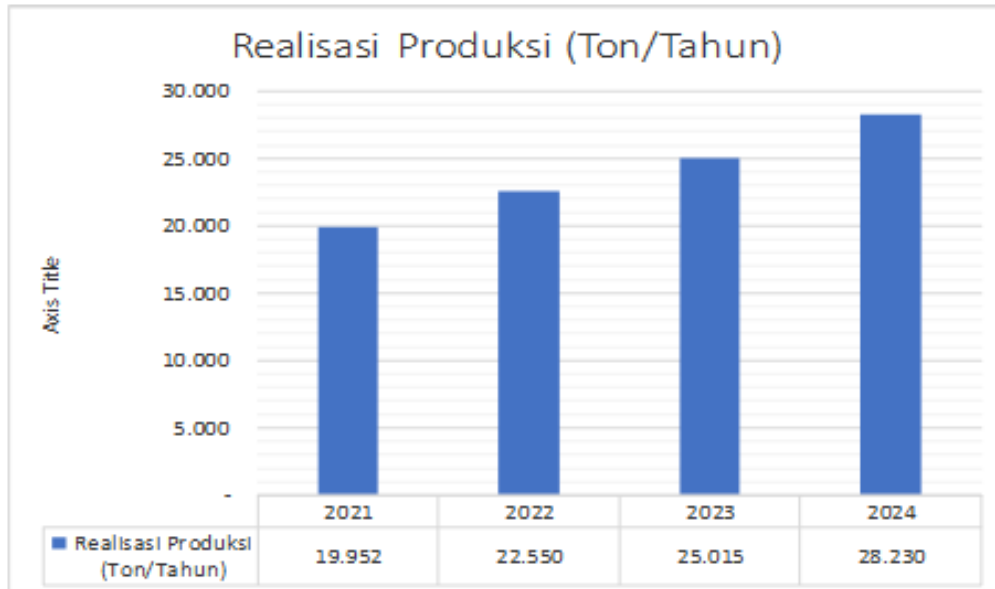
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2024

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banggai mencapai 28.230 ton berdasarkan wilayah penangkapan ikan di WPP 14 dan WPP 15. Kecamatan dengan produksi perikanan terbesar adalah Bualemo, disusul oleh Moilong. Kedua kecamatan ini didukung oleh armada kapal berkapasitas besar, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebaliknya, Kecamatan Bunta mencatat produksi perikanan terendah. Hal ini disebabkan oleh kendala cuaca dan iklim yang menghambat aktivitas melaut. Selain itu, fasilitas penunjang perikanan seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan tambatan perahu mengalami kerusakan. Banyak nelayan di Bunta beralih ke pekerjaan lain seperti pertanian atau bekerja di perusahaan nikel.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Meski hasil tangkapan ikan cukup besar, beberapa fasilitas pendukung masih kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan

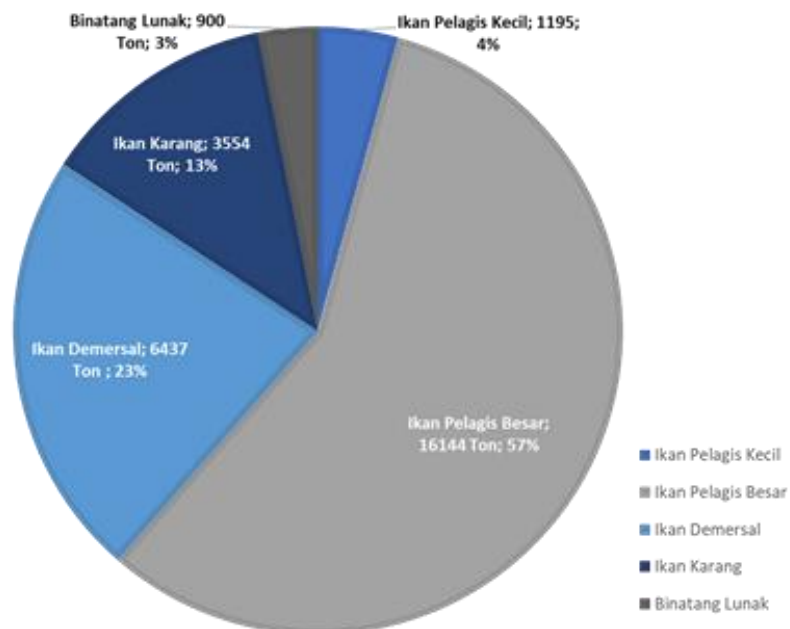
penyediaan fasilitas yang layak agar sektor perikanan dapat berkembang secara optimal. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 12,62 % dimana tahun sebelumnya hanya 9,77 %. Adapun perkembangan produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 – tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.21
Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 - 2024



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Grafik 3.22
Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap selama 4 tahun terakhir, peningkatan produksi perikanan tidak lepas dari kontribusi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti perahu fiber, alat penangkapan ikan, mesin pendukung untuk penangkapan ikan, pelatihan peningkatan SDM nelayan.

Produksi perikanan menurut jenis ikan meliputi Ikan Pelagis Kecil dengan produksi sebesar 1.195 ton, Ikan Pelagis Besar mencapai 16.144 ton, Ikan Demersal sebanyak 6.437 ton, Ikan Karang dengan produksi 3.554 ton, dan Binatang Lunak mencapai 900 ton. Produksi ikan pelagis besar menjadi yang terbesar di Kabupaten Banggai. Jenis-jenis ikan seperti tuna, tenggiri, tongkol, cakalang, lamadang, dan layaran banyak ditemukan di perairan wilayah penangkapan ikan di daerah ini. Ikan pelagis besar umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan memainkan peran penting dalam industri perikanan, sedangkan Binatang Lunak seperti Cumi – cumi, Sotong, gurita memiliki produksi paling rendah di karenakan hidup di habitat tertentu tidak begitu tersebar luas, Penangkapan binatang lunak sering kali memerlukan teknik dan alat khusus yang berbeda dari penangkapan ikan. Ini dapat membatasi jumlah tangkapan ikan, serta Siklus hidup dan reproduksi binatang lunak mungkin lebih lambat dibandingkan ikan, sehingga populasi mereka tidak bertambah secepat ikan.

Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program bantuan yang diberikan pemerintah dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan industri perikanan di Kabupaten Banggai. Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan, masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil maupun besar, antara lain:

1. Akses terhadap Pasar : Nelayan sering kesulitan menjual hasil tangkapannya dengan harga yang layak karena akses pasar yang terbatas.
2. Kerusakan Alat Tangkap: Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan sering kali rusak dan memerlukan biaya tinggi untuk perbaikan atau penggantian.
3. Harga BBM yang Tinggi: Biaya bahan bakar yang tinggi mengurangi margin keuntungan nelayan.
4. Kondisi Cuaca Ekstrem: Cuaca buruk dapat mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan mengancam keselamatan nelayan.

5. Persaingan dengan Nelayan Besar: Nelayan kecil sering kalah bersaing dengan nelayan besar yang memiliki peralatan dan teknologi lebih canggih.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan indikator penting dalam mengukur produksi perikanan. Hasil Budidaya ikan di Kabupaten Banggai terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Dengan Jumlah RTP Pembudidaya Ikan dan Perusahaan Perikanan sebagai berikut:

Tabel 3.53
Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya dan Perusahaan Perikanan

Jenis Pembudidaya Ikan	Jumlah RTP	Jumlah PP
Budidaya Laut Lainnya	8	
Budidaya JA. Laut	196	
Budidaya RL. Cottoni	380	
Budidaya Tambak	367	4
Budidaya Kolam	1.549	
Budidaya Karamba	-	
Budidaya Mina Padi	21	
Lainnya	56	
Jumlah	2.577	4

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Tabel 3.54
Jumlah RTP Menurut Kategori Teknologi yang digunakan

Jenis Pembudidaya Ikan	Jumlah RTP	Intensif	Semi Intensif	Tradisional (Sederhana)	Luas Areal Pemeliharaan (M ²)
Budidaya Laut Lainnya	8			8	80
Budidaya JA. Laut	196			196	2.640
Budidaya RL. Cottoni	380			380	380.000
Budidaya Tambak	367		5	362	783.205
Budidaya Kolam	1.549				128.025
Budidaya Karamba	2				2.568
Budidaya Mina Padi	21				5.000
Lainnya	54				54
Jumlah	2.577				1.301.572

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Tabel 3.55
Produksi Perikanan Budidaya

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Ton)	Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jr. Apung	Sawah
Nila	1.042,00			836			206
Mujair	132,00			132			
Ikan Mas	807,00			632			170
Ikan Lele	1.988,00			1.988			
Gurame	52,22			52,22			
Patin	39,00			39,00			
Kerapu	59,00		21		27	11	
Bandeng	244,00		244				
Udang	2.117,22		2.117,22				
Rumput Laut	98	98					
Jumlah	6.578,44	98	2.382,22	3.676,22	27	11	376

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Di daerah ini terdapat 2.577 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya ikan dan 4 Perusahaan Perikanan (PP). Jenis pembudidaya ikan terbagi menjadi delapan jenis, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Pada tahun 2024, capaian produksi perikanan budidaya mencapai 6.578,44 ton, dengan peningkatan 10,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun ada peningkatan, persentase kenaikan ini lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelumnya yang mencapai 14,92%. Penurunan laju peningkatan produksi ini disebabkan oleh turunnya produksi budidaya rumput laut. Penurunan ini terjadi karena harga jual rumput laut mengalami fluktuasi dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Akibatnya, banyak pembudidaya rumput laut yang beralih ke budidaya jenis ikan lainnya.

Distribusi Produksi Berdasarkan Lingkungan total produksi semua jenis ikan dan hasil laut 6.578,44 ton:

1. Lingkungan Laut: Total produksi di lingkungan laut adalah 98 ton, yang sepenuhnya terdiri dari rumput laut.
2. Tambak: Total produksi di tambak mencapai 2.382,22 ton, dengan kontribusi terbesar dari udang (2.117,22 ton) dan bandeng (244 ton).
3. Kolam: Produksi di kolam mencapai 3.676,22 ton, dengan jenis ikan terbanyak adalah ikan lele (1.988 ton), disusul nila (836 ton).

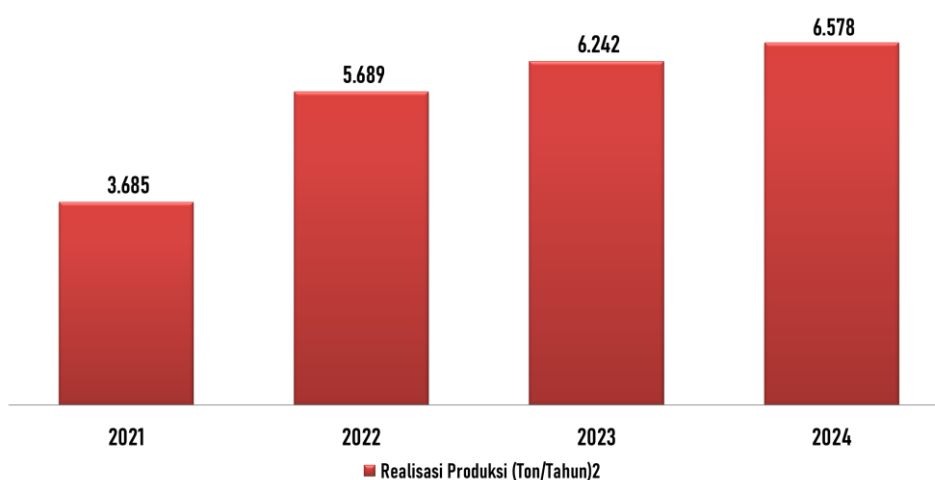
4. Keramba: Total produksi dari keramba adalah 27 ton, dengan jenis ikan terbanyak adalah kerapu (27 ton).
5. Jaring Apung: Total produksi dari jaring apung adalah 11 ton, dengan kontribusi sepenuhnya dari ikan kerapu.
6. Sawah: Total produksi dari sawah adalah 376 ton, dengan jenis ikan terbanyak adalah nila (206 ton).

Tabel 3.56
Pembenihan Perikanan Tahun 2024

Jenis Pembenihan	Luas/Area (m ²)	Produksi/Siklus (ekor)
Nila, Mas, Koi,Udang, Lele	29.321	79.858.268
Lele Dumbo	30	30.520
Jumlah	29.351	79.888.788

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Grafik 3.23
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 - 2024



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Berdasarkan data produksi perikanan budidaya selama 4 tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan berkat program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Program "Satu Juta Satu Pekarangan" menyediakan bantuan sarana prasarana budidaya, pakan ikan, dan benih ikan lele. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan Cetak kolam ikan, kolam bioflok, serta pelatihan

peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi para pembudidaya ikan. Penyuluh perikanan juga berperan aktif dalam mendampingi pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha mereka.

Meskipun terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya dari tahun 2021 hingga 2024, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan, berperan penting dalam peningkatan produksi perikanan, antara lain:

1. Fluktuasi Harga Jual: Harga jual beberapa komoditas perikanan mengalami fluktuasi yang mempengaruhi pendapatan para pembudidaya seperti contoh budidaya rumput laut yang mengalami penurunan.
2. Biaya Operasional Tinggi: Biaya operasional, termasuk pakan ikan dan perawatan kolam, sering kali tidak sebanding dengan harga jual ikan, menyebabkan keuntungan menjadi lebih rendah.
3. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi kondisi perairan dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi ikan.
4. Akses Modal Terbatas: Banyak pembudidaya kesulitan mengakses modal untuk mengembangkan usaha mereka, terutama dalam hal investasi teknologi dan infrastruktur.
5. Keterbatasan Teknologi: Kurangnya akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.
6. Kurangnya Infrastruktur: Beberapa daerah masih kurang memiliki infrastruktur penunjang seperti jalan akses ke pasar, fasilitas penyimpanan, dan transportasi yang memadai.
7. Serangan Penyakit: Ikan sering kali rentan terhadap penyakit dan parasit yang dapat menyebabkan kematian massal dan penurunan produksi.
8. Kualitas Air: Penurunan kualitas air akibat polusi atau perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan.
9. Akses Pasar: Pembudidaya sering kali kesulitan mengakses pasar yang lebih luas atau mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka.
10. Pendidikan dan Pelatihan belum optimal : Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk pembudidaya ikan dalam teknologi terbaru dan praktik terbaik,

Walapun sudah di berikan pelatihan, bantuan sarana dan parasarana pembudidaya ikan namun hanya belum optimal karena masih banyak pembudidaya ikan yang belum mendapatkan fasilitas dalam peningkatan kapasitas pembudaya ikan di karenakan keterbatasan anggaran

c. Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Produski Pengolahan Hasil Perikanan adalah indikator pengukur keberhasilan sasaran dinas perikanan dalam meningkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Peningkatan pengolahana hasil perikanan di dukungn beberapa perusahaan yang Sertifikasi SJMKHP/HACCP dan beberapa UMKM dan POKLAHSAR di pengolahan hasil perikanan.

Tabel 3.57
UPI Sertifikasi SJMKHP/HACCP

No.	Nama Perusahaan UPI	Jenis Produk	Grade
1.	CV. Indotropic Fishery	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna	A
2.	PT. Kelola Mina Laut	Frozen Cephalopods Frozen Tuna	A
3.	PT. Banggai Indo Gemilang	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish	A
4.	PT. Inti Jaya Bahari	Frozen Pelagic Fish	A

Sumber data : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu KKP

Tabel 3.58
UMKM dan POKLAHSAR

No	Nama UMKM dan POKLAHSAR	Jenis Produk Olahan
1.	Marami	Sambal Roa Super Pedas, Sambal Roa Biasa, Pajabu, Abon Roa, Abon Ikan Asin, Sambal Ikan Asin
2.	Mario Pualana	Bakso Ikan Tenggiri, Mpek – Mpek Ikan, Nuget Ikan
3.	Sikarimanang	Ikan Asin
4.	AS-Syifa	Abon Ikan, Sambal Ikan Roa, Ikan Suwir
5.	Narasa	Bakasang Ikan Sarden
6.	Tree - J	Bajabu Ikan, Sambal Ikan Roa, Acar Cakalang
7.	Dapur Titi	Abon Cakalang, Sambal Ikan Roa, Cemilan Teri Crispy, Sambal Ikan Roa

8.	Aulia Food	Abon Ikan Tuna, Abon Ikan Tenggiri, Abon Cakalang Fufu, Bajabu Ikan, Amplang Ikan,
9.	Cita Rasa	Abon Ikan Tuna, Abon Ikan Roa, Abon Ikan Asin, Bajabu Ikan, Panada Tore
10.	Cinta Rasa	Sambal Udang Halus, Sambal Ikan Asin, Sambal Ikan Roa, Sambal Cumi, Abon Ikan Asin, dan Abob Ikan Tuna
11.	Bola - Bepa	Abon Malalugis, Abon Tuna, Abon Cakalang, Sambal Roa, Sambal Ikan Asin
12.	Moms Najwa	Kripik Ikan
13.	Berkah	Kripik Ikan Tuna
14.	Syb	Keripik Rumput Laut

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Empat perusahaan serta empat belas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) berperan penting dalam peningkatan hasil olahan perikanan di Kabupaten Banggai. Beberapa jenis produk hasil olahan ini bahkan menjadi oleh-oleh khas daerah. Produk-produk ini meliputi berbagai macam olahan ikan, seperti ikan asin, abon ikan, kerupuk ikan, dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki cita rasa khas dan kualitas tinggi. Hasil olahan perikanan ini tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Kabupaten Banggai telah mulai mengeksport produk olahan perikanan ke berbagai negara, meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ekspor produk olahan perikanan ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas dan produksi yang berkelanjutan.

Tabel 3.59
Data Ekspor Upi Tahun 2024

NO	TUJUAN	JUMLAH (KG)	NILAI (RP)	PRODUK
1	U S A	228.122	19.504.432.000	FROZEN OCTOPUS BALL
2	MALTA	21.098	1.852.320.000	FROZEN OCTOPUS BALL
3	LONDON	22.630	1.712.624.000	FROZEN OCTOPUS YUCATAN STYLE
4	AUSTRALIA	24.425	2.830.176.000	FROZEN OCTOPUS HANDS, SEA BREAM
5	SINGAPURA	38.136	4.236.000.000	FROZEN OCTOPUS BALL
6	JEPANG	36.602	3.764.016.000	FROZEN BLANCHED CUTT
7	MEXICO	43.330	3.682.432.000	FROZEN OCTOPUS YUCATAN STYLE
8	VIETNAM	20.430	2.126.880.000	FROZEN OCTOPUS BALL
	JUMLAH	437.773	39.708.880.000	

Sumber data : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu KKP

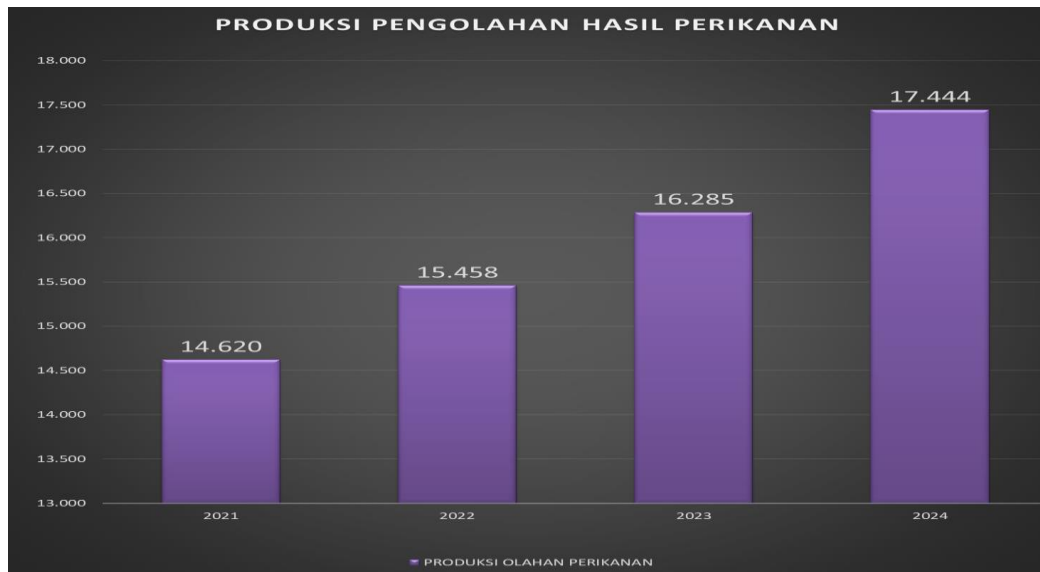
Pada tahun 2024, Kabupaten Banggai menunjukkan kinerja yang signifikan dalam sektor ekspor hasil perikanan. Data ekspor menunjukkan kontribusi yang besar dari berbagai negara tujuan, dengan total ekspor mencapai 437.773 kilogram dan nilai sebesar 39.708.880.000 rupiah.

Pencapaian ekspor ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Banggai. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional mendorong peningkatan produksi dan pengolahan perikanan. Selain itu, kualitas produk yang memenuhi standar ekspor internasional turut berperan dalam meningkatkan reputasi hasil perikanan Kabupaten Banggai di pasar global.

Dukungan pemerintah melalui program-program peningkatan kapasitas, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan UMK/POKLAHSAR membantu menciptakan produk-produk olahan perikanan yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah. Beberapa jenis produk olahan ini bahkan telah menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banggai, menarik minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan adanya peningkatan hasil ekspor dan pengolahan perikanan, Kabupaten Banggai diharapkan dapat terus mengembangkan sektor perikanan ini dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitas, dan akses pasar juga berperan penting dalam mendorong sektor olahan perikanan untuk mencapai pasar internasional. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan UMK, sektor olahan perikanan di Kabupaten Banggai diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Grafik 3.24
Pertumbuhan produksi Pengolahan Hasil Perikanan



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (2024)

Meskipun produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir, para pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat optimasi hasil dan keberlanjutan usaha mereka, antara lain:

1. Fluktuasi Harga Bahan Baku: Harga bahan baku, seperti ikan segar dan bahan pengolahan lainnya, mengalami fluktuasi yang menyebabkan ketidakstabilan biaya produksi.
2. Biaya Produksi Tinggi: Biaya produksi yang tinggi, termasuk tenaga kerja, listrik, dan peralatan, sering kali tidak sebanding dengan harga jual produk olahan, sehingga mengurangi margin keuntungan.
3. Keterbatasan Teknologi: Kurangnya akses terhadap teknologi pengolahan yang modern dan efisien menghambat kemampuan produsen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan.
4. Kualitas Produk: Meskipun ada peningkatan produksi, menjaga kualitas produk olahan perikanan tetap konsisten menjadi tantangan, terutama dalam memenuhi standar ekspor internasional.

5. Pemasaran dan Akses Pasar: Kesulitan dalam memasarkan produk olahan perikanan ke pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang adil, baik di pasar lokal maupun internasional.
6. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti fasilitas penyimpanan, distribusi, dan transportasi, menghambat efisiensi rantai pasokan.
7. Sertifikasi dan Perizinan: Proses sertifikasi dan perizinan yang rumit dan memakan waktu menjadi kendala bagi para produsen dalam memperluas usaha mereka.
8. Persaingan Pasar: Persaingan dengan produk olahan perikanan dari daerah lain atau negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah atau kualitas lebih baik.
9. Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga kerja terampil yang memahami teknologi pengolahan terbaru dan praktik terbaik dalam industri pengolahan perikanan.
10. Akses Modal: Kesulitan dalam mendapatkan modal untuk investasi dalam peralatan, teknologi, dan pengembangan usaha, terutama bagi UMK dan POKLAHSAR.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Peningkatan Produksi Perikanan yaitu sebagai berikut :

1. Pemberiaan bantuan alat penangkapan ikan oleh dinas perikanan.
2. Peningkatan Kapasitas Nelayan dengan di adakanya Pelatihan kecakapan nelayan yang pelaksanaanya di laksanakan dengan kementrian KKP serta di adakanya Pertemuan Teknis Perikanan Tangkap
3. Pemberian bantuan Armada Penangkapan Ikan Oleh Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.
4. Pemberian Mesin Penangkapan Ikan bagi nelayan
5. Pemberian sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan melalui Program satu juta satu pekarangan
6. Penerapan cara Budidaya Ikan baik dan Benar (CBIB) dikalangan Pembudidaya ikan

7. Penggunaan benih ikan unggul yang berkualitas, dimana benih ikan unggul sangat berpengaruh pada proses Produksi Perikanan

Peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan ini disebabkan oleh tumbuhnya kebutuhan ikan segar oleh industri pengolahan hasil perikanan, UMKM pengolahan hasil perikanan, serta kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dari tahun sebelumnya.

Meskipun produksi perikanan di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan, baik dalam sektor tangkap maupun budidaya, terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi. Permasalahan tersebut mencakup:

1. Fluktuasi harga jual yang mempengaruhi pendapatan para pembudidaya dan nelayan, biaya operasional yang tinggi, perubahan iklim yang berdampak negatif pada kondisi perairan, keterbatasan akses modal dan teknologi, serta kurangnya infrastruktur penunjang.
2. Masalah serangan penyakit, penurunan kualitas air, sulitnya akses pasar, dan kurangnya pendidikan serta pelatihan juga menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan.
3. Penurunan tingkat kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan dipengaruhi oleh tingkat produksi ikan yang mencapai target namun tidak diimbangi oleh ketidakstabilan harga khususnya pada ikan ekonomis tinggi produksi Kabupaten banggai pada sektor perikanan budidaya maupun tangkap.

Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Kawasan pertambangan di Kabupaten Banggai diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral dan batubara diarahkan (sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan/IUP Dinas Pertambangan Kabupaten Banggai) pada Kecamatan Nuhon, Bunta, Pagimana, Bualemo, Balantak, Balantak Utara, Masama, Toili dan Toili Barat. Kawasan pertambangan gas alam dialokasikan di daerah Batui,

sedang pertambangan yang lain berlokasi di kawasan yang memiliki bahan mineral yang potensial. Pertambangan gas alam merupakan kegiatan ekstraksi yang menjadi bagian dari industri pengolahan gas alam yang direncanakan berlokasi di Kintom. Untuk kegiatan eksplorasi gas alam sendiri yang berlokasi di Batui, Toili dan Toili Barat. Potensi pertambangan kabupaten banggai cukup luas dimana Daerah Penghasil Tambang antara lain:

1. Tambang Nikel berada di Kecamatan Bunta, Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Kecamatan Masama
2. Pasir Batu berada di Kecamatan Balantak Utara dan Luwuk Timur
3. Batugamping berada di Kecamatan Luwuk Timur, Masama, Lamala dan Balantak (belum produksi).

Tabel 3.60
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai
(miliar rupiah), 2020–2024**

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Meskipun sektor pertambangan masih memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Banggai, namun terjadi tren penurunan setiap tahunnya pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Banggai mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, dari 22,92% pada tahun 2020, 22,12% pada tahun 2021, 21,61% pada tahun 2022, 19,01% pada tahun 2023 dan menjadi 18,47% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas tambang, kebijakan regulasi, serta berkurangnya cadangan sumber daya. Sektor pertambangan di Kabupaten Banggai mendukung APBD Kabupaten Banggai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari Landrent/sewa lahan dan Royalti Produksi Nikel.

Kendala-kendala yang dihadapi terkait sektor pertambangan antara lain:

1. Kewenangan Pertambangan ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi namun lokasi tambang berada di Kabupaten. Termasuk kewenangan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten hanya dapat melaksanakan fasilitasi dan mediasi saat terjadi permasalahan pertambangan
2. Sengketa lahan masyarakat dalam areal Izin Usaha Pertambangan
3. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
4. Permasalahan Ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang terkena dampak kegiatan pertambangan

Berikut adalah solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kendala dalam sektor pertambangan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal serta mendorong peran masyarakat dan media dalam pengawasan independen dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.
2. Memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang dengan melibatkan pemerintah provinsi, lembaga adat, dan pihak berwenang lainnya serta meningkatkan transparansi perizinan dengan menyediakan data publik terkait status kepemilikan lahan dan izin usaha pertambangan.
3. Menyusun kebijakan perlindungan lingkungan dengan mengacu pada regulasi pusat dan provinsi.
4. Mendorong perusahaan tambang untuk menjalankan reklamasi pascatambang melalui mekanisme insentif dan sanksi.
5. Menyediakan pendampingan bagi masyarakat dalam proses negosiasi agar hak mereka tetap terlindungi.
6. Membuat kebijakan daerah yang mengatur CSR agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan CSR dengan membentuk forum masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program serta memastikan CSR berdampak nyata melalui program

berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat sekitar tambang.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP disusun oleh BKP, Dimana nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 sebesar 88,67 dan terealisasi sebesar 85,14 dengan capaian kinerja sebesar 96,02%. Berdasarkan hasil IKP yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional bahwa peringkat IKP Kabupaten Banggai berada pada urutan 118 dari 514 Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai sebesar 85,72 dengan capaian kinerja sebesar 98,34% masih lebih tinggi 0,58 point dari tahun 2024. Begitupun juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 90,00 capaiannya belum 100% masih 94,6%.

Tabel. 3.61
Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Sulawesi Tengah
Tahun 2024

KAB/KOTA	INDEKS KETAHANAN PANGAN	PERINGKAT KAB/KOTA
Provinsi Sulawesi Tengah	76,87	
Banggai	85.14	118
Poso	84.6	131
Kota Palu	82.43	176
Morowali	81.44	193
Morowali Utara	81.21	201
Sigi	80.06	237
Buol	79.97	239
Toli-Toli	79.39	253
Parigi Moutong	78.91	264
Donggala	73.97	350

Tojo Una-Una	73.78	357
Banggai Kepulauan	66.5	416
Banggai Laut	51.91	474

Sumber : <https://satudata.badanpangan.go.id>

Jika di bandingkan dengan Kabupaten Lainnya, Kabupaten Banggai berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks ketahanan Pangan sebesar 85,14, dengan peringkat 118 se-Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berarti Banggai berada di posisi yang relatif lebih baik dalam hal ketahanan pangan dibandingkan daerah lainnya.

Kabupaten Banggai memiliki indeks ketahanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Selisih indeks antara keduanya adalah 8,27 poin, nilai Indeks ketahanan pangan Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 85,14, sedangkan indeks ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 76,87 hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Banggai lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur pertanian, atau kondisi ekonomi masyarakat.

Perhitungan IKP berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan) dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan berdasarkan atas tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan didasarkan indikator Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu.

Informasi mengenai situasi penyediaan pangan secara menyeluruh disuatu negara/wilayah digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (*Food Balance Sheet*), yang sekaligus menjadi salah satu Indikator Tersedianya Pangan dalam jumlah yang cukup.

Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2024 berdasarkan hasil penghitungan Neraca Bahan Makanan dan perbandingannya dengan skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Nasional dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai, 2024

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Kab.Banggai	Skor PPH Maksimal
1.	Padi-Padian	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	1,3	2,5
3.	Pangan Hewani	16,1	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5.	Buah/Biji berminyak	0,4	1,0
6.	Kacang-Kacangan	4,5	10,0
7.	Gula	2,1	2,5
8.	Sayuran dan Buah	28,4	30,0
	Jumlah	82,8	100,0

Sumber : Neraca Bahan Makanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2024

Total skor PPH untuk Kabupaten Banggai adalah 82,8, yang berarti bahwa pencapaian produksi bahan pangan secara keseluruhan mencapai sekitar 82,8% dari potensi maksimal yang dapat dicapai. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar dalam banyak kelompok pangan, masih ada beberapa sektor yang belum sepenuhnya berkembang atau terkelola dengan optimal. Kabupaten Banggai memiliki pencapaian yang baik dalam beberapa kelompok bahan pangan, seperti padi-padian, minyak dan lemak, serta sayuran dan buah. Namun, ada beberapa sektor lain, seperti umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan, yang perlu untuk dikembangkan lagi. Untuk mencapai skor maksimal, diperlukan intervensi atau

strategi pengelolaan yang lebih baik, seperti perbaikan teknologi pertanian, kebijakan pengembangan sektor tertentu, atau peningkatan infrastruktur pendukung.

Perbandingan antara angka kecukupan energi dan protein Kabupaten Banggai dengan standar nasional sebagai berikut:

Tabel 3.63
Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai, 2024

No.	Ketersediaan	Tahun 2024	Nasional
1.	Energi (kkal/kapita/hari)	2,131	2.400
2.	Protein (gram/kapita/hari)	66,70	63

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2024

Status gizi diukur berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Standar kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012. Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Banggai sebanyak 2.131,79 kkal dan 66,70 gram protein per kapita per hari. Konsumsi ini telah memenuhi standar kecukupan yang ditetapkan Pemerintah.

Tabel 3.64
Cadangan Pangan Kabupaten Banggai, 2024

NO.	Uraian	Kabupaten Banggai tahun 2024	Permentan No.11 tahun 2018
1.	Cadangan Pangan Kabupaten	22.065 Ton	110.04 ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2024

Cadangan pangan merupakan indikator kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Skor PPH Ketersediaan. Cadangan pangan

merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang mencakup pembangunan lumbung pangan, pengisian lumbung pangan, dan penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 110.04 ton ekuivalen beras. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai target indikator cadangan pangan kabupaten sebanyak 0 ton dikarenakan belum tersediannya anggaran untuk cadangan pangan pemerintah.

Tabel 3.65
Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan
Target Nasional, 2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai	77,9	83,8	82,8
2.	Skor PPH Konsumsi Target Nasional	91,6	92,8	94

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2024

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

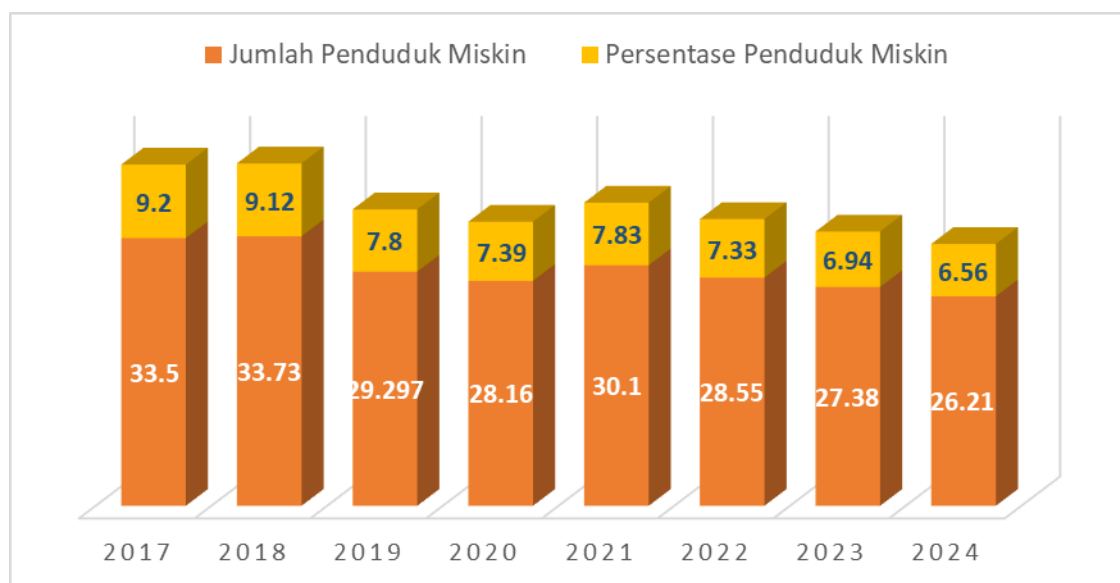
Aspek keterjangkauan/akses pangan didasarkan indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki

daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.

- Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Banggai periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2024 ditunjukkan oleh Grafik berikut:

Grafik 3.26
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai, 2017-2024



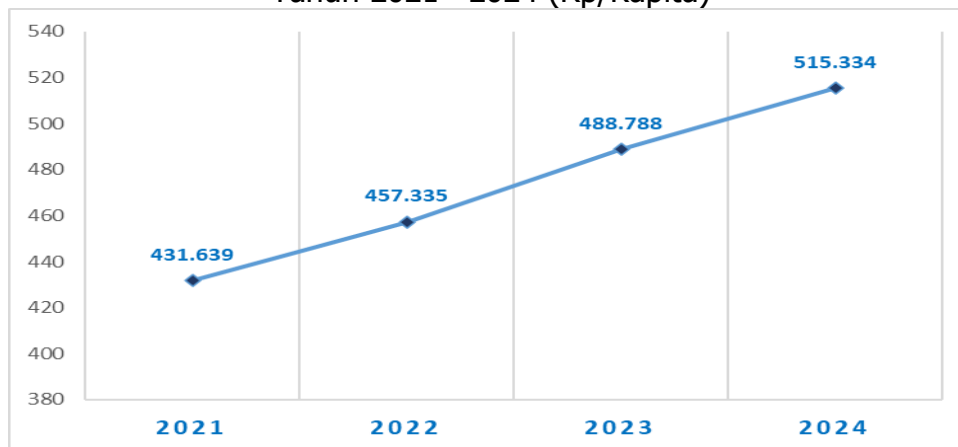
Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Secara umum, pada periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Akan tetapi, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan, akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai kembali meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai kembali mengalami penurunan.

Angka kemiskinan yang tinggi dapat menurunkan indeks ketahanan pangan, karena masyarakat yang miskin lebih rentan terhadap masalah keterjangkauan pangan, akses terhadap pangan yang berkualitas, dan stabilitas pangan. Jika pendapatan rendah, masyarakat cenderung hanya mampu membeli makanan yang murah, yang sering kali tidak cukup bergizi. Kualitas pangan menjadi salah satu indikator ketahanan pangan, dan apabila kualitas pangan yang tersedia buruk

(misalnya, lebih banyak pangan yang mengandung kalori kosong atau makanan olahan dengan gizi rendah), maka indeks ketahanan pangan akan menurun.

Grafik 3.27
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai
Tahun 2021—2024 (Rp/Kapita)



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2024. Selama periode Maret 2023- Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,43 persen, yaitu dari Rp 488.788,- per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp 515.334,- per kapita per bulan pada Maret 2024. Sementara itu, pada periode Maret 2022–Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 12,68 persen, yaitu dari Rp 457.335,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 515.334,- pada tahun 2024. Semakin tinggi garis kemiskinan, maka keterjangkauan pangan akan semakin terbatas. Karena Pangan yang ada di pasar akan semakin sulit dijangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah. Keterjangkauan pangan ini menjadi salah satu aspek utama dalam ketahanan pangan, karena tanpa daya beli yang memadai, masyarakat tidak dapat memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Garis kemiskinan di Kabupaten Banggai adalah Rp. 515.334 per bulan, maka setiap rumah tangga yang

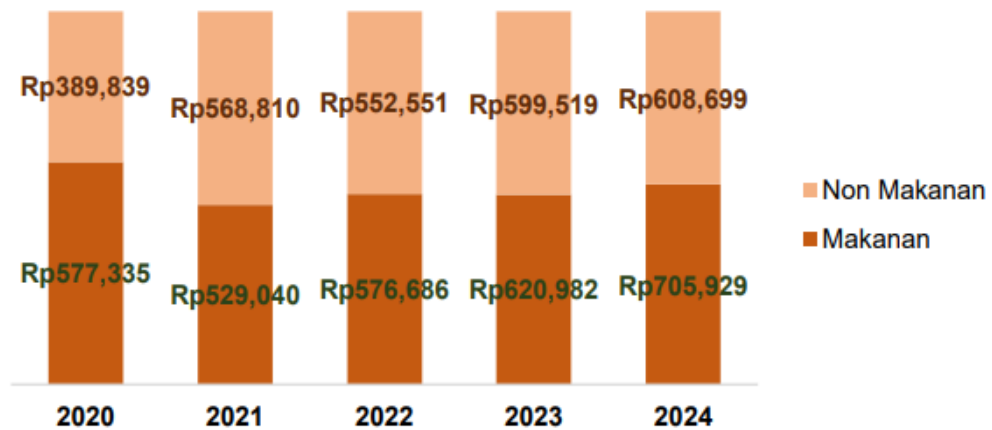
pengeluarannya per bulan di bawah jumlah tersebut akan dianggap sebagai rumah tangga miskin. Orang atau keluarga yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga mereka tergolong miskin.

Kesimpulannya adalah Kabupaten Banggai berhasil mengurangi angka kemiskinan, namun kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Banggai perlu terus meningkatkan upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan akses pendidikan, serta menyediakan peluang ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

- Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran

Selanjutnya, apabila dilihat menurut jenis pengeluaran, maka akan tampak komposisi pengeluaran yang digunakan untuk komoditas makanan maupun non makanan. Pada tahun 2023, pengeluaran makanan sebesar Rp. 705,929 ribu (53,70 persen), sedangkan non makanan sebesar Rp608,699 ribu (46,30 persen). Pengeluaran untuk Makanan yang lebih dari separuh dari total pengeluaran (53,70%) menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Banggai masih mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini mencerminkan tingkat ketergantungan pada pangan yang cukup tinggi. Pengeluaran untuk Non-Makanan yang sebesar 46,30% menunjukkan bahwa meskipun rumah tangga menghabiskan hampir setengah pengeluarannya untuk kebutuhan lain, kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas utama. Rumah tangga lebih kesulitan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan investasi, karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Grafik 3.28
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai,
2020-2024



SumberP: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2024

Proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk pangan bisa juga menjadi tanda bahwa rumah tangga tersebut mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi atau keterjangkauan pangan yang rendah, yang sering terjadi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Lebih dalam lagi, dari pengeluaran masyarakat berdasarkan daerah tempat tinggal diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Perbedaan ini selain karena kemampuan finansial yang berbeda, kebutuhan barang dan jasa lebih banyak tersedia di perkotaan daripada perdesaan, sehingga konsumsi masyarakat di daerah perdesaan lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Dari sisi pola konsumsi, dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perdesaan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan makanan, karena penduduk di daerah perdesaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan daripada non makanan. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang tinggal di perkotaan cenderung lebih banyak digunakan untuk konsumsi non makanan. Ketersediaan barang dan jasa di perkotaan yang lebih beragam, terutama untuk komoditas non makanan, membuat pola konsumsi masyarakat perkotaan terhadap komoditas non makanan lebih beragam pula. Kondisi ini sedikit banyak menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perkotaan yang lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal

ini juga menjadi salah satu pendorong penduduk di perdesaan melakukan migrasi ke perkotaan untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Ketimpangan ini perlu terus diminimalisasi dengan cara memperkuat pembangunan di daerah perdesaan, sesuai dengan tujuan ke-10 pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang merupakan salah satu pilar ekonomi, yaitu mengurangi ketimpangan.

- Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Fasilitas perumahan lainnya yang juga tidak kalah penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Pemerintah melalui PLN akan terus berupaya agar ketersediaan listrik dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banggai dalam publikasinya di Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024, sumber penerangan utama listrik berupa PLN di Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah sebesar 96,96 persen, sedangkan sumber penerangan utama lainnya berupa listrik nonPLN atau bukan listrik sebesar 3,04 persen.

Secara umum, tingginya akses listrik di Kabupaten Banggai (96,96%) dapat mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) karena meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kondisi ekonomi, dan memperluas akses terhadap informasi dan teknologi yang mendukung ketahanan pangan. Namun di Kabupaten Banggai juga masih memiliki rumah tangga tanpa akses listrik sebesar 3,04%, dimana masyarakatnya masih menghadapi tantangan tambahan dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal karena mereka lebih rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang lebih efisien, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan infrastruktur listrik hingga mencakup seluruh rumah tangga agar dapat mendukung ketahanan pangan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Banggai.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik memiliki hubungan yang erat, karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Beberapa aspek yang dapat menjelaskan hubungan ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Rumah tangga tanpa akses listrik cenderung berada di daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang, yang sering kali juga memiliki ketahanan pangan yang rendah. Di daerah tersebut, infrastruktur yang terbatas bisa mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh, menyimpan, dan mengolah pangan dengan baik. Ketidaktersediaan listrik, misalnya, bisa mempersulit penyimpanan makanan yang membutuhkan pendinginan, seperti sayuran atau produk hewani, yang dapat menurunkan kualitas dan keberlanjutan ketahanan pangan.

2. Pengaruh Ekonomi

Keluarga yang tidak memiliki akses listrik sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar seperti listrik bisa menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan yang rendah biasanya berkorelasi dengan ketahanan pangan yang rendah, karena rumah tangga dengan penghasilan rendah lebih sulit untuk membeli makanan bergizi atau memenuhi kebutuhan pangan yang seimbang.

3. Kualitas Hidup

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga dengan kualitasnya. Rumah tangga tanpa listrik seringkali kurang memiliki akses ke informasi tentang pola makan yang sehat atau teknologi pertanian yang lebih efisien. Akses ke informasi dan teknologi dapat membantu rumah tangga meningkatkan ketahanan pangan mereka. Ketika ada listrik, rumah tangga bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan mereka.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek pemanfaatan pangan didasarkan indikator rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir.

- Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apabila air minum yang dikonsumsi adalah air minum yang tidak layak, maka akan rentan terhadap penyakit khususnya diare. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus tumbuh dengan baik dan sehat agar terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

Tabel 3.66
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih
Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	PUSKESMAS	JUMLAH KK	KK PENGELOLAAN BELUM LAYAK	
				JUMLAH	%
1	2	3		10	11
1	Nuhon	Nuhon	2945	0	0
		Saiti	2739	344	12.6
2	Simpang Raya	Simpang Raya	4310	823	19.1
3	Bunta	Bunta	4782	0	0.0
		Toima	1654	0	0.0
4	Lobu	Lobu	1226	13	1.1
5	Pagimana	Pagimana	5127	715	13.9
		Poh	1966	919	46.7
6	Bualemo	Bualemo	4328	0	0.0
		Tikupon	1590	0	0.0
7	Balantak Utara	Teku	1541	1	0.1
8	Balantak	Balantak	1908	54	2.8
9	Balantak Selatan	Tongke	1858	12	0.6
10	Mantok	Mantok	2315	0	0.0
11	Lamala	Bonebobakal	2275	14	0.6
12	Masama	Tangeban	3628	0	0.0
13	Luwuk Timur	Hunduhon	3655	0	0.0
14	Luwuk Utara	Biak	5068	0	0.0
15	Luwuk	Kampung Baru	10411	0	0.0
16	Luwuk Selatan	Luwuk	5483	0	0.0
17	Nambo	Nambo	2668	2	0.1
18	Kintom	Kintom	3409	0	0.0
19	Batui	Batui	5065	272	5.4
20	Batui Selatan	Sinorang	4075	691	17.0
21	Toili I	Toili I	5932	202	3.4
22	Toili II	Toili II	10738	760	7.1
23	Toili III	Toili III	7143	3300	46.2
JUMLAH (KAB/KOTA)			107,839	8122	7.5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai (2024)

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih tahun 2024, dimana terlihat bahwa dari 107.839 jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Banggai, ada 8.122 rumah tangga/KK yang belum memiliki akses air ke air bersih (pengelolaan air bersih yang belum layak) atau sekitar 7,5%. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di Kabupaten Banggai dapat mempengaruhi indeks ketahanan pangan, terutama pada aspek pemanfaatan pangan, karena dampaknya terhadap kualitas pangan, kesehatan masyarakat, serta kemampuan rumah tangga dalam memanfaatkan pangan yang mereka miliki secara optimal. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, selain memperbaiki kesehatan masyarakat, juga dapat memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan pemanfaatan pangan yang lebih bergizi dan aman.

- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk saling berhubungan dan memiliki dampak langsung pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) suatu wilayah. Rasio yang tinggi (lebih banyak penduduk per tenaga kesehatan) akan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang bisa berdampak pada penurunan kesehatan dan penurunan ketahanan pangan. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sering kali memperburuk kondisi tersebut, karena ada lebih banyak orang yang membutuhkan sumber daya terbatas, termasuk tenaga kesehatan dan distribusi pangan.

Tabel 3.67
Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Jumlah Penduduk Pertenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk (Rasio Terhadap 100.000 Penduduk)
Dokter	105	2
Perawat	963	30,8
Bidan	884	28,3
Kesmas	243	8
Kesling	118	4
Tenaga Gizi	86	3

Ahli Teknologi Laboratorium Medik	69	2
Keteknisian Medik	44	1
Kefarmasian	105	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satunya dengan jumlah dokter yang hanya 105 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai sebanyak 374.896 ribu jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar tiga ribu lebih penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan atas tenaga kesehatan juga akan terus meningkat. Hal yang penting lainnya terkait fasilitas kesehatan yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, seperti pelayanan untuk persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Kabupaten Banggai umumnya sudah memiliki pilihan untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis, terutama bidan. Selain bidan, masyarakat yang memilih dokter kandungan dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak. Adapun masyarakat yang menggunakan jasa dokter kandungan sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan karena akses pelayanan dokter kandungan di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan di perdesaan. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter kandungan karena mempertimbangkan pengetahuan kesehatan dokter kandungan yang lebih terpercaya. Hal ini tampak dari persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 98,63 persen pada tahun 2024.

- Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan (sejak

kehamilan hingga usia dua tahun). Jika ketersediaan pangan di suatu wilayah rendah, maka pasokan pangan bergizi untuk balita menjadi terbatas. Kondisi ini meningkatkan risiko kekurangan gizi pada balita, yang dapat menyebabkan stunting. Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga yang buruk berhubungan dengan tingginya prevalensi stunting pada balita.

Tabel 3.68
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita Yang di Ukur tinggi badannya	Balita Pendek (TB/U)	
				Jumlah Bayi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nuhon	Nuhon	483	79	16.4
		Saiti	612	89	14.5
2	Simpang Raya	Simpang Raya	897	42	4.7
3	Bunta	Bunta	771	94	12.2
		Toima	143	12	8.4
4	Lobu	Lobu	213	11	5.2
5	Pagimana	Pagimana	996	98	9.8
6	Bualemo	Bualemo	795	102	12.8
		Tikupon	308	61	19.8
7	Balantak Utara	Teku	347	21	6.1
8	Balantak	Balantak	375	93	24.8
9	Balantak Selatan	Tongke	312	51	16.3
10	Mantok	Mantok	414	89	21.5
11	Lamala	Bonebobakal	426	86	20.2
12	Masama	Tangeban	745	96	12.9
13	Luwuk Timur	Hunduhon	750	41	5.5
14	Luwuk Utara	Biak	860	95	11.0
15	Luwuk	Kampung Baru	1,618	73	4.5
16	Luwuk Selatan	Luwuk	1,590	103	6.5
17	Nambo	Nambo	489	79	16.2
18	Kintom	Kintom	690	68	9.9
19	Batui	Batui	1,139	61	5.4
20	Batui Selatan	Sinorang	1,046	82	7.8
21	Toili I	Toili I	1,290	126	9.8
22	Toili II	Toili II	1,873	204	10.9
23	Toili III	Toili III	1,845	175	9.5
JUMLAH(KAB/KOTA)			21,027	2,131	10.1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai (2024)

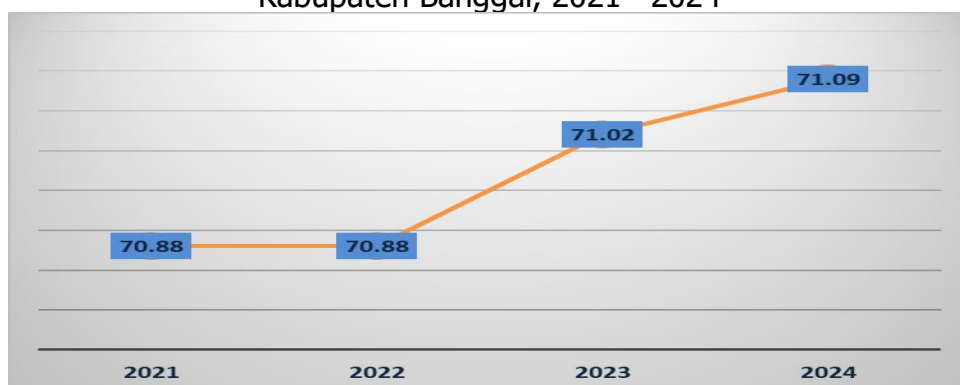
Tabel di atas menunjukkan data mengenai persentase balita stunting (pendek) berdasarkan kecamatan di sebuah wilayah untuk tahun 2024 dimana Jumlah total

balita stunting di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai adalah 2.131, dengan rata-rata persentase 10,1%. Data menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam angka stunting antar kecamatan. Ada kecamatan dengan angka stunting yang sangat tinggi, sementara yang lain memiliki angka yang jauh lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa penyebab stunting bisa bervariasi antar daerah, baik dari faktor geografis, akses ke layanan kesehatan, atau tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi dan perawatan anak. Kecamatan dengan angka stunting sangat tinggi antara lain Balantak (24,8%), Mantok (21,5%), dan Bonebobakal (20,2%), hal ini mengindikasikan adanya masalah yang cukup serius dalam hal pemenuhan gizi, layanan kesehatan, atau masalah sosial-ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan anak-anak di daerah ini. Kecamatan dengan angka stunting relatif rendah adalah Simpang Raya (4,7%), Kampung Baru (4,5%), dan Batui (5,4%). Hal tersebut menunjukkan lebih baiknya akses terhadap perawatan kesehatan, gizi, dan edukasi masyarakat di daerah-daerah ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting antara lain adalah akses terhadap makanan bergizi, status kesehatan ibu, fasilitas kesehatan, serta tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Banggai telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Upaya ini melibatkan berbagai program peningkatan ketahanan pangan, seperti diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, dan edukasi gizi kepada masyarakat.

- Angka Harapan Hidup Pada Saat Lahir

Grafik 3.29
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Banggai, 2021—2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2024)

Ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan dapat diakses oleh semua orang. Ketahanan pangan yang baik berperan sangat penting dalam mendukung kondisi kesehatan masyarakat, yang langsung mempengaruhi umur harapan hidup (UHH). Jika ketahanan pangan tinggi, orang cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan, menurunkan angka kematian bayi, serta meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Secara keseluruhan kita dapat melihat tren positif secara perlahan dengan kenaikan kecil yang konsisten setiap tahun. Dimana data UHH di Kabupaten Banggai cenderung meningkat secara perlahan. Pada tahun 2021 dan 2022, angka UHH tetap sama, yaitu 70,88 tahun. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi kenaikan meskipun hanya sedikit, yaitu masing-masing menjadi 71,02 dan 71,09. Kenaikan ini, meskipun kecil, menunjukkan adanya perbaikan secara perlahan dalam kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banggai, hal tersebut sejalan dengan indeks ketahanan pangan Kabupaten Banggai yang mencapai 85,14.

IKP yang tinggi mengindikasikan adanya ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi. Di Kabupaten Banggai, jika terjadi peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2024, ini dapat berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat, yang secara langsung mendukung peningkatan kesehatan dan mengurangi angka kematian terkait kekurangan gizi. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai:

1. Ketergantungan Petani dengan tanaman pangan tunggal seperti padi.
2. Ketersediaan pangan yang tidak merata disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, bencana alam sehingga menyebabkan fluktuasi harga pangan dan kesulitan bagi Masyarakat untuk mendapatkan makanan yang cukup.
3. Kenaikan dan tingginya harga bahan-bahan pangan sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang.

4. Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman.
5. Keterbatasan lahan pertanian yang produktif.

Solusi yang di lakukan untuk menghadapi kendala tersebut:

1. Penganekaragaman penanaman berbagai jenis tanaman pangan, buah-buahan, sayur, jagung, sagu, ketela pohon, dan ubi jalar untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
2. Meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi pangan melalui Perum Bulog dan koordinasi antara pemerintah dan swasta.
3. Peningkatan infrastruktur seperti kualitas jalan, sarana transportasi, dan gudang penyimpanan untuk mempermudah pendistribusian pangan ke pasar dan konsumen.
4. Penambahan jumlah tenaga kesehatan dan dokter untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan juga edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat yang diimbangi dengan gizi dan nutrisi yang tepat bagi masyarakat.
5. Penyiapan langkah-langkah mitigasi bencana alam yang dapat mengganggu produksi pangan.
6. Pemantapan Kebijakan Pangan untuk memastikan bahwa distribusi pangan di daerah-daerah berjalan lancar dengan harga yang wajar dan tidak ada kekurangan pasokan.
7. Melakukan pengendalian inflasi pangan agar harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.69

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana	88.676.487.775,00	85.588.088.663,00	96,52

Pertanian			
Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	36.891.630.618,00	35.414.367.978,00	95,99
Perizinan Usaha Pertanian	101.491.270,00	101.078.080,00	99,59
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.498.386.500,00	1.421.638.600,00	94,88
Penyuluhan Pertanian	7.535.112.900,00	6.320.896.332,00	83,89
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.228.676.300,00	1.042.624.293,00	83,25
Pengembangan perikanan tangkap	10.109.914.350,00	9.663.474.701,00	95,58
Pengembangan Budidaya Perikanan	7.598.983.084,00	7.376.327.993,00	97,07
Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	1.243.381.300,00	806.591.617,00	64,87
Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.218.796.328,00	2.119.480.312,00	95,52
Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.960.021.665,00	1.899.956.065,00	96,94
Penanganan kerawanan pangan	1.244.111.450,00	1.237.543.760,00	99,54
Pengawasan keamanan pangan	613.299.500,00	610.466.840,00	99,54
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	4.690.100,00	3.258.700,00	69,48
Jumlah	160.924.983.140,00	153.605.793.934,00	95,45

Sumber : Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2024

Tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah dengan 2 (dua) indikator, yaitu : indikator Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB memperoleh capaian sebesar 116,12%, dan indikator Indeks ketahanan pangan

memperoleh capaian sebesar 96,02%, sehingga rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah sebesar 106,07% kategori “sangat baik”. Adapun pagu anggaran untuk sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah sebesar Rp. 160.924.983.140,00 dengan realisasi Rp. 153.605.793.934,00 diperoleh serapan sebesar 95,45%, sehingga dapat terlihat bahwa perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebesar 10,62% dan efektivitas sebesar 111,13%.

Tabel. 3.70
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,218	77,75	95,73	82,018	81,16	98,95	83,618	97,06
Rata-rata capaian kinerja					95,73			98,95		97,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada Kabupaten Banggai yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahunnya. Kualitas air diukur pada sungai, kualitas udara diukur pada kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait

pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 terealisasi sebesar 81,16 dengan capaian kinerja sebesar 98,95%, atau belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 82,018. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 4,27 point, dimana indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banggai tahun 2023 hanya 77,75. Realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 81,16 juga belum memenuhi target tahun akhir RPJMD sebesar 83,618, dimana capaiannya baru sebesar 97,06.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan Serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai :

Tabel 3.71
Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
		Meme nuhi	Ring an	Seda ng	Bera t	Meme nuhi	Ring an	Seda ng	Berat	
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	28	8	0	0	54,44	11,1 1	0,00	0,00	65,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Air mengukur kualitas air berdasarkan parameter seperti kandungan bahan kimia berbahaya, kebersihan air, dan ketersediaan air bersih. Pada tabel diatas terlihat indeks kualitas air di Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 65,56.

Tabel 3.72
Indeks Kualitas Udara

No	Kabupate/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Banggai	4,74	4,80	0,12	0,24	0,18	95,60

	Provinsi Sulawesi Tengah						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Udara mengukur kualitas udara, yang meliputi tingkat polusi udara seperti partikel debu, gas berbahaya, dan bahan pencemar lainnya. IKU Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah sebesar 95,60.

Tabel 3.73
Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi Hutan

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	0,64	81,26	0,00	0,63950048420392	81,26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Lahan Menunjukkan kualitas lahan berdasarkan faktor-faktor seperti kesuburan tanah, penggunaan lahan, dan kerusakan tanah. Pada tahun 2024 indeks kualitas lahan di Kabupaten Banggai sebesar 81,26.

Tabel 3.74
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, 2024

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	65,56	95,60	81,26	81,16	BAIK

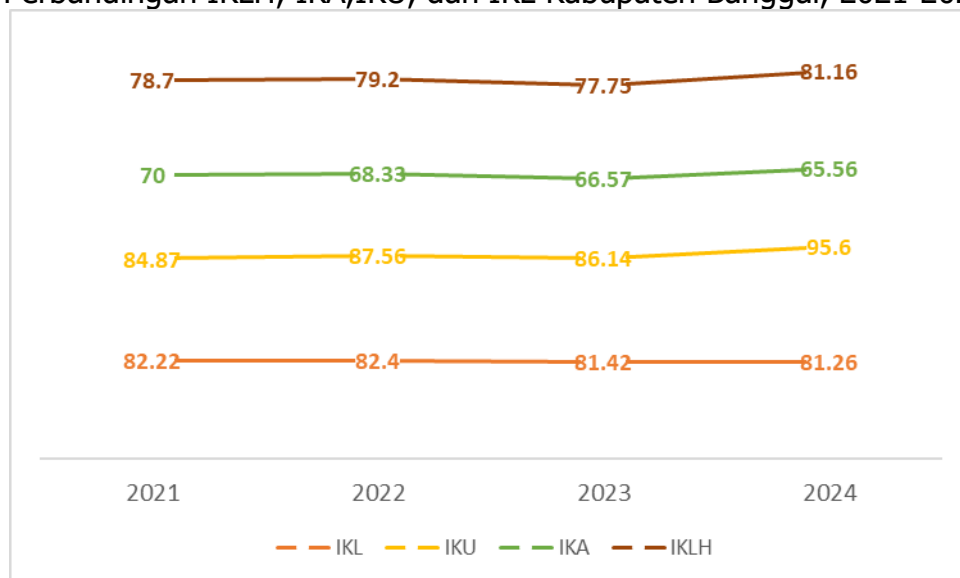
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Banggai mendapatkan nilai IKLH sebesar 81,16 dengan rincian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 65,56, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 95,60, dan Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan (IKL) sebesar 81,26.

Komponen IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Untuk IKA memiliki 8 (Delapan) parameter yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phospat dan Fecal Coliform. IKU memiliki 2 (dua) parameter yaitu NO₂ dan SO₂, serta IKL memiliki 2

(dua) parameter yaitu parameter pertama adalah Tutupan Vegetasi Hutan yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Primer (HLKP), Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS), Hutan Mangrove Primer (HMP), Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS), Hutan Rawa Primer (HRP), Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) dan Hutan Tanaman, kemudian yang parameter kedua adalah Tutupan Vegetasi Non Hutan yang terdiri dari Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau, RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL).

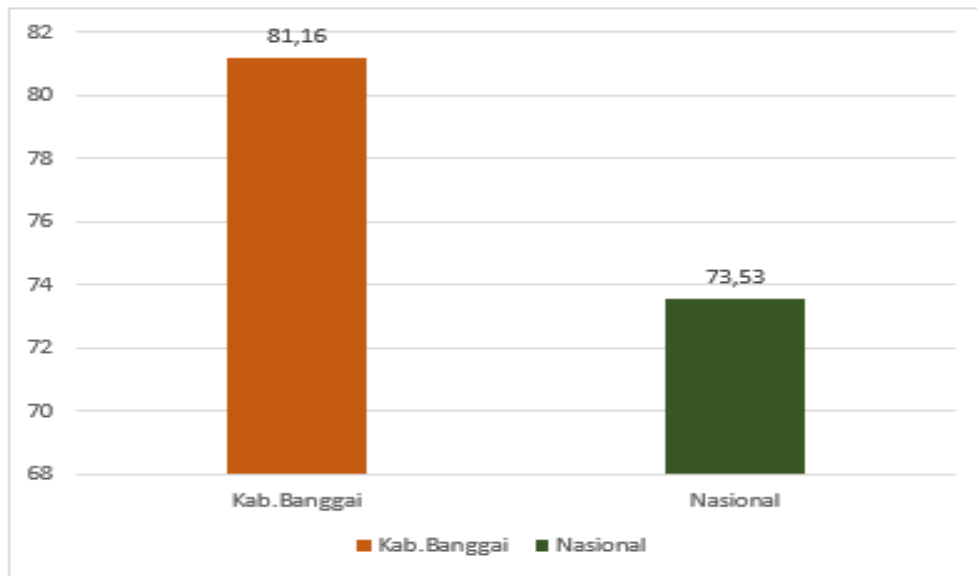
Grafik 3.30
Perbandingan IKLH, IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Dari grafik diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Banggai tahun 2024 di bandingkan tahun 2023, hal tersebut di karenakan oleh peningkatan nilai indeks kualitas udarah dari nilai 86,14 ditahun 2023 menjadi 95,6 ditahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh pengurangan polusi udara, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Upaya pengelolaan kualitas udara sangat berhasil, dengan indeks yang menunjukkan peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2024. Namun, kualitas lahan dan kualitas air mengalami penurunan, yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Grafik 3.31
Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IKLH kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar 81,16 lebih tinggi sebesar 8,62 point dibandingkan realisasi IKLH Indonesia tahun 2023 sebesar 72,54 selisih 8,62 poin antara Kabupaten Banggai dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Banggai lebih terjaga. Faktor utama yang mungkin mendukung kondisi ini meliputi rendahnya tingkat polusi, luasnya tutupan lahan hijau, pengelolaan lingkungan yang baik, kualitas air yang lebih baik, serta tekanan populasi yang lebih rendah.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

1. Penebangan hutan secara ilegal dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman mengutamakan aspek ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.
2. Keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli dalam memberikan pelatihan yang komprehensif.
3. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.
4. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca, yang berdampak pada pertanian dan sumber daya alam.
5. Adanya peningkatan lalu lintas kendaraan..

Upaya untuk meningkatkan tercapainya IKLH, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengurangi emisi gas buang pengguna kendaraan bermotor
2. Pemantauan dan pengawasan terhadap industri dan usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi udara
3. Penanaman pohon secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi dampak polusi
4. Mengadakan kampanye dan program edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan
5. Membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah
6. Membuat dan menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
7. Pengelolaan ruang terbuka hijau

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.75

Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Perencanaan Lingkungan Hidup	533.091.000,00	527.205.800,00	98,90
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.962.642.635,00	2.850.763.058,00	96,22
Pengembangan sistem informasi/data	2.955.178.800,00	2.742.936.598,00	92,82
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.985.150,00	59.847.550,00	99,77
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	60.643.000,00	30.189.686,00	49,78

Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.927.300,00	14.609.300,00	81,49
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	49.999.600,00	45.340.960,00	90,68
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.959.900,00	9.800.900,00	98,40
Pengelolaan Persampahan	10.789.691.300,00	10.352.230.172,00	95,95
Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	196.730.500,00	157.163.000,00	79,89
Jumlah	17.635.849.185,00	16.790.087.024,00	95,20

Sumber : DLH Kab.Banggai, 2024

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 98,95% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 16.790.087.024,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 17.635.849.185,00 atau sebesar 95,20%.

Tabel. 3.76

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

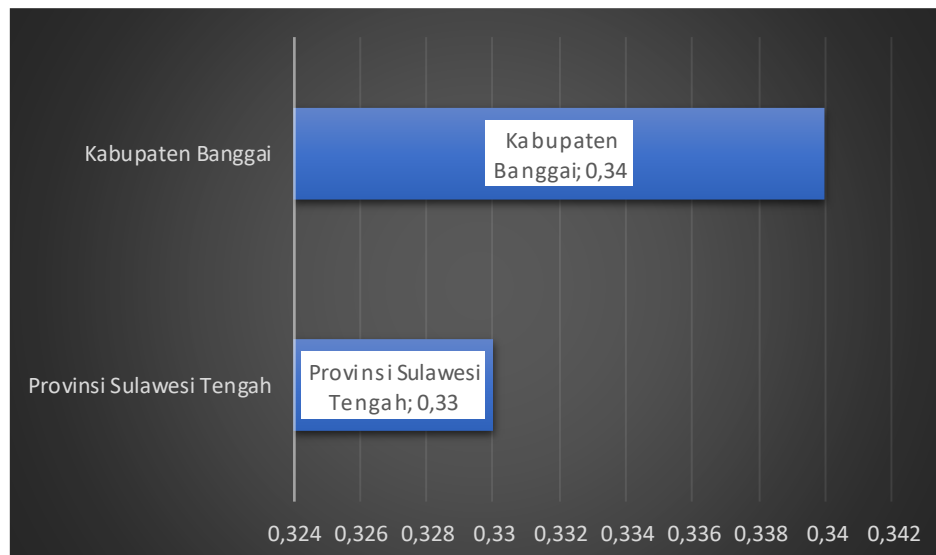
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,56	0,33	12,89	2,74	0,34	12,41	3,10	10,97
Rata-rata capaian kinerja				12,89			12,41		10,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2024 adalah sebesar 2,74% dan terealisasi sebesar 0,34%, dengan capaian hanya sebesar 12,41% atau belum mencapai target yang sudah ditetapkan. jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi tahun 2024 naik sebesar 0,01 point, dan

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 10,97%, atau belum memenuhi target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3,10%.

Grafik 3.32
Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Banggai terealisasi sebesar 0,34%, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan memiliki kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,33%. kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Banggai masih tinggi 0,01 poin dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Banggai memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah.

Kabupaten Banggai dikenal dengan keindahan alamnya, yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai daya Tarik wisata. Salah satu aspek yang diminati wisatawan adalah kuliner khas daerah. Peluang ini dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan membuka usaha rumah makan dan restoran. Sehingga Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penyediaan Akomodasi merupakan Penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan

karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari Hotel Berbintang dan Non Bintang.

Destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada di Kabupaten Banggai, seperti:

- Pulau Dua – Salah satu ikon wisata laut dengan keindahan alam bawah laut yang luar biasa.
- Pantai Kilo Lima – Destinasi favorit dengan panorama pantai yang eksotis.
- Air Terjun Piala, Air Terjun Laumarang, Air Terjun Salodik – Wisata alam yang semakin populer.
- Wisata Bahari – Kabupaten Banggai memiliki banyak pulau kecil dengan ekosistem laut yang kaya, menarik bagi wisata selam dan snorkeling



Tabel 3.77
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan
di Kabupaten Banggai, Tahun 2024

Kebangsaan	Jumlah
Spanyol	15
Jerman	22
Australia	1
Swiss	13
Perancis	66
Portugal	6
India	2
Italia	26
Kanada	7
Belanda	6
Mexico	2
Ceko	2
Amerika Serikat	12
Kenya	2
Swedia	6
China	2
Turki	2
Polandia	6
Thailand	2
Inggris	3
Belgia	2
Arab	1
Selandia	2
Jumlah	208

Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2024

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Sedangkan wisatawan Nusantara ialah setiap pengunjung yang datang dari seluruh penjuru Nusantara, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

Sektor pariwisata, terutama yang berhubungan dengan kunjungan wisatawan, memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai melalui peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari wisatawan yang menginap di hotel atau makan di

restoran meningkatkan pendapatan daerah, maka sektor perhotelan menyumbang pemasukan yang cukup besar, selain itu kunjungan wisatawan dapat meningkatkan Aktivitas Ekonomi dengan menghabiskan uang untuk transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas lainnya hal Ini mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banggai, serta mendorong investasi di sektor pariwisata, peluang investasi dalam bidang perhotelan, restoran, dan objek wisata semakin meningkat. Investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor ini jika tren kunjungan terus meningkat dan juga menciptakan lapangan kerja baik langsung (di hotel, restoran, agen wisata) maupun tidak langsung (pengrajin, pedagang oleh-oleh, transportasi lokal).

Jumlah rumah makan dan restoran di Kabupaten Banggai mencapai 538 unit, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Luwuk Selatan (159 unit), diikuti oleh Kecamatan Luwuk (154 unit) dan Kecamatan Luwuk Utara (42 unit).

Tabel 3.78
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan
di Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024

Kecamatan (District)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Toili	22	22	22	28
Toili Barat	9	9	9	10
Moilong	24	24	24	26
Toili Jaya	-	9	-	5
Batui	-	-	-	-
Batui Selatan	12	12	12	14
Bunta	10	10	10	14
Nuhon	0	0	0	7
Simpang Raya	0	0	0	4
Kintom	7	7	7	17
Luwuk	127	127	127	154
Luwuk Timur	8	8	8	8
Luwuk Utara	24	24	24	42
Luwuk Selatan	171	171	171	159
Nambo	4	4	4	6
Pagimana	11	11	11	14
Lobu	2	2	2	2
Bualemo	1	1	1	2
Lamala	12	12	12	14
Masama	0	0	0	1
Mantoh	0	0	0	3
Balantak	0	0	0	1

Balantak Selatan	0	0	0	0
Balantak Utara	0	0	0	0
Total Kabupaten Banggai	456	456	456	538

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (*Banggai Dalam Angka 2025*)

Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024, jumlah total rumah makan/restoran di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan dari 456 unit (2021-2023) menjadi 538 unit pada 2024. Kecamatan dengan jumlah restoran tertinggi pada 2024 adalah Luwuk 154 rumah makan, Luwuk Selatan 159 rumah makan, dan Luwuk Utara 42 rumah makan. Ketiga wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis di Kabupaten Banggai. Kecamatan yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah restoran antara 2023 dan 2024 antara lain kecamatan Toili dari 22 rumah makan menjadi 28 rumah makan, Kecamatan Bunta dari 7 rumah makan menjadi 14 rumah makan, Kecamatan Nuhon dari 10 rumah makan menjadi 17 rumah makan, Luwuk Utara dari 24 rumah makan menjadi 42 rumah makan dan Kecamatan Luwuk dari 127 rumah makan menjadi 154 rumah makan. Kenaikan signifikan di Luwuk dan Luwuk Utara mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah perkotaan, sementara stagnasi di beberapa kecamatan bisa disebabkan oleh minimnya pertumbuhan ekonomi atau preferensi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, sektor kuliner dan restoran dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai di tahun 2024.

Jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang dan non bintang di Kabupaten Banggai, yaitu

Tabel. 3.79
Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat tidur yang tersedia pada Hotel Bintang di Kabupaten Banggai, 2020-2024

Rincian Items	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Akomodasi/ Accomodations	3	3	3	3	3
Kamar/ Rooms	271	270	269	269	270
Tempat Tidur/ Beds	342	331	315	315	319

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

Hotel berbintang adalah hotel yang telah diklasifikasikan berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau Kementerian Pariwisata. Klasifikasi ini biasanya diberikan berdasarkan fasilitas, layanan, dan kualitas yang ditawarkan oleh hotel.

Berikut adalah daftar hotel berbintang di Kabupaten Banggai, beserta klasifikasi bintangnya:

1. Estrella Hotel & Conference Luwuk

Hotel ini menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan ruang konferensi. Terletak strategis di dekat pantai dan pusat kota.

2. Swiss-Belinn Luwuk

Menyediakan kamar-kamar modern dengan pemandangan laut, restoran, dan fasilitas pertemuan. Cocok untuk pelancong bisnis dan wisatawan.

3. Hotel Santika Luwuk - Sulawesi Tengah

Hotel ini memiliki fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan restoran. Terletak dekat dengan pantai dan menawarkan pemandangan indah.

Ketiga hotel ini berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan bisnis di Kabupaten Banggai, ketiga hotel ini tentunya sangat mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan akomodasi berkualitas bagi wisatawan dan pelaku bisnis., menyerap tenaga kerja dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik dalam operasional hotel maupun sektor pendukung (transportasi, kuliner, dan jasa lainnya) dan juga meningkatkan pendapatan daerah Melalui pajak hotel, pajak restoran, serta kontribusi ekonomi dari tamu yang menginap.

Tabel. 3.80

Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat tidur yang tersedia pada Hotel Non Bintang di Kabupaten Banggai, 2020-2024

Rincian Items	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Akomodasi/ Accomodations	94	89	101	80	91
Kamar/ Rooms	1.393	1.189	1.312	1.141	1.198
Tempat Tidur/ Beds	1.766	1.663	1.787	1.550	1.597

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

Tabel ini menyajikan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non bintang di Kabupaten Banggai selama periode 2020-2024. Jumlah Hotel non-bintang di Kabupaten Banggai mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2024. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah kompetisi dari hotel berbintang, perubahan tren wisatawan yang lebih memilih hotel berbintang karena faktor kenyamanan dan keamanan, serta penutupan beberapa hotel non-bintang karena kurangnya permintaan. Sektor ini berperan penting dalam mendukung pariwisata lokal, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Dengan strategi yang tepat, hotel non-bintang dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Banggai dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Infrastruktur Pariwisata dimana akses jalan menuju beberapa destinasi masih terbatas, terutama ke daerah wisata bahari dan pedalaman.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana di tempat wisata seperti toilet umum, tempat parkir, papan informasi, dan pusat informasi wisata masih kurang memadai.
3. Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi, informasi dan pemasaran pariwisata.
4. Kurangnya SDM Profesional di Bidang Pariwisata dimana masih terbatasnya tenaga kerja dengan keterampilan dalam hospitality, pemandu wisata, dan manajemen destinasi.
5. Belum Optimalnya Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat → Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata masih perlu ditingkatkan..

Alternative dan solusi yang dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi umum, dan jaringan internet di lokasi wisata.
2. Pengembangan event tahunan seperti Festival-festival Banggai untuk menarik lebih banyak wisatawan

3. Penguatan branding pariwisata Banggai melalui kampanye media sosial, pembuatan website, dan aplikasi wisata.
4. Kolaborasi dengan travel influencer, vlogger, dan media untuk memperkenalkan destinasi unggulan Banggai.
5. Kemudahan akses permodalan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) atau hibah bagi UMKM kreatif di sektor pariwisata dan kuliner.
6. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dalam mengembangkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
7. Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi pangan yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah", yaitu:

Tabel 3.81
Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.626.801.911,00	1.595.350.700,00	98.07
Pemasaran Pariwisata	2.372.146.470,00	2.318.926.237,00	97.76
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	523.701.940,00	511.340.456,00	97.64
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	333.385.000,00	309.422.976,00	92.81
Jumlah	4.856.035.321,00	4.735.040.369,00	97,51

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai, 2024

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 12,41% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar

Rp. 4.735.040.369,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.856.035.321,00 atau sebesar 97,51%.

Tabel. 3.82
 Sasaran Strategis 9
 Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui
 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,16	24,35	48,54	52,21	27,17	52,04	56,31	48,25
Rata-rata capaian kinerja				48,54			52,04		48,25

Sumber : *Disdikbud, Dispursipan, DP2KBP3A*

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2024 dengan target sebesar 52,21 dan terealisasi sebesar 27,17, dengan capaian kinerja sebesar 52,04% sehingga dapat dikatakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tidak mencapai target RPJMD tahun 2024. Realisasi indeks Pembangunan kebudayaan tahun 2024 sebesar 27,17 mengalami kenaikan sebesar 2,82 point dari realisasi tahun 2023 sebesar 24,35. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 48,25%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Saat ini capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai dihitung berdasar representasi dari prosentase capaian dari indikator yaitu : indikator ekonomi budaya, indikator pendidikan, indikator warisan budaya, indikator gender, dan budaya literasi.

Dimensi pertama, ekonomi budaya menunjukkan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, dapat terepresentasi dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pertunjukan seni berjumlah 1.362 orang dari jumlah

penduduk Kabupaten Banggai 288.916 jiwa, sehingga diperoleh nilai dimensi ekonomi budaya 0,47.

Tabel 3.83

Sanggar/Komunitas Seni Pertunjukkan Kabupaten Banggai Tahun 2024

NO.	Nama Sanggar/ Komunitas Seni	Pimpinan Sanggar	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	No. SK Bupati/ Gubernur/Pusat
1	Sanggar Seni Maleo	Olden Liong None A.Mpd	30 orang	4 Oktober 2000	
2	Komunitas Seni Rompong	Subrata Kalape, S.Sn	120 orang	1 April 2005	Akte Notaris No. 31 Tgl 30 Desember 2013
3	Bengkel Teater Cahaya	Maryati YS. Tapo	60 orang	19 Januari 2006	556/08/DISBUDPA R/2009
4	Lab. Art Polabotan	Lilia Djano	98 orang	2006	
5	Animo Tampurung	Pandi	15 orang		
6	Okulele	Santi, MA	10 orang		
7	Sanggar Seni Lintang	Amalia Laise	50 orang	2007	Akte Notaris No. 32 Tgl 30 Desember 2013
8	Sanggar Perina	Hj. Ulfa Kasim		1987	
9	Studio Seni Budaya Banggai	Suparman Tampuyak	10 orang	5 Mei 2006	Akte Notaris No. 30 Tgl 30 Desember 2013
10	Babasal Mombasa	Sitti Qomar	25 orang	2016	
11	Sanggar Teater Athena	Ikkal Maulana Aziz	10 Orang	4 Agustus 2020	
12	Seni Babasal	Siti M. Maulana, S.Pd	60 orang	10 Januari 2006	
13	Komunitas Karambangan	Hanis Sidalis	6 orang		
14	Komunitas Silat	Lauba	15 orang	1998	
15	Tea' Eku	Bpk Beni Diktus Bapa	20 orang	1998	
16	Zombie (Zona Orientasi Muda Berinspirasi Inovatif & Edukatif)	Jerry Arianto Mahmud	50 orang	13 Maret 2016	
17	Karambangan Konambota	Uspan Habsyi	7 orang		
18	Sanseikano (Sanggar Seni Mapakat Nambo)	Jusri Mansoba	48 orang	17 November 2017	
19	Gelora Nambo Padang	Yarman Patahe	10 orang		
20	Jalin Nambo Masaangu (JNM)	Arpin Djibo	10 orang		
21	Turonggo Lestari Budoyo	Rebo	50 orang		
22	Kudo Budi Budaya Padepoan Terata I	Zaenuri	40 orang		
23	Gong Bleganjur	I Kadek Bagiasa	30 orang		

24	Rumah Pemberdayaan ibu dan anak	Alwia Datu Paon	30 orang		
25	Wahyu Raya Saputra	Wagito	25 orang	28 Agustus 2014	
26	Seni Budaya Tradisional	Satromo	30 orang	1978	
27	Turonggo Sari Budaya	Sajid	40 orang	2000	
28	Tronggo Joyo	Budiono	40 orang	1970	
29	Sanggar Seni Lainsama	Gafar Tokalang	20 Orang	2021	
30	Palealu	Waret Kalapot	27 orang	2012	
31	Komunitas Kulintang	Pian Bundu	8 orang	2006	
32	Komunitas Umosulen	Taren Nonasi	25 orang	2010	
33	Komunitas Samrah	Wardah Abugar	8 orang	2017	
34	Sanggar Kobelesanta	Drs. Risno Lamonjong	32 orang	2010	
35	Mojinta	Laela Gusriny, S.Pd	15 orang	2006	
36	Kreatif Karya Seni	Tati Suli Lestari	20 orang	2019	
37	Kreatif Karya Seni	Wahyudi	15 orang	2014	
38	Trisno Budoyo	Rodikin	20 orang	2013	
39	Sanggar Posingkabotan	Zulfianto Bunai	26 orang	2020	
40	Sanggar Seni Tirta Kencana		15 orang		
41	Turonggo Makmur Budoyo	Kanidjo	50 orang	1998	
42	Kalibosi	Djubair Sambudu	25 orang	2000	
43	Konau	Rahman Sangkota	10 orang	2017	SK CAMAT No. 141/258/SK CMT - NHN/2019 Tgl. 21 Februari 2019
44	Posingkabotan	Zulfianto Bunai	38 Orang	2018	
45	Athena	Iqbal			
46	Paguyuban Jathilan Tresno Budoyo	Boinem	40 Orang	2005	
47	Pura Manik Geni	Ni Ketut Susilawati	10 Orang	2016	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai, 2024

Dimensi kedua, warisan budaya terepresentase dari persentase warisan budaya baik benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan yaitu 26 warisan budaya benda cagar budaya benda terhadap 35 warisan budaya yang ada sehingga diperoleh nilai dimensi warisan budaya 74,29.

Tabel 3.84
Cagar Budaya Kabupaten Banggai Tahun 2024

No.	Nama Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Lokasi	Tahun Penetapan	Keterangan
1	Masjid Nurul Huda Desa Lambangan	Bangunan	Kecamatan Pagimana	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
2	Jembatan Lobu	Struktur	Kecamatan Lobu	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
3	Rumah Adat Desa Lambangan	Bangunan	Kecamatan Pagimana	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
4	Kantor Dprgr	Bangunan	Kecamatan Luwuk Kel.Karaton	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
5	Rumah Bapak Zuhri Noho	Bangunan	Kecamatan Kintom	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
6	Makam Abdullah Bin Abd. Kadir Djaelani Alkusaini/Pekuburan Je're	Struktur	Kecamatan Kintom	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
7	Rumah Sakit Umum Luwuk /Akper	Bangunan	Kecamatan Luwuk	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
8	Rumah Kapitan (Museum Daerah)	Bangunan	Kecamatan Luwuk	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
9	Gereja Tua Simpangan	Bangunan	Kecamatan Masama	2018	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
10	Kuburan Perahu (Kubuangan Duangan)	Situs	Kecamatan Lobu Desa : Bolobungakang	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
11	Sumur Tua	Struktur	Kecamatan Lobu	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
12	Masjid Tua Annur Lobu	Bangunan	Kecamatan Lobu	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
13	Benteng Konambota	Struktur	Kecamatan Nambo	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
14	Makam Ambaral	Struktur	Kecamatan Masama (Desa Taugi)	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
15	Makam Rajawali	Struktur	Kecamatan Masama (Desa Taugi)	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020

16	Dapur Umum Dan Bunker Jepang	Struktur	Kecamatan Balantak Utara (Ds.Kampangar)	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
17	Benteng Raja Mbulang	Struktur	KECAMATAN BALANTAK (Desa Dale-Dale)	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
18	Komplek Kodim Luwuk	Situs	Kecamatan Luwuk	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
19	Rumah Tinggal Bapak Husen Almahdali	Bangunan	Kecamatan Bunta	2020	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
20	Kantor Sangaji Bunta/ Kantor Kelurahan Salabenda	Bangunan	Kecamatan Bunta	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
21	Rumah Tinggal Keluarga Bukalang	Bangunan	Kecamatan Bunta	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
22	Benteng Kintom	Struktur	Kecamatan Kintom	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
23	Rumah Raja Banggai S.A.Amir Kel.Bungin	Bangunan	Kecamatan Luwuk	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
24	Kuburan Bosano Tangan Besi Tangkian	Situs	Kecamatan Kintom	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
25	Bekas Rumah Tinggal Dan Sumur Van Der Berk	Bangunan/ Struktur	Kecamatan Masama	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
26	Rumah Raja Banggai S.A.Amir Kel.Soho	Bangunan	Kecamatan Luwuk	2023	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dimensi ketiga, pendidikan dapat terepresentasi dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,81, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,35 dan diperoleh nilai dimensi pendidikan 11,08.

Dimensi keempat, Gender dapat terepresentasi dari jumlah anggota parlemen perempuan 12 orang terhadap anggota parlemen laki-laki 35 orang diperoleh Rasio sebesar 34,29% dan dimensi gender terepresentasi dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 56,41% terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 86,46% diperoleh rasio sebesar 65,24%, sehingga diperoleh nilai dimensi gender sebesar 49,76

Dimensi Kelima yaitu Budaya Literasi, Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Budaya literasi terepresentase dari persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik yang berjumlah 156 orang terhadap 321.424 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas yaitu sebesar 0,05%, budaya literasi juga terepresentase dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat yaitu 1.167 orang terhadap 321.424 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas yaitu sebesar 0,36%, dan budaya literasi juga terepresentase dari jumlah penduduk yang pernah mengakses internet yaitu 1.167 orang terhadap 321.424 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas yaitu 0,36%, sehingga diperoleh nilai dimensi budaya literatur 0,26%

Tabel 3.85
Jumlah penduduk/pengunjung perpustakaan tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk yang membaca buku selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	156 Orang
2	Penduduk yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	1.167 Orang
3	Penduduk yang mengakses internet	1.167 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai, 2024

Tabel 3.86
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024

No	Dimensi	Nilai
1	Ekonomi Budaya	0,47
2	Warisan Budaya	74,29
3	Pendidikan	11,08
4	Gender	49,76
5	Budaya Literasi	0,26
IPK Total		27,17

Adapun faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan cagar budaya
2. Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.
3. Keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya yang tinggi
4. Adanya pertunjukan seni sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.
5. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan kebudayaan lokal.

Pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan RI menggelar Festival Lipu Celebes 2024. Festival ini adalah momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah



yang ada di daerah kita. Dalam acara ini salah satu sorotan utama adalah kehadiran Ekspedisi Perahu Sandeg, simbol budaya maritim Sulawesi yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat pesisir. Beragam acara menarik disuguhkan dalam Festival Lipu Celebes 2024, termasuk pertunjukan seni tradisional, pameran budaya, dan bazar produk lokal. Festival ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga peluang untuk mempromosikan potensi Kabupaten Banggai ke Tingkat nasional dan internasional.

Dalam proses upaya pencapaian pembangunan kebudayaan, terdapat hambatan/kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, sehingga partisipasi mereka cenderung rendah.

2. Kurangnya fasilitasi atau pembinaan bagi kelompok seni guna menguatkan pengetahuan mereka terkait seni dan tradisi
3. Kurangnya Pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebudayaan dan Sejarah lokal, sehingga membuat minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas.
4. Pemanfaatan objek-objek budaya masih minim.
5. Pengaruh budaya asing dan globalisasi dapat mengancam keberadaan dan pelestarian kebudayaan lokal.

Terkait permasalahan tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku seni dan budaya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.
2. Melibatkan generasi muda dan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Kolaborasi seni tradisi dengan seni modern untuk menarik minat generasi muda dan masyarakat.
3. Perlunya upaya peningkatan sektor ekonomi kreatif bidang kebudayaan, dengan menjalin Kerjasama sektor pariwisata dalam hal promosi dan penataan wilayah.
4. Perlunya dukungan infrastruktur digital, berupa sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi guna mempromosikan budaya yang ada.
5. Mendorong komunitas untuk menciptakan produk budaya yang unik dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar global

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel 3.87

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Pengembangan Kebudayaan	2.657.120.000,00	2.297.173.939,00	86,45
Pengembangan Kesenian Tradisional	352.136.700,00	259.054.960,00	73,57

Pembinaan Sejarah	845.581.000,00	731.493.500,00	86,51
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	657.239.000,00	297.429.160,00	45,25
Pengelolaan Permuseuman	1.225.420.700,00	973.935.630,00	79,48
Jumlah	5.737.497.400,00	4.559.087.189,00	79,46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 52,04% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.559.087.189,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.737.497.400,00 atau sebesar 79,46%.

Tabel. 3.88
Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP
Kabupaten Banggai

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPJMD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026 (%)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	75	BB	BB*	100,00	A	89,45
2	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	50,61 Inovatif	75	Sangat Inovatif/ Terinovatif	Inovatif**	85,44	Sangat Inovatif/ Terinovatif	79,75
3	Nilai SAKIP	Predikat	A	BB	75	AA	BB***	83,69	AA	82,78
Rata-rata capaian kinerja				75,00			89,71		83,99	

Sumber : * dan *** Hasil Evaluasi KemenPANRB 2024

** Hasil Penilaian Kemendagri 2024

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai. pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri

PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi reformasi Birokrasi tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, Terciptanya tata Kelola Pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.89
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	65,41
2	RB Tematik	20	10,42
3	Indeks RB	120	76,03
			BB

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Dari tabel tersebut diatas nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian PANRB yang di kaluarkan di tahun 2025. Evaluasi ini mencakup dua komponen utama, yaitu RB General dan RB Tematik, yang kemudian dihitung untuk memperoleh Indeks RB keseluruhan. RB General diberi bobot sebesar 100 dan memperoleh nilai 65,41. Komponen ini mencerminkan evaluasi umum terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai, termasuk aspek tata kelola pemerintahan, efektivitas organisasi, dan kualitas pelayanan publik. RB Tematik memiliki bobot 20 dengan nilai 10,42. Komponen ini menilai reformasi birokrasi dalam isu-isu strategis tertentu yang menjadi fokus pemerintah pusat, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi,

stunting, dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Indeks RB keseluruhan dihitung berdasarkan kedua komponen tersebut, menghasilkan skor 76,03, yang masuk dalam kategori BB.

Dengan nilai 76,03, Kabupaten Banggai berada dalam kategori BB, yang menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Nilai 65,41 pada RB General menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi secara umum. Sedangkan dengan nilai 10,42 dari bobot maksimal 20, RB Tematik menunjukkan bahwa reformasi birokrasi terkait isu strategis masih perlu diperkuat. Hal ini bisa berarti bahwa program-program tematik, belum sepenuhnya optimal atau memiliki kendala dalam implementasi.

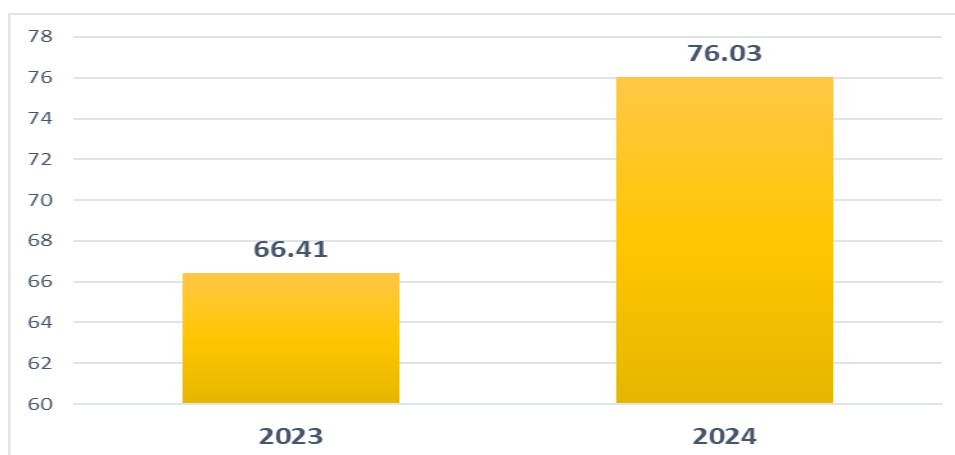
Berikut perkembangan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2023 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.90
Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Tahun 2023 Hingga Tahun 2024

Penilaian	Bobot	Nilai	
		2023	2024
RB General	100	59,44	65,41
RB Tematik	20	6,97	10,42
Indeks RB	120	66,41 (B)	76,03 (BB)

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Grafik 3.33
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2023-2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Berdasarkan grafik dan tabel tersebut di atas terlihat bahwa terjadi Kenaikan indeks RB dari 66,41 pada tahun 2023 menjadi 76,03 pada tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 9,62 poin. RB General mengalami kenaikan dari 59,44 pada tahun 2023 menjadi 65,41 pada tahun 2024, terjadi Kenaikan 5,97 Poin. begitu juga Nilai RB Tematik mengalami kenaikan, dari nilai 6,97 pada tahun 2023 menjadi 10,42 pada tahun 2024, terjadi Kenaikan 3,45 Poin. Meskipun meningkat, nilai RB Tematik masih relatif lebih rendah dibandingkan RB General, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di sektor-sektor strategis (misalnya investasi, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian inflasi) masih perlu ditingkatkan.

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024, baik skor, skor indeks, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.91
Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai - LKE KEMENPANRB

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.55	2.55	Masih terdapat target pada penetapan kegiatan utama yang belum berorientasi peningkatan kinerja dan belum seluruh memenuhi kriteria "Baik" sesuai Kepmenpan RB No. 182 Tahun 2024	Mereviu kembali penetapan target indikator kegiatan utama agar lebih berorientasi peningkatan kinerja dan memastikan target yang ditetapkan memenuhi kriteria "Baik" sesuai Kepmenpan RB No. 182 Tahun 2024
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5.95	-	-
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	0	0	Masuk dalam lokus evaluasi namun tidak mengisi evaluasi mandiri/instansi belum ada inisiasi untuk mengatur sistem kerja	-
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.49	2.79	a. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat. b. Melaksanakan review kinerja internal secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja dan permasalahan yang	a. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat. b. Melaksanakan review kinerja internal secara berkala untuk mengetahui capaian

terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi. c. Melakukan pengarsipan dokumen secara digital. d. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan e. Mengoptimalkan pemanfaatan Website pada pemerintah daerah dan perangkat daerah belum untuk keterbukaan informasi.

kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi. c. Melakukan pengarsipan dokumen secara digital. d. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan e. Mengoptimalkan pemanfaatan Website pada pemerintah daerah dan perangkat daerah belum untuk keterbukaan informasi. a. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko. b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sertifikasi manajemen risiko. c. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon; d. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan internal dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan; e. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan	3.5	0.5	0.5	-	-
---	------------	-------------------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	---	---

		Reformasi Birokrasi	ZI					
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	75.74	3.03	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	-
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	53.31	1.33	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	-
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	1	0.5	Belum menyusun renaksi, jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit beberapa tidak lanjut belum substantif	Perlu menyusun renaksi, mempromosikan kanal aduan, memperbaiki kualitas tindak lanjut
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	79.71	1.99	a. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik telah dilakukan pada sebagian proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; b. Beberapa bukti dukung dalam setiap proses kebijakan masih perlu diperjelas/disempurnakan.	1. Memperkuat dukungan pimpinan dalam pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk pengumpulan data dan informasi 2. Meningkatkan penerapan tata kelola. kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: a. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk

menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki.

b. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: 1) Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 2) Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan. 3) Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan. 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan. 5) Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.

10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2.5	88	2.2	Kategori A (Sangat Baik)	Memperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.62	1.31	<p>Penerapan Aspek Standar Data Statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, tetapi masih dengan standarnya masing-masing. Selain itu, penerapan Aspek Interoperabilitas Data masih berada pada tingkat rintisan. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan indikator tersebut. - Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Aspek Standar Data Statistik sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, tetapi masih dengan standarnya masing-masing. Selain itu, penerapan Aspek Interoperabilitas Data masih berada pada tingkat rintisan. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan dalam penerapan indikator tersebut. • Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing-masing. • Penerapan seluruh aspek pada Domain Proses Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Banggai perlu menerapkan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banggai juga perlu menyusun peraturan/kaidah baku terkait penerapan Aspek Standar Data Statistik dan Interoperabilitas Data terhadap seluruh produsen data. - Pemerintah Kabupaten Banggai perlu menyusun peraturan/kaidah baku terkait penerapan Aspek Aksesibilitas dan aspek Keterbandingan dan Konsistensi yang berlaku untuk seluruh produsen data. - Pemerintah Kabupaten Banggai perlu melaksanakan rencana pembangunan statistik yang telah ditetapkan dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan big data.

Statistik di Pemerintah Kabupaten Banggai sudah berada pada predikat baik dengan adanya standar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2021 yang mengatur tata cara perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data di lingkungan Kabupaten Banggai.

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait penyelenggaraan forum SDI telah dilaksanakan oleh Walidata Kabupaten Banggai, melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut.

Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah terpenuhi dengan melakukan rapat mengenai kegiatan statistik sektoral serta adanya SK mengenai forum satu data.

- Pada Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyusun dan menetapkan Perencanaan Pembangunan Statistik, tetapi perencanaan tersebut belum dilaksanakan. Pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik juga belum dilakukan di Kabupaten Banggai.

12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	77.11	1.93	1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%; 4) Terdapat transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%; 6) Pencatatan e-Kontrak di atas 70%; 7) Ketersiaan JF PPBJ belum memenuhi 100%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).	1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP/SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan; 4) Pertahankan kinerja realisasi toko daring; 5) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing; 6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-Kontrak. 7) melakukan perhitungan kebutuhan formasi kembali untuk memastikan jumlah kebutuhan yang tepat. 8) implementasi dengan baik pencapaian tersebut, selanjutnya persiapan menuju tingkatan selanjutnya
13	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	196	1.91	2023	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	3.28	1.31		

15	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	95.83	1.92		Melaksanakan saran dalam surat Ketua Ombudsman yang telah disampaikan
16	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3.58	6.45	Predikat Sangat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4	76.94	3.08	Terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini	-
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	52.94	2.41	Masih terdapat sebagian indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai 90%	Meningkatkan kembali capaian atas indikator kinerja yang belum tercapai dengan menganalisa penyebab tidak tercapainya indikator tersebut, sehingga pada periode berikutnya indikator kinerja tersebut dapat tercapai diatas 90% capaiannya.
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5	WTP	-

20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.66	3.19	-	-
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlaq	4	78.25	3.13	Kategori Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada evalbudker.menpan.go.id dengan akun instansi
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	64.89	6.49	Internal: 70.07; Eksternal: 81.16; Eksp: 56.4	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banggai dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Banggai mendapat skor SPI sebesar 64.89. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Banggai sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga,

								sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	83.05	6.64	-	Pertahankan pelaksanaan SKM< Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
24	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan	1	0.76	0.76	Sasaran yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berorientasi hasil untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, sebagai contoh sasaran tersalurnya bantuan permodalan sarana dan prasarana produksi belum berorientasi hasil karena belum menggambarkan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan sesuai dengan permasalahan masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Mereviu kembali sasaran yang telah ditetapkan agar lebih berorientasi hasil untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,79	0,79	Sasaran yang telah ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, sebagai contoh pada permasalahan kurangnya legalitas usaha mikro dengan penetapan sasaran meningkatnya jumlah usaha yang	Mereviu kembali sasaran yang telah ditetapkan agar lebih relevan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan

							melaksanakan kemitraan usaha mikro	
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.64	0.64	1. Sasaran yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berorientasi hasil untuk menjawab permasalahan, seperti sasaran "terlaksananya kegiatan edukasi tentang pencegahan stunting bagi keluarga risiko stunting" 2. Rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai penjabaran mencapai keberhasilan RB Tematik belum terdapat pendekatan atau upaya digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting	1. Mereviu kembali sasaran yang telah ditetapkan agar lebih berorientasi hasil 2. Mereviu kembali rencana aksi yang telah disusun dengan menambahkan pendekatan melalui digitalisasi administrasi pemerintahan
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	1	1	-	-
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0	0	Masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya menjawab permasalahan sebagai contoh pada sasaran "terpenuhinya bahan pokok" daerah pengelola dana penanggungan inflasi belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perencanaan penanggulangan inflasi bersifat sementara sehingga kebijakan penganggaran yang diambil tidak tepat sasaran	Mereviu kembali sasaran yang telah ditetapkan agar lebih berorientasi hasil untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi
29	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian	3	2.02	2.02	Data angka kemiskinan digunakan dari BPS Maret 2024	-

			Dampak)					
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	Data realisasi investasi Triwulan III 2023	-
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.75	0.75	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	-
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri	3	2.96	2.96	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2081	-
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	-
34	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	0	0	Instansi belum menyusun Arsitektur SPBE sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pencapaian positif yang telah diraih oleh Kabupaten Banggai:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kabupaten Banggai memperoleh skor 6.45 dalam indeks SPBE, yang menunjukkan predikat "Sangat Baik". Hal ini mencerminkan kemajuan dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung efisiensi administrasi pemerintahan.

2. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Skor 3.03 menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Banggai telah berjalan cukup baik. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih berorientasi pada hasil (outcome).

3. Opini WTP dari BPK

Kabupaten Banggai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Dengan skor 1.93, Kabupaten Banggai menunjukkan adanya progres dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan e-tendering dan transaksi digital.

Disamping pencapaian tersebut, evaluasi juga mengungkapkan sejumlah kelemahan yang perlu segera diperbaiki:

1. Zona Integritas (ZI) Masih Rendah

Kabupaten Banggai hanya memperoleh skor 0.5 dalam pembangunan Zona Integritas. Ini menunjukkan bahwa upaya membangun lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi masih belum optimal.

2. Survei Penilaian Integritas (SPI) Mengindikasikan Kerentanan Korupsi

Dengan skor 64.89, Kabupaten Banggai masuk dalam kategori "rentan terhadap korupsi". Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi belum efektif, dan masih ada risiko tinggi terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan.

3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Masih Rendah

Skor 0.5 pada indikator ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya promosi kanal aduan atau lemahnya tindak lanjut dari pemerintah daerah.

4. Digitalisasi Arsip Belum Optimal

Dengan skor 1.33, digitalisasi pengarsipan di Kabupaten Banggai masih tergolong rendah. Padahal, digitalisasi arsip merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

5. Pengendalian Inflasi Belum Efektif

Kabupaten Banggai mendapatkan skor 0.0 dalam indikator ini, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan kebijakan pengendalian inflasi masih bersifat sementara dan tidak tepat sasaran.

6. Indeks pengentasan kemiskinan masih rendah, Dengan skor 2.02, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data.

7. Realisasi investasi belum optimal, dengan skor 1.5, menandakan adanya kendala dalam menarik investor.

8. Digitalisasi dalam penanganan stunting masih kurang maksimal, dengan skor 0.75.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasinya:

1. Penguatan Zona Integritas dan Pencegahan Korupsi

- Meningkatkan pengawasan internal melalui audit berkala.
- Menerapkan sistem whistleblowing yang efektif untuk memberikan perlindungan bagi pelapor dugaan korupsi.
- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

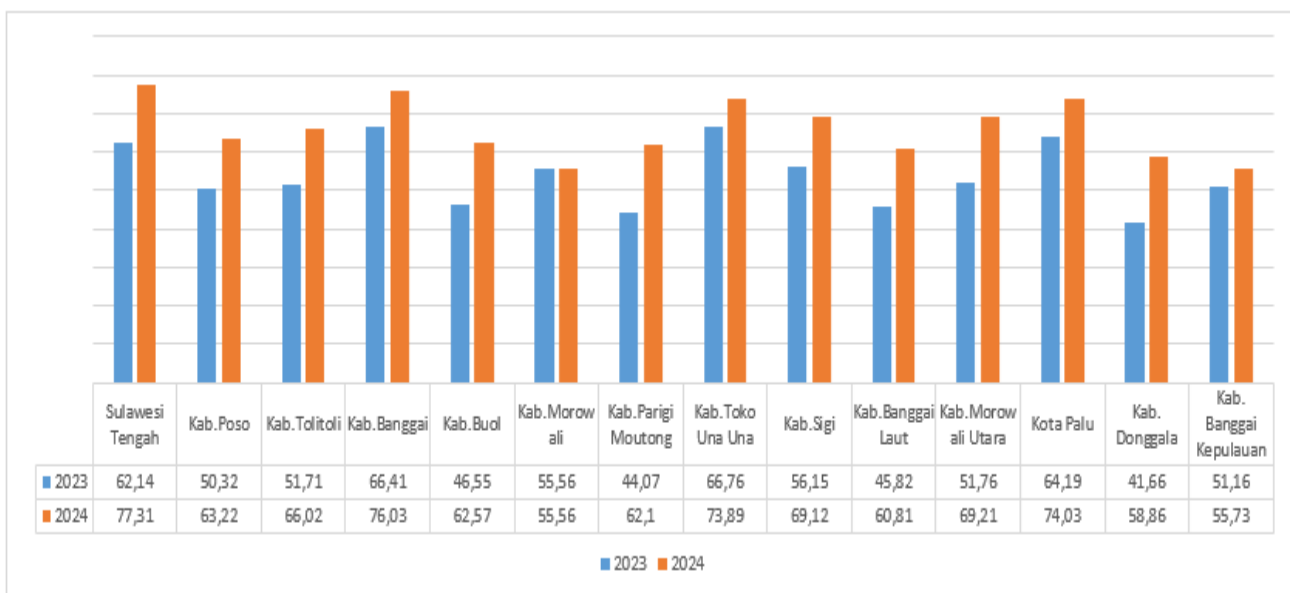
2. Peningkatan Efektivitas Layanan Publik

- Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat dan memastikan tindak lanjut yang substansial terhadap laporan yang masuk.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik guna meningkatkan akuntabilitas layanan.

3. Optimalisasi Pengelolaan Kebijakan Digitalisasi
 - Meningkatkan digitalisasi arsip untuk mempercepat akses terhadap dokumen pemerintahan.
 - Mengembangkan platform layanan digital yang lebih terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas ASN dan Tata Kelola SDM
 - Memberikan pelatihan berkala bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan publik.
 - Menerapkan sistem merit dalam pengelolaan SDM guna memastikan promosi dan mutasi berbasis kinerja.
5. Perbaikan Kebijakan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi
 - Menyusun strategi pengendalian inflasi yang berbasis data dan kebutuhan daerah.
 - Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal.

Grafik 3.34

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai dengan Provinsi/Kab/Kota se Sulawesi Tengah tahun 2023, 2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB (Data di Olah Biro Organisasi Prov. Sulawesi Tengah)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten di tahun 2023 memperoleh nilai Reformasi Birokrasi tertinggi pertama jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun pada tahun 2024 memperoleh nilai tertinggi kedua setelah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah dilaksanakan validasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM), *Scientific Modeling Application, Research, and Training For City Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik universitas Gadjra Mada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dimana pada Pasal 388 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan kepala Daerah Melaporkan Inovasi Daerah Kepada Menteri Dalam negeri dan Menteri Dalam negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan Kepala Daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan good governance;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan

4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Target Indeks Inovasi Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD untuk Tahun 2024, yaitu predikat "Sangat Inovatif", sedangkan realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2024 mendapatkan nilai 59,81 dengan predikat "Inovatif" predikat tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. Sehingga realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2024 belum mencapai target sesuai dengan RPJMD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2026 yaitu sangat inovatif. Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

Tabel 3.92
Kategori Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2024

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 3.93
Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Peringkat Nasional	Nilai/Predikat
Kabupaten Banggai	Peringkat 72	59,812 (inovatif)
Kota Palu	Klaster Kota	55,913 (inovatif)
Provinsi Sulawesi Tengah	Klaster provinsi	55,224 (inovatif)
Kabupaten Tojo Una-Una	Peringkat 159	50,475 (inovatif)

Kabupaten Parigi Moutong	Peringkat 166	49,366 (inovatif)
Kabupaten Morowali	Peringkat 205	45,897 (inovatif)
Kabupaten Banggai Laut	Peringkat 250	40,898 (inovatif)
Kabupaten Morowali Utara	Peringkat 260	39,999 (inovatif)
Kabupaten Toli-Toli	Peringkat 262	39,811 (inovatif)
Kabupaten Sigi	Peringkat 280	38,141 (inovatif)
Kabupaten Buol	Peringkat 312	34,55 (Kurang inovatif)
Kabupaten Banggai Kepulauan	Peringkat 315	33,84 (kurang inovatif)
Kabupaten Poso	Peringkat 338	26,16 (Kurang inovatif)
Kabupaten Donggala	Peringkat 386	6,10 (Kurang inovatif)

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2024, berada dalam posisi 72. Terjadi peningkatan di tahun 2024, dimana Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai naik ke posisi 72 dari posisi 116 pada tahun 2023. Kabupaten Banggai menempati urutan pertama untuk indeks inovasi daerah tingkat kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah, bahkan nilai Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Banggai masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi bukti atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis inovasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai target pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Banggai semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah yang unggul dalam hal inovasi di tingkat regional. Melalui kolaborasi yang kuat dan visi yang jelas, Kabupaten Banggai bertekad untuk terus menjadi pelopor dalam memajukan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Penilaian Inovasi Oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu *Innovative Government Award* (IGA), ditentukan oleh kuantitas dengan 36 indikator penilaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.94
Penilaian Inovasi Oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu *Innovative Government Award* (IGA)

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD/RPD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.	0,5	Terpenuhinya dua (2) dari empat (4) tahapan: - RKPDP - KUA/ PPAS	Terpenuhinya tiga (3) dari empat (4) tahapan: - RKPDP - KUA/PPAS - RAPBD	Terpenuhinya keseluruhan tahapan: - RKPDP - KUA/PPAS - RAPBD - APBD
		Pengalokasian Mandatory Spending pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan (10% APBD), dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH) dan belanja infrastruktur (25% DTU)	0,5	Sudah memenuhi 2 dari 4 komponen Mandatory Spending	Sudah memenuhi 3 dari 4 komponen Mandatory Spending	Sudah memenuhi keseluruhan komponen Mandatory Spending
3	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
4	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	≤ 46,42%	46,43% 100,57%	s.d. ≥ 100,58%
5	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata-rata penduduk konstan (T1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1	≤ 3,11%	3,12% 3,90%	s.d. ≥ 3,91%
6	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)	0,75	≤ 0,32%	0,33% 0,49%	s.d. ≥ 0,50%
		b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	≥ 5,33%	3,77% 5,32%	s.d. ≤ 3,76%
7	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	≤ 0,00%	0,01% 8,00%	s.d. ≥ 8,01%
8	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)	1,5	≤ 2,64%	2,65% 10,39%	s.d. ≥ 10,40%
9	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/ Unqualified Opinion
10	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sikip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
11	Penurunan Angka Kemiskinan	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (−([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1)	0,75	≤ 0,12%	0,13% 0,21%	s.d. ≥ 0,22%
		b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase	0,75	≥ 9,37%	7,87% 9,36%	s.d. ≤ 7,86%

penduduk miskin dari BPS (T-1)						
12	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	1	≤ 0,59	0,60 s.d. 0,70	≥ 0,71
13	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pemberian Piagam Penghargaan	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/ insentif	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya
14	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk policy brief, policy paper, makalah kebijakan dan artikel kebijakan dua tahun terakhir	2	1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
15	Roadmap SIDA	Peta Jalan sistem inovasi daerah atau Rencana Induk Pemajuan Iptek	2	Masih berbentuk rancangan dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek	Telah membuat dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek yang telah disepakati	Telah membuat dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek dan ditetapkan dalam Perkada/Perda
16	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Keputusan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah
17	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
18	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2
19	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)
20	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
21	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih
22	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana dan ditetapkan oleh Kepala	Ada pelaksana dan ditetapkan melalui Keputusan	Ada pelaksana dan ditetapkan melalui Keputusan atau

				Perangkat Daerah (Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD, Lurah, dsb)	atau Penugasan Kepala Perangkat Daerah	Penugasan Kepala Daerah
23	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
24	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Foto sosialisasi yang berlatar belakang spanduk kegiatan (luring/daring) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial	Media Berita
25	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
26	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb 4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)	1	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/langsung, call center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna.
27	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5- 8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
28	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2- 5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
29	Penyelesaian layanan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi	1	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 85%	≥ 86%

	pengaduan	keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.					
30	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	2	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan Contoh: Jagaboy Boyolali (integrasi layanan dalam inspektorat satu portal inspektorat)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain Contoh: Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok Single Windows, Jogja Smart Service, Tahu Sumedang, Sapa Warga (jawa Barat), Ragem (Kota Serang)	
				Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen) Contoh: Peningkatan layanan melalui kegiatan jemput bola (sebelumnya pelayanan dilakukan secara terpusat dan belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah/sasaran)	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan Contoh: Inovasi dinas kesehatan menggunakan aplikasi milik kemenkes dalam salah satu tahapannya. Lebih dari satu inovasi dari satu dinas yang sama dilaksanakan secara terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan Misal inovasi penanganan stunting kerja sama antara dinas kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial Ketiga perangkat daerah tersebut tergabung dalam satu koordinasi.	
31	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	
32	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain. Contoh	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	

		manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken. Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sistem informasi online/daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll.				
33	Kemanfaatan inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	3	Cakupan penerima manfaat 1-100 orang	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih
				Cakupan penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran
				Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%
				Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 20\%$
				Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang
34	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal perangkat daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis
35	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi
36	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan ≥ 200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal.		

Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong Perangkat daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, dengan terus berinovasi dan

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Masyarakat, salah satu bentuk apresiasi dan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Banggai bagi perangkat daerah yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024. Adapun daftar inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.95
Daftar Inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi daerah
Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Urusan pemerintahan	Estimasi Skor Kematangan
1	Cekatan Tiba Berakhir Indah	Kesehatan	94
2	Si Penabuh Hati	Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	92
3	Gallery Online	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98
4	Gelora	Kepemudaan dan olah raga	92
5	Kadera	Kesehatan	92
6	Jalapagos Plus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	94
7	Sapa bumil	Kesehatan	91
8	Jotos	Kesehatan	90
9	Tapak rusa Masama	Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	90
10	Siperman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	95
11	E-Kalibosi	Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	92
12	Pesan Mama	Kesehatan	91
13	Teman Sejiwa	Kesehatan	98
14	Laser KB	Kesehatan	91
15	Silat Pencak	Tenaga kerja	90
16	Sabit	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93
17	Ba Pantau ASN	Kuangan	98
18	SJSP Perikanan	Kelautan dan Perikanan	93
19	Mantri Healing	Pertanian	91
20	IM3	Kesehatan	81
21	Beristri	Pendidikan	92
22	Montir Desa	Fungsi penunjang lainnya	94

		sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	
23	Rudal	Pendidikan	95
24	Istri Anggun	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	99
25	SIPBJ	Komunikasi dan Informatika	91
26	E-absensi	Komunikasi dan Informatika	95
27	ANC Plus	Kesehatan	87
28	Si Batik Maleo	Kesehatan	89
29	Ambulance Dering	Kesehatan	101
30	Banggai Free Wifi	Komunikasi dan Informatika	93
31	Ayah Ibu Asuh Stunting	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	97
32	Tabek	Pertanahan	84
33	Pasar tani	Perdagangan	89
34	Smart ASN	Komunikasi dan Informatika	92
35	Simfoni Angan	Perdagangan	95
36	SJSP Pertanian	Pertanian	99
37	Bumdes Maima	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99
38	SJSP Peternakan	Pertanian	97
39	ATFM2P	Pertanian	77
40	Sekmantu	Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	100
41	Si Ade Kembali Sekolah	Pendidikan	85
42	3T	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
43	Pelimpahan sebagian Bupati Kepada Camat	Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	88

Sumber : Badan riset dan inovasi Daerah Kabupaten Banggai (2024)

Mendorong peningkatkan inovasi di daerah memiliki tantangan tersendiri. Berikut beberapa kendala yang umum dihadapi yang bisa dipertimbangkan:

1. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan di bidang inovasi atau riset dikalangan pegawai dan Masyarakat.
2. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas lainnya dapat menghambat pengembangan inovasi di daerah
3. Masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang peluang dan perkembangan inovasi

Solusi yang dapat mendorong peningkatan inovasi antara lain

1. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk program pengembangan keterampilan
2. Membangun kemitraan dengan penyedia layanan teknologi
3. Meningkatkan komunikasi dan publikasi mengenai program inovasi melalui media sosial, website, dan seminar. Mengadakan pameran inovasi lokal

Dengan menghadapi kendala-kendala tersebut melalui berbagai solusi yang terintegrasi, Kabupaten Banggai berpotensi untuk berkembang menjadi daerah yang inovatif. Adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan mempercepat terwujudnya tujuan tersebut.

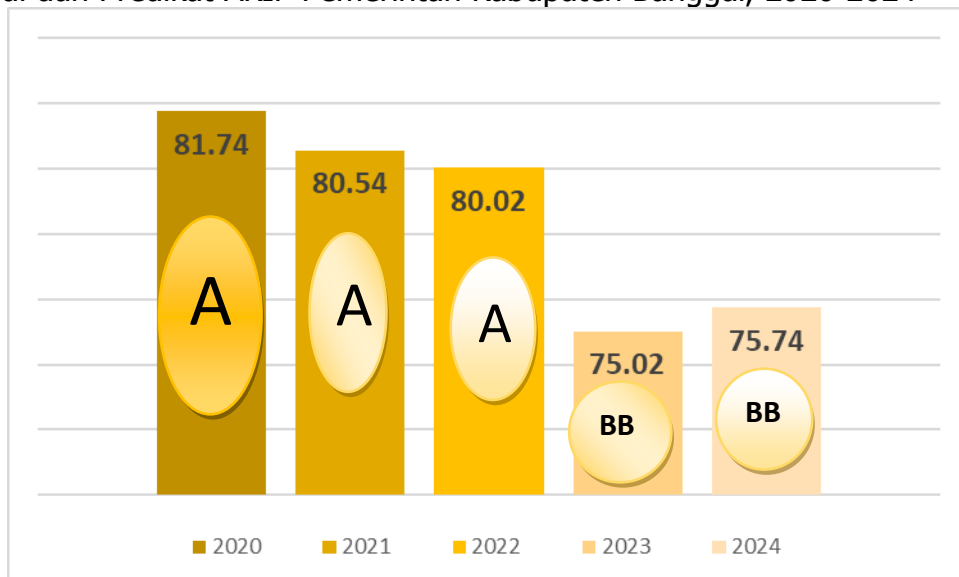
3. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga harus dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan evaluasi pada tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi AKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Grafik 3.35
 Nilai dan Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2020-2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2024

Dari Grafik di atas terlihat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada nilai 81,74 pada tahun 2020, 80,54 pada tahun 2021 dan 80,02 pada tahun 2022 atau masih memperoleh predikat A, namun pada tahun 2023 hingga 2024 turun menjadi 75,02 pada tahun 2023 dan 75,74 pada tahun 2024 dengan predikat “BB”. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh adanya perubahan point-point penilaian oleh KemenPAN-RB, dimana terdapat penyesuaian kriteria penilaian SAKIP yang lebih fokus pada aspek kinerja berbasis hasil.

Tabel. 3.96
 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,09	23,13
b. Pengukuran Kinerja	30	22,61	22,82
c. Pelaporan Kinerja	15	11,97	11,97
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,35	17,82
Nilai Hasil Evaluasi	100	75,02	75,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/449/AA.05/2024, Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan nilai sebesar 75,74 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Capaian realisasi untuk tahun 2024 dengan nilai sebesar 75,74 atau predikat "BB", tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu predikat "AA", namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 hasil evaluasi AKIP dengan nilai 75,02 masih lebih tinggi tahun 2024 sebesar 0,72 point dibandingkan tahun 2023. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah di jabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah dan Unit kerja dibawahnya. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya:

- Masih terdapat sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) pada level kerjanya, contoh Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial 2024 yang salah satu sasaran strategisnya yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi pemerlu kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kinerja tersebut dinilai belum berorientasi hasil apabila menjadi kinerja Kepala Dinas;
- Belum seluruh rumusan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (Spesific, measurable, Achievable, Relevant, and time-bound) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis, sebagai contoh:

1. Pada PK Kepala Dinas Perikanan pada tahun 2024 sasaran strategisnya, yaitu meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan dengan indikator persentase peningkatan produksi perikanan, persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan, indikator-indikator tersebut belum memenuhi kriteria cukup untuk menggambarkan kondisi positif yang diharapkan berkaitan dengan meningkatnya nilai tambah hasil perikanan;
 2. Pada PK Inspektur tahun 2024 salah satu sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator level kapabilitas APIP. Indikator kinerja tersebut dinilai belum memenuhi kriteria cukup untuk mewujudkan kondisi positif yang diharapkan berkaitan dengan meningkatnya kualitas pengawasan.
 - Penjabaran kinerja yang disusun PD belum seluruhnya berdasarkan logical framework/prinsip logis yang menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan masalah yang masih menjadi isu di PD tersebut;
 - Penetapan rencana aksi PD belum menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan, contoh pada dinas Koperasi dan UKM dengan capaian Indikator kinerja persentase pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun 2023 yaitu 0, sedangkan program-program yang berkaitan dengan capaian indikator kinerja tersebut sesuai dengan data yang dilampirkan pada LKJIP Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023 sudah dilakukan dan sebagian besar sudah mencapai target seperti program pelayanan izin simpan pinjam, program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- b. Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
Kabupaten Banggai dan Perangkat Daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya:

- Masih terdapat pengukuran kinerja yang belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, contoh IKU Dinas Pariwisata pada indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dengan formulasi perhitungan jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan mancanegara se-Kabupaten Banggai/jumlah kunjungan wisatawan yang direncanakan se-Kabupaten, formulasi perhitungan tersebut belum relevan untuk menghitung persentase peningkatan kunjungan wisatawan karena belum membandingkan dengan capaian kunjungan wisatawan tahun sebelumnya.
 - Pemerintah Kabupaten Banggai sudah memiliki aplikasi e-sakip yang sudah dapat diakses oleh masyarakat umum, namun aplikasi tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini tampak dari belum adanya pengisian data monitoring kinerja dari setiap PD dan baru sebatas pada penyampaian dokumen-dokumen SAKIP.
 - Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai salah satu dasar pemberian *reward and punishment*.
- c. Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- Kabupaten Banggai telah menyusun Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut tampak dari target kinerja tahun berjalan yang nilainya lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, contoh pada penetapan salah satu target PK Kepala Dinas Sosial tahun 2024 pada indikator persentase LKS yang terakreditasi yaitu 55%, padahal capaian pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 sudah mencapai 83%;
 - Laporan kinerja pada sebagian besar PD masih belum menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- d. Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banggai telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP diseluruh perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya:

- Evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD telah memanfaatkan teknologi informasi, namun pemanfaatan teknologi informasi tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari laporan hasil evaluasi pada sebagian PD yang belum terdapat rekomendasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi tersebut belum dimanfaatkan dalam pemantauan tindak lanjut PD terhadap hasil evaluasi;
- Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP Internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Rekomendasi :

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja sehingga sasaran strategisnya lebih berorientasi hasil (outcome) pada level kerjanya dan memastikan indikator kinerja yang digunakan relevan dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen pohon kinerja (cascading) di level Pemerintah Daerah dan level PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah telah berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, cascading yang telah disusun tersebut diimplementasikan pada dokumen perencanaan kinerja PD;

- 3) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 4) Memastikan seluruh formulasi perhitungan indikator kinerja utama sudah tepat untuk menghitung keberhasilan kinerja yang diharapkan;
- 5) Meningkatkan penggunaan aplikasi e-sakip agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh PD dalam pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala pada level strategis hingga level individu;
- 6) Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, menjadikan capaian indikator kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang, baik yang masih berada di bawah 75% maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut.
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan menyajikan updated data kinerja yang lengkap, analisi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 8) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi internal SAKIP PD dengan memberikan rekomendasi yang spesifik bagi PD untuk peningkatan implementasi SAKIP, serta memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi;
- 9) Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil capaian kinerja PD dan hasil evaluasi SAKIP internal ini, sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Grafik 3.36

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB (Data di Olah Biro Organisasi Prov. Sulawesi Tengah)

Grafik diatas memberikan gambaran tentang Nilai SAKIP pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah berkembang dari tahun ke tahun. Banyak Pemerintah Daerah yang berhasil meningkatkan kinerja mereka, meskipun ada juga yang mengalami penurunan atau stabil dalam kategori yang lebih rendah. Terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten di tahun 2023 dan tahun 2024 memperoleh nilai AKIP tertinggi pertama jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

.Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel.3.97

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.250.341.151.621,00	1.154.295.349.414,00	92,32
Pendaftaran Penduduk	1.401.271.826,00	1.184.601.020,00	84,53
Pencatatan Sipil	400.061.183,00	335.889.500,00	83,96

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	628.682.303,00	560.319.775,00	89,13
Pengelolaan Profil Kependudukan	153.963.772,00	134.622.762,00	87,44
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	340.143.800,00	338.722.140,00	99,58
Promosi Penanaman Modal	449.552.000,00	449.494.240,00	99,99
Pelayanan Penanaman Modal	350.753.250,00	349.807.630,00	99,73
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	591.466.000,00	518.530.000,00	87,67
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	329.160.350,00	328.992.110,00	99,95
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	258.741.500,00	245.815.580,00	95,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	341.073.800,00	325.533.380,00	95,44
Pengelolaan Arsip	642.770.000,00	585.187.550,00	91,04
Pembinaan Perpustakaan	756.564.200,00	670.799.600,00	88,66
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	31.421.200,00	31.421.200,00	100,00
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	50.063.229.882,00	50.063.229.882,00	100,00
Perekonomian dan Pembangunan	5.704.797.065,00	5.704.797.065,00	100,00
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.079.348.000,00	20.007.657.627,00	73,89
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.163.067.050,00	3.605.947.884,00	86,61
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.814.524.550,00	5.275.798.238,00	90,73
Pengelolaan Keuangan Daerah	426.135.613.177,00	423.454.715.750,00	99,37
Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.654.649.400,00	4.118.609.850,00	88,48
Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.949.720.800,00	3.604.892.354,00	91,27
Kepegawaian Daerah	6.048.134.465,00	5.375.895.761,00	88,89
Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.368.391.726,00	1.962.658.490,00	82,87
Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.709.258.400,00	4.654.220.267,00	98,83
Penyelenggaraan	4.576.755.100,00	3.425.786.807,00	74,85

Pengawasan			
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	108.599.288.403,00	69.850.980.733,00	64,32
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.548.212.982,00	3.295.327.503,00	72,45
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.690.300,00	30.976.000,00	67,80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.070.731.700,00	1.013.422.200,00	94,65
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.082.000,00	6.173.500,00	40,93
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	679.862.250,00	435.519.982,00	64,06
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.545.758.050,00	14.015.811.310,00	84,71
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.018.897.400,00	906.205.971,00	88,94
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	66.810.107.370,00	66.635.736.561,00	99,74
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	179.129.400,00	118.641.630,00	66,23
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	269.696.450,00	224.940.000,00	83,40
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	7.962.787.662,00	746.083.550,00	9,37
Jumlah	2.010.779.510.387,00	1.849.639.114.816,00	91,99

Sumber : Setda, Setwan, Dinas Dukcapil, DPMPSTP, Dispursipan, Bakesbangpol, BPKAD, Bappeda, Bripda, Kecamatan, 2024

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya indeks reformasi birokrasi, indeks inovasi daerah dan nilai SAKIP Kabupaten Banggai, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 89,71% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut

sebesar Rp. 1.849.639.114.816,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.010.779.510.387,00 atau sebesar 91,99%.

Tabel 3.98
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	% Rata-Rata Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,19	397.312.929.995,00	316.099.731.162,00	79,56
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Angka Kemiskinan				
	Gini Rasio				
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	110,43	8.455.886.157,00	8.000.808.615,00	94,62
Tingkat Efisiensi : 15,81%					
Tingkat Efektifitas : 116,71%					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	75,50	9.865.789.900,00	9.557.918.692,00	96,88
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	92,16	479.102.714.028,00	443.731.602.729,00	92,62
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda	Indeks Ketahanan Daerah	92,50	9.766.318.106,00	7.816.968.604,00	80,04

dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	106,07	160.924.983.140,00	153.605.793.934,00	95,45
	Indeks Ketahanan Pangan				
Tingkat Efisiensi : 10,62%					
Tingkat Efektifitas : 111,13%					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98,95	17.635.849.185,00	16.790.087.024,00	95,20
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	12,41	4.856.035.321,00	4.735.040.369,00	97,51
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,04	5.737.497.400,00	4.559.087.189,00	79,46
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	Indeks Reformasi Birokrasi	89,71	2.010.779.510.387,00	1.849.639.114.816,00	91,99
	Indeks Inovasi Daerah				
	Nilai SAKIP				

1.4. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 3.363.546.137.928,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.073.955.057.822,47 atau mencapai 91,39%. Rincian pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah meliputi:

Tabel 3.99
Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN	3.175.012.404.284,00	3.255.404.289.331,42	102,53
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	253.313.354.132,00	226.248.539.500,42	89,32
Pajak Daerah	108.798.011.100,00	75.297.676.413,67	69,21
Retribusi Daerah	27.282.576.950,00	20.091.632.837,18	73,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	6.234.376.221,00	239,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.632.766.082,00	124.624.854.028,57	108,72
Pendapatan Transfer	2.894.338.608.964,00	3.005.607.896.323,00	103,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.827.201.620.788,00	2.924.359.805.183,00	103,44
Dana Perimbangan	2.598.281.383.788,00	2.695.439.568.183,00	103,74
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	228.920.237.000,00	228.920.237.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.136.988.176,00	81.248.091.140,00	121,02
Pendapatan Bagi Hasil	64.516.988.176,00	81.048.091.140,00	125,62
Bantuan Keuangan	2.620.000.000,00	200.000.000,00	7,63
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.360.441.188,00	23.547.853.508,00	86,07
Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	2.658.248.117,00	105,67

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.844.882.188,00	20.889.605.391,00	84,08
---	-------------------	-------------------	-------

Sumber : BPKAD Kab. Banggai, 2024

Berdasarkan rincian pendapatan daerah pada tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan realisasi pendapatan diperoleh sebesar 102,53% dan realisasi terbesar masih berada pada pendapatan transfer sebesar Rp. 3.005.607.896.323,00 atau 103,84% dari total pendapatan transfer Rp. 2.894.338.608.964,00 Kabupaten Banggai.

Berdasarkan rincian tersebut diatas dapat diuraikan menurut sumber pendapatan dengan penjabaran bahwa :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan kewenangannya berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp. 226.248.539.500,42 atau 89,32% lebih kecil Rp. 27.064.814.631,58 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 253.313.354.132,00 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp. 108.798.011.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 75.297.676.413,67 atau sebesar 69,21% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.100
Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	3.371.275.000,00	3.278.864.472,00	97,26
2	Pajak Restoran	17.614.375.000,00	11.866.452.731,00	67,37
3	Pajak Hiburan	610.560.700,00	303.902.393,00	49,77
4	Pajak Reklame	2.356.858.500,00	1.525.475.505,00	64,72
5	Pajak Penerangan Jalan	29.850.000.000,00	27.867.740.757,00	93,36
6	Pajak Parkir	725.771.750,00	651.694.408,00	89,79
7	Pajak Air Tanah	15.305.225.000,00	1.857.492.707,00	12,14

8	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	2.094.890,00	8,38
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.967.312.200,00	12.237.289.339,67	76,64
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.945.292.950,00	10.523.080.512,00	88,09
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.026.340.000,00	5.183.588.699,00	47,01
Jumlah		108.798.011.100,00	75.297.676.413,67	69,22

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dapat diketahui bahwa masing – masing jenis Pajak Daerah mencapai angka realisasi kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 secara umum mencapai 69,22% sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi Pajak Daerah mencapai angka Rp. 75.297.676.413,67 Masalah/kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang belum menyadari kewajiban membayar pajak, bahkan berusaha menyembunyikan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
2. Menurunnya transaksi jual beli atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
3. Belum optimalnya proses penagihan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha burung walet.
4. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku usaha dalam memahami dan/atau sengaja menghindari kewajiban membayar pajak.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2024 sebesar Rp. 20.091.632.837,18 atau 73,64% dari pagu perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.282.576.950,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel. 3.101
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	11.555.995.100,00	13.051.975.976,18	112,95
2.	Retribusi Jasa Usaha	10.471.986.950,00	5.422.436.441,00	51,78
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.254.594.900,00	1.617.220.420,00	30,78
Jumlah		27.282.576.950,00	20.091.632.837,18	73,64

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 27.282.576.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.091.632.837,18 atau 73,64% yang berarti kurang dari angka yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 mencapai angka persentase yang bervariasi, mulai dari persentase terendah 30,78% hingga mencapai 112,95%.

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi realisasi Retribusi Daerah tersebut, yaitu :

- Belum maksimalnya pelayanan pemungutan sampah terhadap wajib retribusi.
- Penagihan retribusi hanya dilakukan di rumah-rumah yang biasa dilalui oleh truk pengangkut sampah
- Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dalam membayar iuran/retribusi sampah
- Banyaknya kawasan parkir di tepi jalan umum yang berstatus jalan nasional sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tidak berwenang dalam penarikan retribusi; b) Bahwa fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah belum memenuhi standar pelayanan publik untuk dapat dipungut retribusi; c) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran sehingga pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat dilaksanakan pantai se-Kabupaten Bnaggai
- Masih kurangnya tempat pelelangan ikan yang tersebar di 21 kecamatan yang merupakan wilayah pesisir, sehingga realisasi PAD sector prikanan sangat minim.

- f. Kurangnya tenaga pengawasan/pemungut retribusi PAD dibandingkan dengan luas wilayah penagihan hasil produksi perikanan
- g. Dinas Perhubungan tidak lagi melakukan pemungutan retribusi di terminal
- h. Fasilitas parkir di sejumlah tempat khusus parkir tidak tersedia.
- i. Kondisi Pasar Simpong sebagai salah satu potensi besar penghasil retribusi masih proses rehabilitasi
- j. Belum adanya sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran retribusi daerah
- k. Masih ada objek retribusi daerah yang belum tergali dengan baik
- l. Terjadi penurunan penumpang yang menggunakan jasa kapal pelayaran termasuk kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 karena kondisi sarana pelataran di pelabuhan rusak parah
- m. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG
- n. Tidak semua bangunan dapat diberikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 3.102
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000.000,00	6.234.376.221,00	239,78

Sumber : BPKAD Kab.Banggai 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 adalah Rp. 6.234.376.221,00 atau 239,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 Realisasi tersebut telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2024, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 114.632.766.082,00 dengan realisasi sebesar Rp. 124.624.854.028,57 atau sebesar 108,72%.

Tabel. 3.103
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	1.464.254.084,00	133,11
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00	7.274.507.723,00	121,24
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	38.477.517,00	7,70
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.870.000.000,00	7.994.931.874,39	116,18
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	376.707.486,17	0,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.800.000,00	0,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	3.934.661.917,00	4.107.450.730,18	104,39
9	Pendapatan BLUD	96.228.104.165,00	103.366.724.613,83	107,42
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		114.632.766.082,00	124.624.854.028,57	108,72

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

b. Pendapatan Transfer

Dana Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, transfer dari Pemerintah Provinsi, serta bantuan keuangan. Pada TA 2024 Dana Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Kas Daerah sebesar Rp. 3.005.607.896.323,00 atau 103,84% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.894.338.608.964,00 Berikut ini merupakan rincian dari pendapatan transfer.

Tabel. 3.104
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.827.201.620.788,00	2.924.359.805.183,00	103,44
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.136.988.176,00	81.248.091.140,00	121,02
Jumlah		2.894.338.608.964,00	3.005.607.896.323,00	103,84

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.105
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Dana Perimbangan	2.598.281.383.788,00	2.695.439.568.183,00	103,74
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
3	Dana Desa	228.920.237.000,00	228.920.237.000,00	100,00
Jumlah		2.827.201.620.788,00	2.924.359.805.183,00	103,44

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.106
Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	64.516.988.176,00	81.048.091.140,00	125,62
2	Bantuan Keuangan	2.620.000.000,00	200.000.000,00	7,63
Jumlah		67.136.988.176,00	81.248.091.140,00	121,02

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 27.360.441.188,00 terealisasi sebesar Rp. 23.547.853.508,00 atau 86,07%.

1.4.2. Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Secara ideal Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun komponen Belanja Daerah meliputi:

Tabel 3.107
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
BELANJA DAERAH	3.363.546.137.928,00	3.073.955.057.822,47	91,39
BELANJA OPERASI	2.191.767.683.396,31	1.985.683.820.421,02	90,60
Belanja Pegawai	1.029.036.191.993,00	932.049.742.203,00	90,58
Belanja Barang dan Jasa	1.025.744.498.368,31	936.605.851.216,02	91,31
Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.884.960,00	99,97
Belanja Hibah	134.141.645.435,00	114.229.309.642,00	85,16
Belanja Bantuan Sosial	2.441.347.600,00	2.395.032.400,00	98,10
BELANJA MODAL	743.454.667.126,69	671.072.817.796,45	90,26
Belanja Modal Tanah	6.781.000.000,00	868.905.947,00	12,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.385.995.346,00	188.608.000.897,81	90,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.217.556.632,38	186.941.250.924,57	87,68
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.399.465.148,31	294.276.385.027,07	93,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	30.000.000,00	11,54
Belanja Modal Aset Lainnya	410.650.000,00	348.275.000,00	84,81
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.284.301.600,00	158.933.800,00	1,41
Belanja Tidak Terduga	11.284.301.600,00	158.933.800,00	1,41
BELANJA TRANSFER	417.039.485.805,00	417.039.485.805,00	100,00
Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	402.694.427.000,00	402.694.427.000,00	100,00
SURPLUS / DEFISIT	(188.533.733.644,00)	181.447.235.151,95	(96,24)

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2024 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari tabel 3.83 tersebut bahwa belanja kabupaten banggai dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial. Realisasi belanja operasi mencapai sebesar Rp. 1.985.683.820.421,02 atau efisiensi sebesar Rp 206.083.862.975,29 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.191.767.683.396,31 atau 90,60%

Komponen belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp. 932.049.742.203,00 atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 96.986.449.790,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.029.036.191.993,00 atau 90,58%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.108
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	648.032.729.344,00	600.283.426.905,00	92,63
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	226.217.245.164,00	189.170.131.072,00	83,62
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	134.205.477.070,00	122.423.999.819,00	91,22
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.769.661.575,00	18.555.000.778,00	98,86

5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	226.690.840,00	196.657.629,00	86,75
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	882.380.000,00	96,70
7	Belanja Pegawai BLUD	671.908.000,00	538.146.000,00	80,09
Jumlah		1.029.036.191.993,00	932.049.742.203,00	90,58

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 1.025.744.498.368,31 dan terealisasi sebesar Rp. 936.605.851.216,02 atau 91,31%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.109
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Barang	354.707.461.366,31	317.438.754.185,26	89,49
2	Belanja Jasa	334.797.045.048,00	302.921.138.595,80	90,48
3	Belanja Pemeliharaan	16.849.121.838,00	12.884.957.185,96	76,47
4	Belanja Perjalanan Dinas	176.249.994.047,00	151.967.740.151,00	86,22
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.957.085.800,00	6.311.859.000,00	90,73
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.032.879.602,00	40.250.089.260,00	108,69
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.120.640.000,00	3.202.549.317,00	62,54
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.030.270.667,00	101.628.763.521,00	108,08
Jumlah		1.025.744.498.368,31	936.605.851.216,02	91,31

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum, Belanja

Subsidi Terealisasi Sebesar Rp. 403.884.960,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 404.000.000,00 atau 99,97%.

Tabel 3.110
Belanja Subsidi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00	403.884.960,00	99,97
Jumlah		404.000.000,00	403.884.960,00	99,97

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 134.141.645.435,00. atau 85,16% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 114.229.309.642,00. Berikut ini adalah rincian Belanja Hibah TA. 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.111
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	71.086.878.562,00	64.115.668.200,00	90,19
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.906.104.853,00	49.364.183.498,00	85,25
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.376.640.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.022.020,00	749.457.944,00	97,08
Jumlah		134.141.645.435,00	114.229.309.642,00	85,16

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan social dilakukan setelah memprioritaskan penemuan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan selama TA 2024 sebesar Rp. 2.441.347.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.395.032.400,00 atau 98,10.%.

Tabel 3.112
Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	76.500.000,00	76.500.000,0	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.364.847.600,00	2.318.532.400,00	98,04
Jumlah		2.441.347.600,00	2.395.032.400,00	98,10

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

b) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 671.072.817.796,45 atau efisiensi sebesar Rp.72.381.849.330,24 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 743.454.667.126,69 Belanja Modal menyerap dana sebesar 90,26% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan.

Tabel 3.113
Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	6.781.000.000,00	868.905.947,00	12,81
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.385.995.346,00	188.608.000.897,81	90,51
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.217.556.632,38	173.210.623.444,02	87,25
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	314.399.465.148,31	294.276.385.027,17	93,60
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	30.000.000,00	11,54
6	Belanja Modal Aset Lainnya	410.650.000,00	348.275.000,00	84,81
Jumlah		743.454.667.126,69	671.072.817.796,45	90,26

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 11.284.301.600,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 158.933.800,00 atau 1,41%.

Tabel 3.114
Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	11.284.301.600,00	158.933.800,00	1,41
Jumlah		11.284.301.600,00	158.933.800,00	1,41

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

1.4.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Adapun komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai meliputi:

Tabel 3.115
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	202.259.841.864,00	201.294.492.918,07	99,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	201.259.841.864,00	201.259.492.918,07	100,00
Penghematan Belanja	201.259.841.864,00	201.259.492.918,07	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	35.000.000,00	3,50
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	35.000.000,00	3,50
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.726.108.220,00	5.100.000.000,00	37,16
Penyertaan Modal Daerah	12.726.108.220,00	5.100.000.000,00	40,08
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	188.533.733.644,00	196.194.492.918,07	104,06

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2024

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pembiayaan, penjualan obligasi pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- b. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah selama ini baru terbatas pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan atau potensi pendapatan yang direncanakan sulit untuk dinaikan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok-pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- b. Selama tahun anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dan dibelanjakan setiap tahunnya, Alokasi anggaran Pengeluaran pembiayaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 13.726.108.220,00. Hal tersebut disebabkan adanya penyertaan modal daerah dan pemberian Pinjaman Daerah.
- c. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 5.100.000.000,00 atau 37,16% dari target anggaran sebesar Rp. 13.726.108.220,00

3) Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai yang perlu dibayarkan kembali. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp. 201.294.492.918,07 atau 99,52% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 202.259.841.864,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 13.726.108.220,00 namun terealisasi sebesar Rp. 5.100.000.000,00 atau 37,16%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banggai kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2024 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Pelaporan kinerja tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan masa pelaporan tahun ketiga pada periode RPJMD 2021-2026.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target ; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 12 target.

Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2024 dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,90% atau dengan kategori Baik.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target sasaran kinerja di masa yang akan datang, maka dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Membangun koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan unit kerja/instansi terkait.
2. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal.
3. Membangun dan mengintegrasikan sistem pengelolaan dalam komponen SAKIP dengan sistem untuk melaksanakan evaluasi AKIP internal agar temuan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih detail dan akurat.

4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis didukung dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.363.546.137.928,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.073.955.057.822,47 atau 91,39%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dan indikator pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banggai.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

1. Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.
2. Penghargaan dari Kemenkumham RI Sebagai Bentuk Apresiasi Atas Dukungan dan Fasilitas Pemkab Banggai yang Berperan Aktif dalam Mendorong Potensi Kekayaan Intelektual dan Mendukung Pelaksanaan Program Layanan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2024
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai. Sebagai Instansi Dengan Karya Terbaik Dalam Lomba Video Berita Pendek GPR TV yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
4. Penghargaan Universal Health Coverage (Uhc) Award dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan
5. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI
6. Pemerintah Kabupaten Banggai Berhasil Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 Kali Berturut-Turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kabupaten Banggai Berhasil Meraih 3 Piagam Penghargaan dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa Iii Se-Sulawesi Tengah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Gubernur Sulawesi.
8. Kabupaten Banggai Masuk Sebagai 10 Kabupaten Terbaik di Tahun 2021, 2022 Dan 2024 pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/Bappenas RI.
9. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Kategori Terbaik Ii dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Hasil Evaluasi Kapabilitas Pengawasan Kepada Pemerintah Kabupaten Banggai dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
11. Pemerintah Kabupaten Banggai Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Badan Publik "INFORMATIF" Tahun 2024.
12. Pemerintah Kabupaten Banggai Kembali Mencatat Prestasi Membanggakan dalam Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, Serta Kemenkeu Satu (K1S) Awards Tahun 2024.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Selamat & Sukses

PENGANUGERAHAN
 PREDIKAT KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN

ZONA	KATEGORI	OPINI
HIZAU	A	POSITIF

95,83

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

Festival KEKAYAAN INTELEKTUAL 2024
 KEKAYAAN INTELEKTUAL TERLINDUNGI, EKONOMI MANDIRI

Taman Wardhi Budaya Art Center Denpasar Bali, 07 September 2024

Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, MM.,AIFO hadir undangan dalam rangka kegiatan Festival Kekayaan Intelektual 2024 dengan Tema "Kekayaan Intelektual Terlindungi, Ekonomi Mandiri" sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Kemenukumham sebagai bentuk Apresiasi atas Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Banggai yang Berperan Aktif Dalam Mendukung Potensi Kekayaan Intelektual dan Mendukung Pelaksanaan Program Layanan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2024.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

Pemkab Banggai Berhasil Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut

Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, MM.,AIFO terima laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Binsar Karyanto P, ST.,MM.,CSFA.

Dari hasil pemeriksaan LKPD tersebut, Pemkab Banggai mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin, 27 Mei 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

"Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan bagi Masyarakat Indonesia"

Selamat & Sukses

Pemerintah Kabupaten Banggai kembali menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan.

Jakarta Timur, 08 Agustus 2024

PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Banggai H. Furqanuddin Masullil, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan keberhasilannya mencapai cakupan UHC.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

Kabupaten Banggai Raih 3 Penghargaan

Pada Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa III se-Sulawesi Tengah di Ampara Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Banggai berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam Rapat Koordinasi UKPBJ III se-Sulawesi Tengah yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Kab. Tojo Una-Una, 13 Mei 2024

Dengan penerimaan tiga piagam penghargaan ini, Kabupaten Banggai semakin diapresiasi atas kinerja luar biasa meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang berintegritas, transparan, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

SELAMAT & SUKSES

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai

Sebagai Instansi dengan karya terbaik dalam Lomba Video Berita Pendek GPR TV yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tanggal 25 Juni - 04 Agustus 2024.

DKISP BANGGAI

SEBAGAI INSTANSI DENGAN KARYA TERBAIK

LOMBA VIDEO BERITA PENDEK GPR TV

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

